



LPPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

Disusun Oleh :

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2025**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid ☎ (0293) 788215 Fax (0293) 788122
Kode Pos 56511 website: www.inspektorat.magelang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kota Mungkid, 25 Maret 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN MAGELANG



SUTJARSO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199003 1 003



BUPATI MAGELANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Shalom, Om Swastyastu,

Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

Rahayu.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024. LPPD merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan merupakan sumber informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang hasil evaluasinya digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah Daerah.

LPPD merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan



dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Melalui partisipasi Proaktif dari semua komponen Pemerintahan Daerah mulai dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/FORKOPIMDA, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat serta seluruh *stakeholders* yang menjadi *partners* dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Magelang, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang telah tercapai selama tahun 2024. Namun kami juga menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024 ini disampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara serta daerah dan masyarakat Kabupaten Magelang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom, Om Santi Santi Santi Om,

Namo Buddhaya,

Rahayu.

Kota Mungkid, 27 Maret 2025


BUPATI MAGELANG
[Signature]
GRENGSENG PAMUJI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-3
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-14
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-38
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH...	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-2
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-10
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-11
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-3
3.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	III-3
3.2.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya	III-3
3.2.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya	III-3
3.3. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya	III-8
3.3.1 Target Kinerja	III-8
3.3.2 Realisasi	III-9
3.4. Permasalahan dan Kendala	III-11
3.5. Saran dan Tindak Lanjut	III-11
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANADAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	IV-2
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-2
4.1.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-2
4.1.3. Realisasi	IV-6
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV-11



4.1.5.	Dukungan Personil	IV-11
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-12
4.2.	Bidang Urusan Kesehatan	IV-13
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-13
4.2.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-14
4.2.3.	Realisasi	IV-27
4.2.4.	Alokasi Anggaran	IV-43
4.2.5.	Dukungan Personil	IV-44
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-45
4.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV-45
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-45
4.3.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-46
4.3.3.	Realisasi	IV-47
4.3.4.	Alokasi Anggaran	IV-51
4.3.5.	Dukungan Personil	IV-51
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-52
4.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV-53
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-53
4.4.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-53
4.4.3.	Realisasi	IV-54
4.4.4.	Alokasi Anggaran	IV-57
4.4.5.	Dukungan Personil	IV-58
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-59
4.5.	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-60
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-60
4.5.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-60
4.5.3.	Realisasi	IV-65
4.5.4.	Alokasi Anggaran	IV-71
4.5.5.	Hasil Capaian	IV-71
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-72
4.6.	Bidang Urusan Sosial	IV-74
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV-74
4.6.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	IV-75
4.6.3.	Realisasi	IV-79
4.6.4.	Alokasi Anggaran	IV-85
4.6.5.	Dukungan Personil	IV-85
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	IV-86
4.7.	Program dan Kegiatan	IV-87
4.7.1.	Urusan Pendidikan	IV-87
4.7.2.	Urusan Kesehatan	IV-90
4.7.3.	Urusan Pekerjaan Umum	IV-91
4.7.4.	Urusan Perumahan Rakyat	IV-92
4.7.5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	IV-92
4.7.6.	Urusan Sosial	IV-95
BAB V	PENUTUP	V-1



Lampiran 2.2.1.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	1
Lampiran 2.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	11
Lampiran	Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2024	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1.	Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-6
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-7
Tabel 1.3.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang	I-7
Tabel 1.4.	Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah ..	I-9
Tabel 1.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023	I-12
Tabel 1.6.	Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan TA 2023	I-13
Tabel 1.7.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024 dan TA 2023	I-14
Tabel 1.8.	Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-15
Tabel 1.9.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-24
Tabel 1.10.	Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal	I-39
Tabel 1.11.	Program Pembangunan Daerah Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-40
Tabel 1.12.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-41
Tabel 1.13.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-42
Tabel 1.14.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-42
Tabel 1.15.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-43
Tabel 1.16.	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-43
Tabel 1.17.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-44
Tabel 1.18.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-45
Tabel 1.19.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-45
Tabel 1.20.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-46
Tabel 1.21.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-47
Tabel 1.22.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-48



Tabel 1.23.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-49
Tabel 1.24.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-49
Tabel 1.25.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Dalam Arah Kebijakan Satpol PP dan PK serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-50
Tabel 1.26.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Satpol PP dan PK Serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-51
Tabel 1.27.	Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-52
Tabel 1.28.	Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024	I-52
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	II-1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-10
Tabel 2.4.	Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode Warna	II-12
Tabel 2.5.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Pada Indikator Tujuan	II-13
Tabel 2.6.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Pada Indikator Sasaran	II-15
Tabel 2.7.	Capaian Kriteria Penilaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 pada Indikator Sasaran	II-17
Tabel 2.8.	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.....	II-17
Tabel 2.9.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024	II-24
Tabel 2.10.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2024.....	II-25
Tabel 2.11.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.12.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, dengan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu 2020-2024	II-26
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat Tahun 2024	II-28
Tabel 2.14.	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-29
Tabel 2.15.	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	II-30
Tabel 2.16.	Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan	II-32



	Kedu Tahun 2024	
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2024	II-33
Tabel 2.18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023 ...	II-34
Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2024	II-36
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2024	II-42
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2024	II-44
Tabel 2.22.	Persentase SD/MI dan SMP/MTS yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024	II-46
Tabel 2.23.	Persentase PKBM yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024	II-46
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2024	II-47
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2024	II-49
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024	II-50
Tabel 2.27.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023	II-51
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Sasaran Strategi Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024	II-54
Tabel 2.29.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2024	II-58
Tabel 2.30.	Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023	II-58
Tabel 2.31.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023	II-60
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2024	II-61
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2024	II-62
Tabel 2.34.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	II-64
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2024	II-65
Tabel 2.36.	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	II-66
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Sasaran StrategisMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2024	II-68



Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024	II-69
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024	II-72
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024	II-73
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2024	II-74
Tabel 2.42.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-78
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2024	III-4
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2024	III-10
Tabel 4.1.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)	IV-2
Tabel 4.2.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-3
Tabel 4.3.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-6
Tabel 4.4.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024.	IV-7
Tabel 4.5.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar Tahun 2024	IV-8
Tabel 4.6.	Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesetaraan Tahun 2024	IV-9
Tabel 4.7.	Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-10
Tabel 4.8.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-11
Tabel 4.9.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-12
Tabel 4.10.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-12
Tabel 4.11.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-14
Tabel 4.12.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.13.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	IV-28
Tabel 4.14.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	IV-30
Tabel 4.15.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.....	IV-31
Tabel 4.16.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita	IV-31
Tabel 4.17.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	IV-32
Tabel 4.18.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.....	IV-34



Tabel 4.19.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	IV-35
Tabel 4.20.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.....	IV-36
Tabel 4.21.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	IV-37
Tabel 4.22.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	IV-38
Tabel 4.23.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	IV-40
Tabel S4.24.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	IV-41
Tabel 4.25.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-42
Tabel 4.26.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-43
Tabel 4.27.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-44
Tabel 4.28.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-45
Tabel 4.29.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-46
Tabel 4.30.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-48
Tabel 4.31.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	IV-48
Tabel 4.32.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	IV-49
Tabel 4.33.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-50
Tabel 4.34.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-51
Tabel 4.35.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-51
Tabel 4.36.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-52
Tabel 4.37.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024.....	IV-54
Tabel 4.38.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-54
Tabel 4.39.	Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-55



Tabel 4.40.	Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IV-56
Tabel 4.41.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-57
Tabel 4.42.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-57
Tabel 4.43.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-58
Tabel 4.44.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-59
Tabel 4.45.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-61
Tabel 4.46.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-65
Tabel 4.47.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	IV-65
Tabel 4.48.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN).....	IV-67
Tabel 4.49.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	IV-67
Tabel 4.50.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	IV-68
Tabel 4.51.	Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	IV-69
Tabel 4.52.	Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-70
Tabel 4.53.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-71
Tabel 4.54.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2025	IV-72
Tabel 4.55.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-73
Tabel 4.56.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-73
Tabel 4.57.	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-75
Tabel 4.58.	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-79
Tabel 4.59.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	IV-79
Tabel 4.60.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar	IV-80



	Panti.....	
Tabel 4.61.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	IV-81
Tabel 4.62.	Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	IV-82
Tabel 4.63.	Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-83
Tabel 4.64.	Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	IV-84
Tabel 4.65.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-85
Tabel 4.66.	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-86
Tabel 4.67.	Permasalahan dan Solusi Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-86
Tabel 4.68.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-87
Tabel 4.69.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-90
Tabel 4.70.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-91
Tabel 4.71.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-92
Tabel 4.72.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten magelang Tahun 2024	IV-93
Tabel 4.73.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024	IV-95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Kabupaten Magelang	I-5
Gambar 2.1.	Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-26
Gambar 2.2.	Grafik Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2022	II-29
Gambar 2.3.	Perbandingan Presentase Angka Penduduk Miskin Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024.	II-31
Gambar 2.4.	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024	II-32
Gambar 2.5.	Nilai PDSK Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023	II-37
Gambar 2.6.	Nilai Aspek PDSK Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2023	II-38
Gambar 2.7.	Nilai Aspek PDSK Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2024 Perbandingan LPE Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022-2024	II-39
Gambar 2.8.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2024	II-45
Gambar 2.9.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2024	II-45
Gambar 2.10.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2.11.	Grafik Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2.12.	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	II-55
Gambar 2.13.	Perbandingan TPT Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu Tahun 2019-2024	II-56
Gambar 2.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	II-57
Gambar 2.15.	Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	II-61

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat daerah yang bersangkutan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK *Outcome* (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

LPPD dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintah daerah. LPPD merupakan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun, dalam rangka pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan tolak ukur kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan dan penyampaian LPPD ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain:



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Magelang adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-undang tersebut Kota Magelang diberi hak untuk mengatur Rumah Tangga sendiri. Dengan demikian di Kota Magelang berpusat empat (4) Badan Pemerintahan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu:

1. Pemerintah Kota Magelang;
2. Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. Kantor Karesidenan kedua; dan
4. Akademi Militer.

Karena fakta-fakta tersebut maka masalah kepadatan Kota Magelang tidak terhindarkan. Di sisi lain sesuai dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap pelayanan pemerintah dan pembangunan semakin meningkat maka muncul gagasan untuk memindahkan ibu kota kabupaten. Gagasan tersebut menguat dengan pengarahannya Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Februari 1979, Nomor: OP.140/1979 perihal Pemindahan ibukota Kabupaten Dati II Magelang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sejak bulan Juli 1979, saat itu Bupati Magelang dijabat oleh Drh. Soepardi diadakan kerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang, untuk mengadakan survei lokasi ibukota Kabupaten yang menghasilkan alternatif ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muntilan, Mertoyudan dan Secang. Hasil survei tersebut dikuatkan oleh survei ulang yang dilaksanakan oleh Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen



Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor: 135/3492/PUOD, tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Selanjutnya pemindahan ibu kota kabupaten ke Kota Mungkid ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Magelang dari Wilayah Kotamadya Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang tanggal 4 Agustus 1982, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid. Kota baru yang dibentuk di wilayah Kecamatan Mungkid, dan Mertoyudan yang terdiri atas Desa Mendut, Sawitan dan Deyangan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, maka diadakan persiapan fisik maupun administrasi.

Persiapan fisik dilaksanakan dengan membangun di atas tanah seluas 8,08 ha, yang meliputi pembangunan Pendopo, Kantor Sekretariat, Gedung DPRD, Gudang, Garasi, Kantor Dinas Otonom dan Dinas Non Otonom. Komplek Kantor Pemerintahan Kabupaten Magelang diresmikan penggunaannya oleh Pj. Bupati Magelang Drs. AL Soelistiya dan Ketua DPRD Faishal Soenarto pada tanggal 23 Februari 1984. Pada waktu itu juga dibangun sarana air minum, Gedung SMP dan SMA, Lapangan Drh. Soepardi, Pelebaran jalan Karet-Sawitan dan pembangunan Masjid An Noor.

Kota Mungkid diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Magelang pada tanggal 22 Maret 1984 oleh Gubernur Jawa Tengah M Ismail, atas nama Menteri Dalam Negeri pada Prasasti peresmian Kota Mungkid, berada di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang, dan setiap tahun pada tanggal 22 Maret diperingati sebagai hari jadi Kota Mungkid.

b. Data Geografis Wilayah

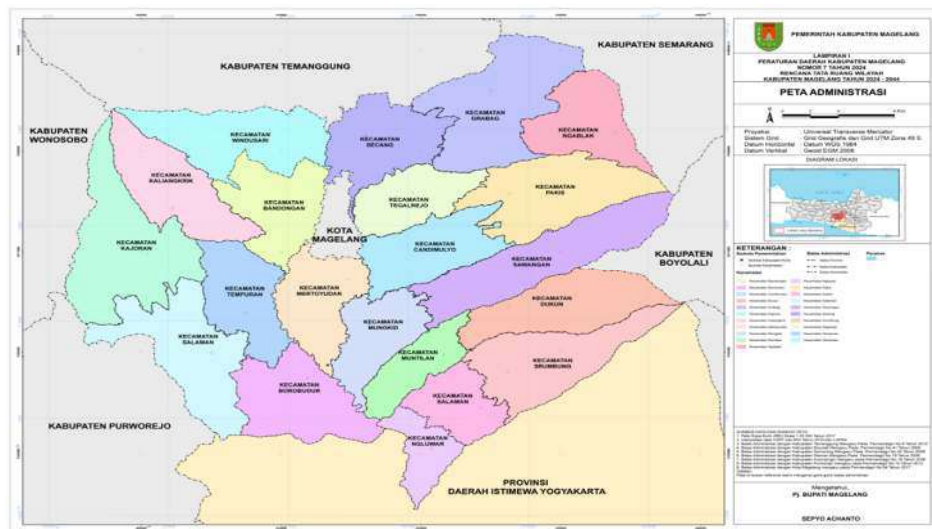
Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 1.085,73 km² (seribu delapan puluh lima koma tujuh tiga kilo meter persegi), sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau, luas Kabupaten Magelang adalah 1.129,983 km² (seribu seratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan tiga kilo meter persegi). Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110001' 51" –

110026'58" Bujur Timur dan 7019'13" – 7042'16" Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

Sedangkan di tengahnya terdapat wilayah Kota Magelang.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Magelang



Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2024-2044

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah



desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang.

Tabel 1.1.

Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	2	3	4	5	6	7
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,63	17
8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2024

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang 2024 sebanyak 1.341.447 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.187 jiwa/km. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (119.683 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (96.879 jiwa) dan Secang (85.248 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (33.247 jiwa).



Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Salaman	38.570	38.367	76.937
2	Borobudur	32.498	32.131	64.629
3	Ngluwar	16.553	16.694	33.247
4	Salam	24.543	24.733	49.276
5	Srumbung	24.708	24.883	49.591
6	Dukun	23.813	23.986	47.799
7	Muntilan	40.636	40.919	81.555
8	Mungkid	38.165	38.613	76.778
9	Sawangan	29.599	29.443	59.042
10	Candimulyo	25.982	25.351	51.333
11	Mertoyudan	59.199	60.484	119.683
12	Tempuran	27.289	26.766	54.055
13	Kajoran	31.670	30.715	62.385
14	Kaliangkrik	31.716	30.401	62.117
15	Bandongan	32.428	31.085	63.513
16	Windusari	27.506	26.055	53.561
17	Secang	42.594	42.654	85.248
18	Tegalrejo	27.602	27.856	55.458
19	Pakis	28.278	27.042	55.320
20	Grabag	49.091	47.788	96.879
21	Ngablak	21.907	21.134	43.041
	Jumlah	674.347	667.100	1.341.447

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Magelang memiliki 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 367 desa.

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Magelang,

Tabel 1.3.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Salaman	20	20	20
2	Borobudur	20	20	20
3	Ngluwar	8	8	8
4	Salam	12	12	12
5	Srumbung	17	17	17
6	Dukun	15	15	15
7	Muntilan	14	14	14
8	Mungkid	16	16	16



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
9	Sawangan	15	15	15
10	Candimulyo	19	19	19
11	Mertoyudan	13	13	13
12	Tempuran	15	15	15
13	Kajoran	29	29	29
14	Kaliangkrik	20	20	20
15	Bandongan	14	14	14
16	Windusari	20	20	20
17	Secang	20	20	20
18	Tegalrejo	21	21	21
19	Pakis	20	20	20
20	Grabag	28	28	28
21	Ngablak	16	16	16
		372	372	372

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dibentuk perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah berjumlah 18
5. Badan Daerah berjumlah 4
6. Kecamatan berjumlah 21
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun jumlah ASN Kabupaten Magelang sampai akhir tahun 2024 sejumlah 9.538 orang dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 1.4
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Pendukung	19	4	63	86
2	Sekretariat DPRD	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Pendukung	8	10	12	30
3	Inspektorat	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Pengawas	8	29	11	48
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan	18	5545	143	5706
5	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan	40	1133	106	1279
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Pertanahan	17	25	102	144
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	13	23
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran	13	69	9	91
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Sosial, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	11	12	14	37
10	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bidang Perindustrian, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi	8	30	12	50
11	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan	11	25	68	104
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	9	10	25
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	9	6	23
14	Dinas Perhubungan	Bidang Perhubungan	12	8	15	35
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik	7	25	16	48
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Bidang Penanaman Modal Termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	2	14	7	23
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan	6	18	6	30



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
18	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bidang Pertanian Sub Peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan	16	25	9	50
19	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pariwisata dan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8	12	23	43
20	Dinas Pertanian dan Pangan	Bidang Pertanian dan Bidang Pangan	12	189	18	219
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Perdagangan, Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Serta Bidang Energi Sumber Daya Mineral.	10	12	46	68
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;	9	18	10	37
23	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan	22	17	42	81
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Melaksanakan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Serta Inovasi dan Inovasi yang Terintegrasi di Daerah	9	23	5	37
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	6	4	5	15
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Melaksanakan Urusan Penanggulangan Bencana Daerah	13	6	9	28
27	Kec. Bandongan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	5	1	6	12
28	Kec. Borobudur	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	2	3	11
29	Kec. Candimulyo	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	3	12
30	Kec. Dukun	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	0	9
31	Kec. Grabag	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	5	2	3	10
32	Kec. Kajoran	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	4	2	4	10
33	Kec. Kaliangkrik	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur	6	2	2	10



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		Kewilayahan				
34	Kec. Mertoyudan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	10	1	8	19
35	Kec. Mungkid	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	16	3	2	21
36	Kec. Muntilan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	10	2	5	17
37	Kec. Ngablak	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	6	15
38	Kec. Ngluwar	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	2	11
39	Kec. Pakis	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	5	14
40	Kec. Salam	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	1	4	11
41	Kec. Salaman	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	5	14
42	Kec. Sawangan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	4	13
43	Kec. Secang	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	8	17
44	Kec. Srumbung	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	6	2	1	9
45	Kec. Tegalrejo	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	4	13
46	Kec. Tempuran	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	8	2	1	11
47	Kec. Windusari	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	7	2	5	14
48	RSUD Bukit Menoreh	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	4	70	5	79
49	RSUD Candi Umbul	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	4	64	4	72
50	RSUD Merah Putih	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	10	276	9	295
51	RSUD Muntilan	Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Unsur Kewilayahan	10	414	35	459

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Perangkat Daerah yang memiliki jumlah ASN terbanyak dengan total sebanyak 5.706 ASN, sedangkan Kecamatan Dukun dan Kecamatan Srumbung menjadi Perangkat Daerah dengan ASN paling sedikit yaitu sejumlah 9 orang ASN.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Realisasi Menurut Jenis Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait pendapatan asli daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RKPD Tahun 2024 yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Tabel 1.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Target TA 2024	Realisasi			% Kenaikan/ Penurunan dari realisasi tahun 2023
			TA 2024	%	TA 2023 AUDITED	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	512.763.708.693.00	520.905.288.035.00	101.59	465.486.053.517.00	11.91
2	Pendapatan Transfer	2.285.096.750.893.00	2.249.059.729.796.00	98.42	2.089.541.001.808.00	7.63
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.150.811.000.00	10.495.547.244.00	94.12	18.454.635.298.00	(43.13)
	JUMLAH	2.809.011.270.586.00	2.780.460.565.075.00	98.98	2.573.481.690.623.00	8.04

Sumber Data dari BPPKAD per 31 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 5.1 realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 ditargetkan Rp2.809.011.270.586,00 dan terealisasi sebesar Rp2.780.460.565.075,00 atau sebesar 98,98%.



2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah tahun 2024 ditargetkan Rp2.998.144.579.891,00 dan terrealisasi sebesar Rp2.870.556.698.886,00 atau sebesar 95,74%. Realisasi belanja daerah tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp182.731.759.846,00 atau 6,80%.

Rincian lebih lanjut target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 1.6.
Target dan Realisasi Belanja Daerah
TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Target TA 2024	Realisasi			% Kenaikan/ Penurunan dari realisasi tahun 2023
			TA 2024	%	TA 2023 AUDITED	
1	BELANJA OPERASI	2.002.810.232.246.00	1.912.257.941.800.00	95.48	1.711.794.748.890.00	11.71
a	Belanja Pegawai	1.194.950.806.926.00	1.147.528.392.014.00	96.03	979.808.617.479.00	17.12
b	Belanja Barang dan Jasa	618.810.753.386.00	580.304.885.013.00	93.78	553.587.132.203.00	4.83
c	Belanja Hibah	182.331.270.159.00	178.766.482.973.00	98.04	173.254.489.708.00	3.18
d	Belanja Bantuan Sosial	6.717.401.775.00	5.658.181.800.00	84.23	5.144.509.500.00	9.98
2	BELANJA MODAL	318.177.168.872.00	299.956.820.715.00	94.27	318.001.060.309.00	(5.67)
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21.319.858.595.00	4.120.214.822.00	19.33	5.106.915.740.00	(19.32)
4	BELANJA TRANSFER	655.837.320.178.00	654.221.721.549.00	99.75	652.922.214.101.00	0.20
TOTAL BELANJA DAERAH		2.998.144.579.891.00	2.870.556.698.886.00	95.74	2.687.824.939.040.00	6.80

Sumber Data dari BPPKAD per 31 Januari 2025

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah netto ditargetkan sejumlah Rp189.133.309.305,00 terealisasi Rp190.808.309.305,00. Rincian lebih lanjut



anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.7.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah
TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	Target TA 2024	Realisasi			% Kenaikan/ Penurunan dari realisasi tahun 2023
			TA 2024	%	TA 2023 AUDITED	
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	157.408.613.305.00	157.408.613.305.00	100.00	286.776.557.722.00	(45.11)
b	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000.00	35.868.696.000.00	100.00	29.131.304.000.00	23.13
	JUMLAH	193.277.309.305.00	193.277.309.305.00	100.00	315.907.861.722.00	(38.82)
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
a	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00		30.000.000.000.00	(100.00)
b	Penyertaan Modal Daerah	4.144.000.000.00	2.469.000.000.00	59.58	14.156.000.000.00	(82.56)
	JUMLAH	4.144.000.000.00	2.469.000.000.00	59.58	44.156.000.000.00	(94.41)
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO	189.133.309.305.00	190.808.309.305.00	100.89	271.751.861.722.00	(29.79)

Sumber Data dari BPPKAD per 31 Januari 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang dikelompokkan dalam 13 (tiga belas) bidang permasalahan:



Tabel 1.8.
Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2024
1	2	3	4
1.	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan	Kualitas Sumber Daya Manusia	Prioritas Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia, diarahkan pada : 1) peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia Prioritas Pendidikan, diarahkan pada : 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan 2) peningkatan mutu pendidikan Prioritas Kepemudaan dan Olah raga, diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
2.	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan		Prioritas Kesehatan, diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat
3.	Masih Tingginya Jumlah PMKS		Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, diarahkan pada: a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin c. menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro d. sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
4.	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah		Prioritas Pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah, diarahkan pada : a. peningkatan ketahanan pangan b. peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata c. peningkatan kinerja UMKM
5.	Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Daya Saing Daerah	Prioritas Lingkungan Hidup, diarahkan pada : peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
6.	Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik		Prioritas Sarana dan prasarana publik, diarahkan pada : a. meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas b. meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan
7.	Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur		



No.	Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah 2024
1	2	3	4
8.	Belum Optimalnya Daya Saing Sosial Ekonomi Daerah		Prioritas Ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana, diarahkan pada : a. meningkatnya pelayanan Keten traman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) b. meningkatnya ketangguhan daerah dalam bencana, dan c. meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan politik masyarakat
9.	Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Prioritas Birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel
10.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi		
11.	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah		
12.	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik		
13.	Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian		

Sumber ; Peraturan Bupati Magelang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD 2024

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera,
Berdaya Saing dan Amanah”
(SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) SEJAHTERA adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spirituil*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) BERDAYA SAING adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) AMANAH adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan. Komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan. Sementara komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi kemasyarakatan maupun pribadi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian, pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olah raga.



Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 dengan uraian program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



- 7) Program Peningkatan Sumber Daya Air
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 10) Program Pengembangan Permukiman
- 11) Program Penataan Bangunan Gedung
- 12) Program Penyelenggaraan Jalan
- 13) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 14) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 15) Program Pengembangan Perumahan
- 16) Program Kawasan Permukiman
- 17) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 18) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
- 19) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 20) Program Penanggulangan Bencana
- 21) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 22) Program Pemberdayaan Sosial
- 23) Program Rehabilitasi Sosial
- 24) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 25) Program Penanganan Bencana
- 26) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 27) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 28) Program Hubungan Industrial
- 29) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 30) Program Perlindungan Perempuan
- 31) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 32) Program Perlindungan Khusus Anak
- 33) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 34) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 35) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 36) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 37) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 38) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)



- 39) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 40) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 41) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal MHA yang Berkaitan dengan PPLH
- 42) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 43) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 44) Program Pengelolaan Persampahan
- 45) Program Pendaftaran Penduduk
- 46) Program Pencatatan Sipil
- 47) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
- 48) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 49) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 50) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 51) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 52) Program Pengendalian penduduk
- 53) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 54) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAAJ) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 55) Program Aplikasi Informatika
- 56) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 57) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- 58) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 59) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 60) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 61) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 62) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 63) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 64) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga
- 65) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



- 66) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 67) Program Pengembangan Kebudayaan Perpustakaan
- 68) Program Pembinaan Perpustakaan
- 69) Program Pengelolaan Arsip
- 70) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 71) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 72) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 73) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 74) Program Pemasaran Pariwisata
- 75) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 76) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 77) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 78) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 79) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 80) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 81) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 82) Program Penyuluhan Pertanian
- 83) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 84) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 85) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 86) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 87) Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
- 88) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 89) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 90) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 91) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 92) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 93) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 94) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 95) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 96) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 97) Program Kepegawaian Daerah
- 98) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah



- 99) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 100) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Asistensi
- 101) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 102) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 103) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 104) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 105) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 106) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
- 107) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
- 108) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 109) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD Kabupaten Magelang dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah. Mendasarkan kerangka pendanaan tahun 2024, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:



Tabel 1.9.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Pendidikan	1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.	Kesehatan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Peningkatan Pelayanan BLUD
		2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4) Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 5) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Peningkatan Sumber Daya Air (SDA)	1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
		7) Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		8) Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		9) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		10) Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		11) Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		12) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Perumahan	1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			4) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 5) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		3) Program Kawasan Permukiman	1) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		6) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
		3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Penanggulangan Bencana	1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
6.	Sosial	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Rehabilitasi Sosial	1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Penanganan Bencana	1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Penempatan Tenaga Kerja	1) Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Hubungan Industrial	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
		5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		2) Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		4) Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.	Pangan	1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
		2) Program Penanganan Kerawanan Pangan	1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
		3) Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4.	Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.	Lingkungan Hidup	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		7) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH	1) Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		9) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		11) Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		3) Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
		4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
		3) Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
		4) Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1) Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
9.	Perhubungan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
10.	Komunikasi dan Informatika	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1) Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		3) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
12.	Penanaman Modal	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 4) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
		4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
14.	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
15.	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
16.	Kebudayaan	1) Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
17.	Perpustakaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pembinaan Perpustakaan	1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18.	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
		3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
		4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2.	Pariwisata	1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
		2) Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Hal Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
		4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			Dasar
3.	Pertanian	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Peraangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
		3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Pengembangan Prasarana Pertanian 2) Pembangunan Prasarana Pertanian 3) Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		5) Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		6) Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
		7) Program Pengendaian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4.	Perdagangan	1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
		2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		3) Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		4) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
5.	Perindustrian	1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		2) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Unsur Pendukung			
1.	Sekretariat Daerah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah 3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Penataan Organisasi
		2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1) Administrasi Tata Pemerintahan 2) Fasilitasi Kerjasama Daerah 3) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 4) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		3) Program Perekonomian dan Pembangunan	1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 3) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 4) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Sekretariat DPRD	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 9) Layanan Administrasi DPRD
		2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			4) Peningkatan Kapasitas DPRD 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7) Fasilitasi Tugas DPRD
Unsur Penunjang			
1.	Perencanaan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2.	Keuangan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Kepegawaian	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
			3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Kepegawaian Daerah	1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2) Mutasi dan Promosi ASN 3) Pengembangan Kompetensi ASN 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
4.	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Unsur Pengawasan			
1.	Inspektorat	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Pengawasan	1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2) Pendampingan dan Asistensi
Unsur Kewilayahan			
1.	Kecamatan	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Program	Kegiatan
1	2	3	4
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Unsur Pemerintahan Umum			
1.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2023, diolah



1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyat, maka penerapan Standar Pelayanan Minimal ditargetkan mencapai 100% setiap tahunnya. Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM urusan Pemerintah wajib mencakup jenis dan mutu Pelayanan Dasar pada bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta bidang urusan Sosial dengan berbagai indikatornya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 merupakan objek kebijakan (regulasi) yang mengatur penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, pencapaian target-target Standar Pelayanan Minimal lebih merupakan kinerja program sektoral, tetapi setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah melalui Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota dan Tim Penerapan SPM Provinsi. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang menyatakan kewenangan Pemerintah Daerah di mana penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator serta batas waktu pencapaian tetapi berdasarkan: (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Namun dalam penerapannya, seringkali pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Daerah belum optimal. Diperlukan komitmen bersama baik dari Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk pencapaian SPM 100%.

**b. Dasar Hukum**

Dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Magelang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pelaksanaan SPM diatur dalam Peraturan Menteri teknis terkait.

Tabel 1.10.
Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal

No.	Urusan Bidang	Dasar Hukum
1.	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
2.	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023. Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat
5.	Trantibumlinmas	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6.	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota



c. Kebijakan Umum

Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM, mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah (lima tahunan) yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), serta jangka pendek (tahunan) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, SPM juga diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran (APBD). Pemerintah daerah melaksanakan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), serta menerapkan SPM sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum, sehingga terwujud pelayanan prima menuju *Good Governance*. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel serta sesuai dengan asas dan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang guna menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Target Indikator SPM diintegrasikan dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD. Target tahunan indikator SPM dituangkan dalam RKPD, Renja PD, KUA PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berikut ini tabel Program Pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2024:

Tabel 1.11.
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024

Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	86,75
				Persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter	100
				Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	67,30
				Persentase PNF	90,91



Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
				Terakreditasi (PKBM)	
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat	95

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2024:

Tabel 1.12.
Program Pembangunan Daerah Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024

Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	94
				Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	81
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100
			Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2024:



Tabel 1.13.

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik	91,82
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum	93,27

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2024:

Tabel 1.14.

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Pengembangan Perumahan	Persentase layanan pengembangan perumahan	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2024:



Tabel 1.15.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024

Misi Ke-2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	100
			Penanggulangan Bencana	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Berikut ini tabel program pembangunan daerah yang mendukung pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial yang telah terintegrasi dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 untuk pelaksanaan tahun 2024:

Tabel 1.16.
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024

Misi Ke-1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS dapat melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	10,1
			Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang divalidasi	NA

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024



Arah kebijakan tahun 2024 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi:

1. Bidang Urusan Pendidikan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.17.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan
Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengaskes pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Pendidikan Formal/kesetaraan
	2. Harapan lama sekolah	Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
	3. Persentase SD/SMP yang terakreditasi minimal B		

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2024 SPM Bidang Urusan Pendidikan sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

Perencanaan Pembangunan Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Bidang Urusan Pendidikan, selain itu pelaksanaan SPM Berdasarkan Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan serta Mekanisme Penganggaran Standar Pelayanan Minimal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Tabel 1.18.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.950.753.829.481
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	865.531.575.072
3.	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	212.401.959.059
	APBD	212.401.959.059
a.	APBD Murni	0
b.	APBD DAU	44.291.369.153
c.	APBD DAK Fisik	29.078.099.000
d.	APBD DAK Non Fisik	139.032.490.906
e.	Dana Bagi Hasil	0
f.	Kerjasama	0
g.	Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
a.	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
a.	APBN-Dekonsentrasi	0
b.	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

2. Bidang Urusan Kesehatan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 1.19.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan
Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
			Meningkatkan ketersediaan farmasi, dan alat kesehatan serta penjaminan kesehatan makanan minuman di masyarakat



Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Meningkatkan Mutu Pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2024 SPM Bidang Urusan Kesehatan sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Kesehatan. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

SPM berfungsi sebagai *instrument* untuk memperkuat pelaksanaan *Performance Based Budgeting* bidang kesehatan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemerintah Daerah untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Ke depannya nanti pengalokasian dan penyaluran DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM, daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK.

Tabel 1.20.

Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	PENDANAAN	PACU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.950.753.829.481
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	278.091.541.209
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	7.625.565.545
	APBD	7.625.565.545
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	947.804.992
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	6.149.700.553
	e. Dana Bagi Hasil	528.060.000
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0



No.	PENDANAAN	PAGU
	a. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

3. Bidang Pekerjaan Umum

Berikut tabel arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.21.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Sarana dan Prasarana Publik	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2024 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat sangat penting. Terlebih, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib tersebut perlu dijadikan prioritas perencanaan maupun penganggaran daerah. Karena itu, pada konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diamanatkan agar Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk memenuhi



pencapaian SPM dan belanja. Hal ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan. Berkaitan pada bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan tersebut meliputi air minum dan limbah.

Tabel 1.22.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang
Tahun 2024

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.950.753.829.481
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	180.637.650.436
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	33.487.557.085
	APBD	27.587.557.085
a.	APBD Murni	1.967.484.085
b.	APBD DAU	0
c.	APBD DAK Fisik	25.620.073.000
d.	APBD DAK Non Fisik	0
e.	Dana Bagi Hasil	0
f.	Kerjasama	0
g.	Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
a.	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
a.	APBN-Dekonsentrasi	0
b.	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	5.900.000.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

4. Bidang Perumahan Rakyat

Berikut tabel arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal.



Tabel 1.23.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dalam Arah Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2024 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

Pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk memprioritaskan perencanaan dan penganggarannya di bidang urusan perumahan rakyat, sebagaimana data tahun 2021 dan 2022 di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), diketahui terjadi peningkatan alokasi anggaran. Hal ini utamanya dalam rangka penerapan SPM.

Tabel 1.24.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Magelang Tahun 2024

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.950.753.829.481
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	10.514.549.105
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	271.743.900
	APBD	271.743.900
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	271.743.900
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0



No.	PENDANAAN	PAGU
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	a. Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	b. APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Berikut ini tabel arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.25.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Trantibumlinmas Dalam
Arah Kebijakan Satpol PP dan PK serta BPBD
Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Ketentraman dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)	Meningkatkan penertiban dan penegakan perda dalam mendukung peningkatan Trantibumlinmas
			Meningkatkan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran
		Meningkatkan ketangguhan daerah menghadapi bencana	Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada tahun 2024 SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Satpol PP dan PK serta BPBD. Hal Ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai



dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

Penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas dilaksanakan dalam beberapa program. Adapun pendanaan bidang urusan trantibumlinmas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.26.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Satpol PP dan PK Serta BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.950.753.829.481
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	0
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	20.682.526.280
	APBD	20.682.526.280
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	20.682.526.280
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
4.	Dana Lainnya (Dana Desa)	0

Sumber: Satpol PP & PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2025

6. Bidang Urusan Sosial

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:



Tabel 1.27.
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial
Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial PPKB PPPA
Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penurunan PMKS	Meningkatkan penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan rehabilitasi sosial
			Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
			Meningkatkan penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
			Meningkatkan pemberdayaan sosial

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2024 SPM Bidang Urusan Sosial sudah terintegrasi dengan arah kebijakan yang ada pada Dinas Sosial PPKB PPPA. Hal ini menggambarkan bahwa SPM sudah sesuai dengan yang ada di dokumen perencanaan perangkat daerah dan RPJMD Kabupaten Magelang.

Penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas dilaksanakan dalam beberapa program. Adapun pendanaan bidang urusan trantibumlinmas dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.28.
Data APBD, Anggaran dan Anggaran SPM pada
Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	PENDANAAN	PAGU
1.	APBD Kabupaten Magelang	2.950.753.829.481
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan)	39.740.629.568
3.	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker Perangkat Daerah	2.414.976.411
	APBD	2.414.976.411
	a. APBD Murni	0
	b. APBD DAU	2.414.976.411
	c. APBD DAK Fisik	0
	d. APBD DAK Non Fisik	0
	e. Dana Bagi Hasil	0
	f. Kerjasama	0
	g. Otonomi Khusus	0
	Non APBD	0



No.	PENDANAAN	PAGU
	Corporate Social Responsibility (CSR)	0
	APBN	0
	a. APBN-Dekonsentrasi	0
	APBN-Tugas Pembantuan	0
	Dana Lainnya	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Tahun 2024 merupakan tahun perencanaan keempat untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang lima tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, fokus pembangunan tahun 2023 adalah “Penguatan Kesejahteraan Melalui Penguatan Kualitas SDM, Infrastruktur yang Berkelanjutan, dan Ekonomi yang Berdaya Saing”, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas daya saing kepemudaan;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. meningkatkan pemberdayaan sosial;
- d. mengembangkan sistem dan produk pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- e. meningkatkan pengembangan produk yang berdaya saing;
- f. meningkatkan akses informasi pasar kerja dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/produktif;
- g. meningkatkan atraksi, amenitas dan aksesibilitas destinasi pariwisata;
- h. meningkatkan penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. meningkatkan kualitas infrastruktur jalan;
- j. meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Permasalahan penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 meliputi:

1. Bidang Urusan Pendidikan



- a. Belum optimalnya partisipasi pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%.
- b. Belum optimalnya mutu pendidikan, salah satunya dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV.
2. Bidang Urusan Kesehatan
 - a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kualitas lembaga pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan rumah sakit. Hal ini bisa dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita; mutu FKT/FKTL/Laboratorium yang perlu ditingkatkan;
 - b. masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
 - c. belum terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat;
 - d. belum terpenuhinya sumber daya kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Di samping kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun, konsep pengembangan wilayah yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum maupun infrastruktur perhubungan; menjadi penyebab belum optimalnya cakupan dan layanan infrastruktur;
 - b. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang disebabkan oleh permasalahan salah satunya karena belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi air limbah domestik yang disebabkan target *Universal Access* 100 O 100 belum dapat diwujudkan.
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah belum optimalnya layanan hunian yang layak dan berkualitas. Layak dan berkualitasnya sebuah hunian diukur mulai dari kondisi lingkungan yang paling kecil, yaitu dari rumah/bangunan tempat



tinggal, perumahan, permukiman, lingkungan hunian sampai dengan kawasan permukiman.

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Permasalahan pokok yang harus ditangani dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah belum optimalnya:

- a. Penegakan hukum;
- b. Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana; dan
- c. Wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan komprehensif dan multi dimensi, memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat,
- c. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

6. Bidang Urusan Sosial

Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini bisa dilihat dari cakupan penanganan PMKS yang masih rendah.

BAB II **CAPAIAN KINERJA** **PENYELENGGARAAN** **PEMERINTAHAN DAERAH**

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*). Capaian kinerja makro di Kabupaten Magelang tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan/Unit	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Manusia		71.56	72.1	0.755
2.	Angka Kemiskinan	%	10.96	10.83	-1.186
3.	Angka Pengangguran	%	4.42	3.55	-19.683
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.04	5.06	0.397
5.	Pendapatan per Kapita	Juta rupiah	30.57	32.6	6.64
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		0.358	0.333	-6.983

Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2025

Berbagai upaya dan program telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Upaya-upaya itu telah memperlihatkan hasil menggembirakan di tengah masyarakat. Hasilnya dilihat dari sejumlah indikator-indikator makro. Di antaranya kenaikan IPM Kabupaten Magelang naik dari angka 71,56 di tahun 2023 ke angka 72,1 di tahun 204. Selain itu angka kemiskinan turun dari 10,96 persen di tahun 2023 menjadi 10,83 persen di tahun 2024. Indikator lain yaitu angka pengangguran turun dari 4,42 persen pada tahun 2023 menjadi 3,55 persen tahun 2024.



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87,67 %	DISDIKBUD DISDUKCAPIL	Masih ada anak yang tidak masuk ke satuan pendidikan TK
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	90,35%	DISDIKBUD DISDUKCAPIL	Banyak warga Kabupaten Magelang masuk ke pesantren yang belum ada lembaga pendidikan formal maupun non formal
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	78,62%	DISDIKBUD DISDUKCAPIL	Masih banyaknya anak lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan adanya anak Drop Out
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	DISDIKBUD	Masyarakat masih banyak yang tidak sekolah (ATS)
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,58%	DINKES DISDUKCAPIL	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	71,43%	DINKES	2 Rumah Sakit Baru di Kabupaten Magelang yang ijin Operasional untuk RS Candi Umbul per 28 Juni 2024 dan RS Bukit Menoreh Tanggal 18 Desember Tahun 2023
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,41%	DINKES	Ibu Hamil pada bulan desember masih Belum saatnya K4



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96,22%	DINKES	Persalinan yang ke 4 dan seterusnya bisa menyebabkan proses persalinan cepat sehingga belum sampai fasyankes, persalinan mundur dari perkiraan persalinan, ibu hamil yang belum masanya bersalin
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,11%	DINKES	Data yang dihimpun Dinas Kesehatan berdasarkan sebaran sekolah di wilayah kerja Puskesmas bukan berdasar domisili siswa usia Dasar, Adanya kelompok penolak imunisasi
				DISDUKCAPIL	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	74,78%	DINKES	Sasaran usia produktif lebih banyak tidakberada di lokasi domisili saat jam kerjaPuskesmas atau saat dilakukannya skriningPenyakit Tidak Menular (PTM)
				DISDUKCAPIL	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,31%	DINKES	Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas sehingga Lansia yang tidak mandiri (Kategori ketergantungan dan perlu bantuan) sehingga tidak bisa dilakukan kunjungan rumah untuk skrining kesehatan sesuai standar. sedangkan untuk datang sendiri ke po
				DISDUKCAPIL	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	DINKES	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	98,32%	DINKES	Sulitnya menjangkau populasi kunci (LSL, WPS, Waria)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0%	DPUPR	Tidak terdapat kawasan tersebut di Kabupaten Magelang
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	0%	DPUPR	Tidak terdapat kawasan tersebut di kabupaten Magelang
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	6,87%	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	94,34%	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,28%	DPUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten	100%	DPUPR	
		Tingkat kemantapan jalan	86,91%	DPUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	29,75%	DPUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	DPRKP	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	DPRKP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	2,51%	DPRKP	Disesuaikan dengan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Tahun 2024
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,19%	DPRKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	DPRKP	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP dan PK	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80,95%	SATPOL PP dan PK	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	99,69%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	92,35%	SATPOL PP dan PK	
		Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	11,19 menit	SATPOL PP dan PK	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS PPKB PPPA	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	DINSOS PPKB PPPA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DISPERINNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,27%	DISPERINNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	28,07%	DISPERINNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1,10%	DISPERINNAKER	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	41,33%	DISPERINNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	25,46%	DINSOS PPKB PPPA	
				BPPKAD	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	100%	DINSOS PPKB PPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	8,83	DINSOS PPKB PPPA DISDUKCAPIL	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	25,8	DISTAN PANGAN	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	80,69%	DPMPSTP	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0%	DPUPR	Terjadi penolakan warga di calon lokasi pengadaan tanah IPLT meskipun sudah dilakukan langkah - langkah pendekatan antara lain audiensi dengan warga yang menolak pembangunan IPLT dari bulan Oktober - Desember 2024 dengan Bapak Pj. Bupati dan Dinas terkait. Serta Mengajak warga yang menolak IPLT untuk study referensi menuju IPLT Sleman pada Oktober 2024.
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPUPR	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	DPUPR	Pada tahun 2024 tidak ada penanganan urusan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	DPUPR	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	DPUPR	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	69,4	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	63,63%	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	61,43%	DLH	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99,78%	DISDUKCAPIL	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	76,84%	DISDUKCAPIL	
		Kepemilikan Akta Kelahiran	98,34%	DISDUKCAPIL	Data agregat dari pusat bahwa Kepemilikan Akta Kelahiran adalah Anak usia 0-17 tahun
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	81,25%	DISDUKCAPIL BAGIAN ORGANISASI	Proses ijin kerjasama dari pusat lama, adanya persyaratan PD yang bekerjasama harus ber ISO
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DISPERMADES	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	15,24%	DISPERMADES	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,03	DNSOS PPKB PPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	74,48%	DINSOS PPKB PPPA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,28%	DINSOS PPKB PPPA	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten	0,64%	DISHUB	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0,15	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DISKOMINFO	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%	DISKOMINFO DISDUKCAPIL	
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	96,98%	DISDAGKOP UKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	96,38%		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	10,88%	DPMPSTP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,01%	DISPARPORA DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	17,05%	DISPARPORA DISDUKCAPIL	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Peningkatan prestasi olahraga	9	DISPARPORA	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	55,32%	DISKOMINFO	
				BAGIAN ORGANISASI	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	55,32%	DISKOMINFO	
				BAGIAN ORGANISASI	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	83,72%	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya	48,5%	DISDIKBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	78,1%	DISPUSPA	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	88,19%	DISPUSPA	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	77,57%	DISPUSPA	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	66,67%	DISPUSPA	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	100,01%	DISPETERIKAN	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	17,38%	DISPARPORA	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	4,42%	DISPARPORA	
		Tingkat hunian akomodasi	49,88%	DISPARPORA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,54%	BAPPEDA dan LITBANGDA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10,3%	BPPKAD	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	791,69	DISTAN PANGAN	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-23,95%	DISPETERIKAN	
28	Kehutanan		100	DPUPR	Kewenangan provinsi
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0	DPUPR	Kewenangan provinsi
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DPMPPTSP	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	48,51%	DISTAN PANGAN	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	36,01%	DISDAGKOP UKM	
31.	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	0%	DISPERINNAKER	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	175,1%	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DISPERINNAKER	Tidak ada izin perluasan industri
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	DISPERINNAKER	Tidak ada izin perluasan industri
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang	0%	DISPERINNAKER	Tidak ada/memiliki kawasan industri



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		lokasinya di Daerah Kabupaten			
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DISPERINNAKER	
32	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	0%	DISPERINNAKER	Tidak ada kawasan transmigrasi di Kabupaten Magelang

Sumber: elppd.kemendagri.go.id, Data per 20 Maret 2025

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 5 (lima) Urusan Pemerintahan.

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Penunjang Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,84%	BPPKAD	
		Rasio PAD	18,73%	BPPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) Intern	3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan (dikurangi expenditures)	60,19%	BPPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	8	INSPEKTORAT	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	84,21%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	Kemampuan dan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK masih kurang dan ketidaktertiban dalam pengadministrasian pengadaan barang dan jasa yang masih rendah
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	33,21%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	Perencanaan anggaran belanja masih kurang dalam menghitung kebutuhan
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	54,03%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	Penyedia produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi masih terbatas dan anggaran masih belum menyesuaikan dengan harga produk yang jauh lebih mahal dari produk non TKDN dan PDN
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	64,71%	BKPPD	
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	33,93%	BKPPD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,14%	BKPPD	



No.	Urusan Penunjang Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	Manajemen Keuangan	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,59%	BPPKAD	
		<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	13,46%	BPPKAD	
		<i>Assets management</i>	4%	BPPKAD	
		<i>Cash Management:</i> Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,42%	BPPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	99,47%	BPPKAD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100%	BPPKAD	

Sumber: elppd.kemendagri.go.id, Data per 20 Maret 2025

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 ini.

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan dibandingkan dengan realisasi kinerja. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator, dan dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD.

Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (Indikator Positif)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



- **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{(\text{Indikator Negatif})} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.4.
Interval Nilai, Predikat Penilaian dan Kode Warna

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2024 dilakukan analisis dengan dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dan target kinerja tahun 2024 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2024, hasil analisis sebagai berikut:



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Pada Indikator Tujuan

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024/akhir RPJMD			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
2	3	4	5	6	7	9	11	9	10	13
MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,87	69,98	70,12	70,96	71,56	71,42	72,1	100,95
2	Inflasi ^{**})	persen	2,12	1,90	2,18	6,49	2,61	2,0-4,0	1,51	162,25
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493	9.883,06	10.926	110,55
4	Angka Kemiskinan ^{**})	persen	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96	10,07-9,32	10,83	92,45
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	91,78	91,81	91,89	92,91	92,21	92,99	92,21	99,16 ^{*)}
MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,3	-1,67	3,48	5,46	5,04	3,6-4,6	5,06	140,56
7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,18	25,01	26,18	28,53	30,57	29,52	32,6	110,43
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,3	66,6	67,57	71,93	71,93	82,21	82,76	100,67
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah										
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	63,82	61,07	61,48	62,29	67,42	72,39	78,94	109,05
Rata-rata Capaian Kinerja :									114,01	

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2025

Keterangan : ^{*)} Capaian mengacu tahun sebelumnya (2022) karena data belum keluar/tidak ada.

^{**}) Indikator Negatif



Berdasarkan tabel di atas dalam capaian rata-rata kinerja tujuan pada indikator makro Kepala Daerah tahun 2024 tahun terakhir RPJMD telah tercapai sebesar **114,01%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024. Secara umum hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan Kepala Daerah Kabupaten Magelang terhadap target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis telah tercapai.

Secara umum capaian kinerja tujuan Kepala Daerah Kabupaten Magelang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023. Dari 5 Tujuan dengan 9 indikator, 8 indikator telah mencapai target. Demikian juga dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan dengan capaian 91,35% dengan kriteria **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian kinerja pada indikator makro Kepala Daerah pada tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan dengan rincian: dari 2020 (85,02%) mengalami kenaikan sebesar 6,19%, dari tahun 2021 (83,20%) mengalami kenaikan sebesar 8,01% dan dari tahun 2022 (83,20%) mengalami kenaikan sebesar 11,1%. Walaupun kinerja pada tahun 2021 mengalami penurunan capaian kinerja tetapi pada tahun 2022 terkoreksi dan mengalami kenaikan yang signifikan.

Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2024 pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut;



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 pada Indikator Sasaran

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024/akhir RPJMD			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
2	3	4	5	6	7	9	11	9	10	13
MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82	8,22	7,83	95,26
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61	12,66	12,62	99,68
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,87	93,1	92,67	92,35	92,03	95,56	91,63	95,89
4	Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,72	73,88	74,03	74,44	74,22	74,68	100,62
5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,63	0,62	0,57	0,57	0,58	1,15	198,28
6	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	77,37	81,27	79,92	79,44	79,44	82,62	80,2	97,07
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) **)	persen	3,00	4,27	5,03	4,97	4,42	2,25-2,65	3,55	66,04
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	67,74	69,65	69,64	69,66	92,21	70,53	92,21	130,74
9	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00
MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (1-100)	71,18	71,30	71,41	70,48	65,80	71,38	69,40	97,23
11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61,43	61,9	63,72	73,38	82,78	93,05	96,11	103,29
12	Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.455,80	4.306,14	4.667,15	4.967,87	5.381,88	6.227,11	5.637,40	90,53
13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.747,26	6.914,81	7.086,93	7.486,55	7.913,20	8.875,03	8.341,93	93,99
14	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.138,49	7.266,33	7.794,55	8.628,27	9.633,01	9.613,39	10.697,97	111,28
15	Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.379,38	1.274,04	1.366,00	1.675,34	1.675,34	1.951,00	1.675,34	85,87
16	Pertumbuhan Investasi	persen	7,53	13,49	12,56	32,21	31,95	10,00	10,88	108,80
17	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	98,8	104,93	84,46	82,78	82,78	87,76	99,52	113,40
18	Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	-	0,68	0,635	0,71	0,70	0,72	0,735	102,08



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024/akhir RPJMD			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
2	3	4	5	6	7	9	11	9	10	13
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Amanah										
19	Nilai AKIP	-	60,10	60,33	61,13	62,25	63,04	65,02	63,57	92,13
20	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka (0-5)	2,19-2,30	2,94	2,67	3,13	3,13	3,41-3,6	3,92	108,89
21	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,74	83,69 (Baik)	84,22 (Baik)	84,36 (Baik)	84,78	86,00	86,99	102,04
23	Indeks Sistem Merit	-	0,49	0,60	0,64	0,64	0,71	0,76	0,71	93,42
Rata-rata Capaian Kinerja :										103,76

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2025

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2023) karena data belum keluar/tidak ada.

**) Indikator Negatif



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2024 dibandingkan target akhir RPJMD pada tahun 2024, telah tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **103,76%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Rekapitulasi distribusi kriteria penilaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7.

Capaian Kriteria Penilaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 pada Indikator Sasaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator dan Persentase capaian terhadap target
			2024
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	20 (86,97)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	2 (8,7)
3	66% ≤ 75%	Sedang	1 (4,35)
4	51% ≤ 65%	Rendah	0 (0,00)
5	≤ 50%	Sangat Rendah	0 (0,00)
Jumlah Indikator:			23

Sumber: Perangkat Daerah terkait data diolah, tahun 2025.

Dari 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran terdapat 20 (dua puluh) indikator yang berpredikat **Sangat tinggi**, 2 indikator berpredikat Tinggi yaitu Nilai PDRB Perdagangan dan Nilai PDRB Pariwisata dan 1 (satu) indikator sasaran berpredikat **Sedang** yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Jika dilihat dari 3 (tiga) indikator tersebut adalah adanya keterkaitan antar indikator yang mencerminkan bahwa perekonomian belum sepenuhnya pulih.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis diperlukan anggaran untuk menunjang pencapaian target kinerja, jumlah anggaran dan realisasi per program dalam menunjang tercapainya target kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2024 secara detail pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8.

Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
a	Program Pengelolaan Pendidikan	188.520.647.035	184.073.442.004,00	97,64



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
b	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	23.881.312.024	21.926.744.215,00	91,82
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
a	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	208.971.068.968	199.478.182.691,00	95,46
b	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.726.135.229	1.662.013.010,00	96,29
c	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	375.494.000	346.728.036,00	92,34
d	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.197.474.854	2.133.463.651,00	97,09
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
a	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.562.995.599	6.368.764.703,00	97,04
b	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.285.747.503	17.256.938.498,00	99,83
c	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.154.097.897	1.626.703.760,00	75,52
d	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18.585.428.148	10.300.699.677,00	55,42
e	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	30.000.000	30.000.000,00	100,00
f	Program Penataan Bangunan Gedung	16.814.306.272	16.575.416.460,00	98,58
g	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	629.720.502	623.341.560,00	98,99
h	Program Penyelenggaraan Jalan	98.888.430.970	94.858.518.677,00	95,92
i	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	385.356.500	378.818.693,00	98,30
j	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	227.735.909	187.629.229,00	82,39
k	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	46.948.717	41.369.104,00	88,12
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
a	Program Pengembangan Perumahan	340.301.745	189.779.900,00	55,77
b	Program Kawasan Permukiman	27.600.000	23.828.166,00	86,33
c	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.809.880.000	4.311.665.302,00	89,64
d	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	213.395.134	89.886.195,00	42,12
e	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.075.000	4.131.880,00	18,72
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
a	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.558.891.880	5.402.683.089,00	97,19



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
b	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.083.940.200	7.926.174.374,00	98,05
c	Program Penanggulangan Bencana	2.056.343.500	1.967.701.192,00	95,69
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			
a	Program Pemberdayaan Sosial	419.849.537	411.544.919,00	98,02
b	Program Rehabilitasi Sosial	1.922.518.411	1.775.013.663,00	92,33
c	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.983.546.599	8.867.635.286,00	98,71
d	Program Penanganan Bencana	574.458.000	561.015.770,00	97,66
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
a	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.652.035.024	1.515.057.434,00	91,71
b	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.978.473.821	1.450.646.516,00	73,32
c	Program Hubungan Industrial	298.450.000	286.342.944,00	95,94
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
a	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	268.905.210	265.039.882,00	98,56
b	Program Perlindungan Perempuan	259.415.000	239.284.379,00	92,24
c	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	295.481.802	295.238.351,00	99,92
d	Program Perlindungan Khusus Anak	261.815.000	260.269.982,00	99,41
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
a	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.036.394.065	1.017.985.683,00	98,22
b	Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.385.000	43.184.405,00	97,30
c	Program Pengawasan Keamanan Pangan	119.550.000	117.276.190,00	98,10
4	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
a	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	49.560.000	49.162.668,00	99,20
b	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	551.389.920	549.132.313,00	99,59
c	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.687.861.000	2.614.103.771,00	97,26
d	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	274.545.000	254.923.588,00	92,85
f	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	68.970.000	68.682.864,00	99,58
g	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPPLH	167.307.121	166.258.536,00	99,37
h	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	70.528.500	69.175.510,00	98,08



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
i	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	51.740.000	51.609.818,00	99,75
j	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.125.000	24.961.245,00	99,35
k	Program Pengelolaan Persampahan	14.198.530.500	13.116.725.461,00	92,38
5	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
a	Program Pendaftaran Penduduk	756.600.000	753.407.694,00	99,58
b	Program Pencatatan Sipil	587.153.713	584.387.604,00	99,53
c	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	617.879.912	617.628.591,00	99,96
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
a	Program Penataan Desa	322.438.800	307.423.429,00	95,34
b	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.046.420.653	5.955.320.936,00	98,49
c	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.927.550.902	4.810.706.335,00	97,74
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
a	Program Pengendalian Penduduk	612.322.118	610.104.357,00	99,64
b	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.574.108.200	11.134.443.088,00	96,20
c	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.906.876.981	6.904.889.211,00	99,97
8	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
a	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28.429.750.913	28.334.267.778,00	99,66
9	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
a	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.881.168.482	1.836.603.894,00	97,63
b	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.264.737.414	7.237.388.674,00	99,62
10	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
a	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	56.255.000	55.391.777,00	98,47
b	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	317.155.500	308.558.225,00	97,29
c	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	846.477.500	834.475.371,00	98,58
11	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.125.000	37.631.500,00	98,71
b	Program Promosi Penanaman Modal	23.409.510	18.860.160,00	80,57
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	361.265.623	358.342.922,00	99,19
d	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	715.675.620	633.314.640,00	88,49
e	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.516.000	25.097.465,00	98,36
12	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
a	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	559.050.000	507.761.654,00	90,83
b	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.870.985.164	14.418.757.867,00	96,96
c	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000,00	100,00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	77.153.460	76.698.685,00	99,41
14	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	911.921.466	898.089.763,00	98,48
15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
a	Program Pengembangan Kebudayaan	344.775.000	344.774.884,00	100,00
b	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.759.075.528	2.366.700.864,00	85,78
c	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	479.050.000	438.452.815,00	91,53
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			
a	Program Pembinaan Perpustakaan	600.546.706	593.504.580,00	98,83
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			
a	Program Pengelolaan Arsip	172.840.068	172.051.565,00	99,54
III	Urusan Pemerintahan Pilihan			
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan			
a	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	805.583.780	758.586.051,00	94,17
b	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	34.737.740	34.589.787,00	99,57
c	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	420.709.314	420.045.437,00	99,84
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			
a	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.799.504.695	8.630.099.523,00	98,07
b	Program Pemasaran Pariwisata	430.833.227	430.565.174,00	99,94
c	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	8.000.000	7.896.790,00	98,71



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
d	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.285.570.129	1.199.141.228,00	93,28
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			
a	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.855.276.440	4.706.237.917,00	96,93
b	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.192.798.808	10.465.063.849,00	93,50
c	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.278.428.801	1.183.433.397,00	92,57
d	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	427.517.748	420.830.360,00	98,44
e	Program Perizinan Usaha Pertanian	37.389.765	37.261.291,00	99,66
f	Program Penyuluhan Pertanian	1.421.960.688	1.238.818.419,00	87,12
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
a	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.263.559.498	4.856.321.270,00	92,26
b	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.098.250.903	1.086.529.960,00	98,93
c	Program Pengembangan Ekspor	437.845.000	432.835.968,00	98,86
d	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.154.132	135.034.643,00	99,91
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
a	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	885.800.000	829.195.139,00	93,61
b	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.521.000	34.061.895,00	98,67
6	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			
a	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.435.143.095	18.523.615.350,00	95,31
b	Program Perekonomian Dan Pembangunan	676.183.498	655.729.291,00	96,98
c	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.252.498.692	21.221.366.146,00	65,80
7	Urusan Transmigrasi			
a	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	113.000.000	94.176.215,00	83,34
8	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.400.196.463.972	1.120.854.710.679,00	80,05
b	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	516.602.705	514.472.424,00	99,59
c	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	881.854.275	875.145.081,00	99,24
d	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	679.310.099.466	660.233.087.522,00	97,19
e	Program Kepegawaian Daerah	3.579.512.141	3.370.989.250,00	94,17
f	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	807.384.082	799.952.986,00	99,08
g	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.427.988.633	4.000.368.810,00	90,34



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

NO	Urusan/Unsur/Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
h	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.959.288.924	7.996.655.189,00	80,29
9	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			
a	Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000	705.468.265,00	76,42
b	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.287.694.459	2.106.263.890,00	92,07
10	Unsur Kewilayahan			
a	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	647.792.793	623.867.014,00	96,31
b	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.496.891.178	6.341.279.734,00	97,60
c	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	592.516.189	584.688.168,00	98,68
d	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	588.505.260	553.069.842,00	93,98
e	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	40.320.714	37.689.534,00	93,47
11	Unsur Pemerintahan Umum			
a	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.207.282.500	1.117.900.630,00	92,60
b	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.837.743.108	50.827.330.960,00	99,98
c	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	204.651.000	193.880.740,00	94,74
d	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	175.363.000	170.767.400,00	97,38
e	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	929.722.210	907.411.237,00	97,60
Jumlah:		2.993.983.568.891	2.643.546.366.027	88,30

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magelang, data realisasi keuangan diolah kondisi Februari 2025, *unaudited*, 2025

Keterangan ; *) Tidak termasuk kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2024 mencapai rata-rata **88,30%** dengan kategori **Tinggi**. Secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.9.
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	2	3	4
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	104 (85,25%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	11 (9,02%)
3	66% ≤ 75%	Sedang	2 (1,64%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	3 (2,46%)
5	≤ 50%	Sangat Rendah	2 (1,64%)
Jumlah Program:			122

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2025, data diolah

Berdasarkan tabel di atas Realisasi Anggaran Per Program pada tahun 2024 terbanyak pada kriteria sangat tinggi (91% ≤ 100%) yaitu 101 program (82,79%), Kriteria Tinggi sebanyak 15 program (12,30%), Kriteria Sedang 2 program (1,64%), Kriteria Rendah sebanyak 2 program (1,64%) dan kriteria Sangat Rendah (≤ 50%) sebanyak 2 program (1,64%) .

b. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2024, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2024 terhadap indikator makro berjumlah 5 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja. Selain indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 15 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2024 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LPPD pada pembahasan ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun V (kelima) dari RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024.

Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2024 masih terdapat penggunaan data sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik atau lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.



1) Evaluasi Tujuan Strategis

i) Tujuan Strategis: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024			Ket	
				2020	2021	2022	2023	Target	Capaian		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka (0-100)	69,87	69,98	70,12	70,96	71,56	71,42	72,1	100,95	
Rata-rata Capaian Kinerja :										100,95	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 2.11.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang
Menurut Dimensi Penyusunannya Tahun 2020-2024

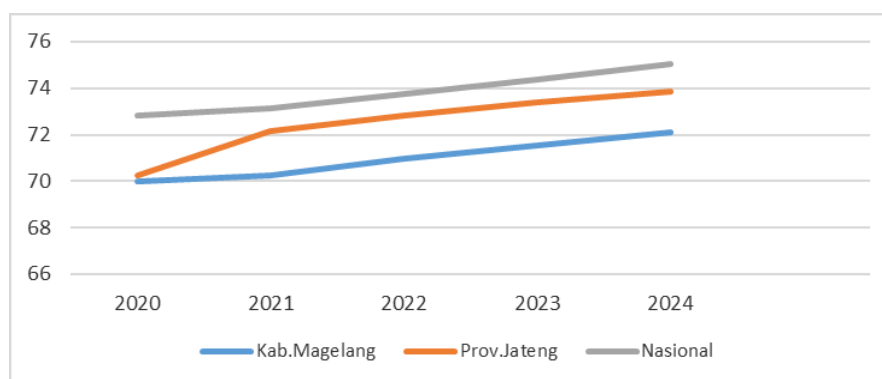
Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,97	74,13	74.28	74,44	74,68
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,55	12,58	12,61	12,62
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,78	7,79	7,81	7,82	7,83
Standar Hidup Layak						
Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuaikan)	Ribu Rp	9.301	9.440	10.011	10.493	10.926

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia tahun 2024 sebesar 72,1 (100,95%) dibandingkan target akhir RPJMD. Capaian kinerja IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,87 dan capaian Nasional sebesar 75,02.

Gambar 2.1.
Grafik Perbandingan IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024



*) data sementara

Sumber : Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025

Keterangan : Realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2009 menggunakan perhitungan metode lama, sementara realisasi tahun 2010-2024 menggunakan perhitungan metode baru

Tabel 2.12.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang, dengan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Purworejo	72,68	72,98	73,60	74,35	75,16
2	Kabupaten Wonosobo	68,22	68,43	68,89	70,18	70,63
3	Kabupaten Magelang	69,87	70,12	70,85	71,56	72,10
4	Kabupaten Temanggung	69,57	69,88	70,77	71,33	71,86
5	Kota Magelang	78,99	79,43	80,39	81,17	82,15

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang pada tahun 2024 berada di urutan ketiga dibawah Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebesar Rp228.732.540.929,00 dengan realisasi sebesar Rp221.820.210.320,00 (96,98%)

Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
6. Program Pembinaan Perpustakaan
7. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
9. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

ii) Tujuan Strategis: Meningkatkan Paritas Daya Beli Masyarakat

Pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat diukur dalam 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: Inflasi, Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dan Angka Kemiskinan. Berikut capaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat:



Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024				Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Inflasi **)	persen	2,12	1,9	2,18	6,49	2,61	2,0-4,0	1,51	162,25	
2 Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.387,00	9.301	9.440	10.011	10.493	9.883,06	10.926	110,55	
3 Angka Kemiskinan *)	persen	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96	10,07-9,32	10,83	92,45	
Rata-rata Capaian Kinerja :									121,75	

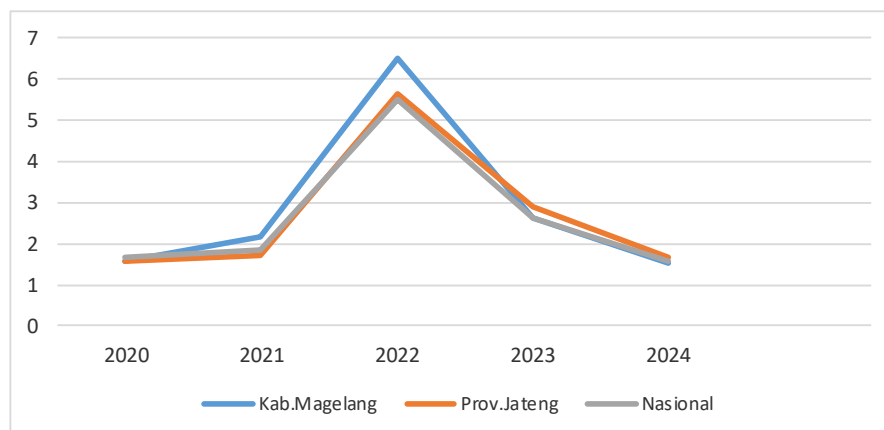
Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2025
Keterangan ; *)Mengacu data tahun sebelumnya
**)Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat pada tahun 2024 sebesar 121,75% (Sangat Tinggi) terhadap akhir RPJMD tahun 2024. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro daerah yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi dapat mengindikasikan ketidakseimbangan perekonomian di suatu wilayah. Inflasi dapat memberikan dampak buruk dalam hal pemerataan kesejahteraan dan pendapatan. Semakin tingginya nilai inflasi, maka nilai mata uang akan semakin rendah dan semakin rendah pula daya beli masyarakat.

Berdasarkan Indikator Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2021 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Magelang menyatakan bahwa Kabupaten Magelang masuk ke dalam wilayah yang tidak terpilih menjadi sampel Survei Biaya Hidup (SBH), sehingga dalam penghitungan IHK di Kabupaten ini menggunakan pendekatan metode *sister city*. Pendekatan yang dimaksud tersebut adalah menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama, memiliki letak geografis yang berdekatan, serta besaran PDRB dan jumlah penduduk yang bersesuaian. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka ditetapkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki kemiripan pola konsumsi dengan Kabupaten Banyumas/Purwokerto.



Gambar 2.2.
Grafik Perbandingan Inflasi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Tahun 2025

Keterangan ; Pada tahun 2020-2024 BPS Kabupaten Magelang sudah tidak bisa menghitung indikator Inflasi, karena bukan kota/kab SBH, sehingga tingkat Inflasi Kabupaten Magelang menggunakan besaran tingkat Inflasi Kabupaten Banyumas/Purwokerto

Pada tahun 2024, laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 1,51 (mengacu Kota Purwokerto). Angka ini lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,67 dan Nasional sebesar 1,57. Keberhasilan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengendalikan inflasi pada level satu digit menunjukkan fluktuasi harga barang dan jasa tahun 2024 masih dapat dikendalikan. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD laju inflasi Kabupaten Magelang di luar range yang ditargetkan yaitu 2,5 – 4.

Tabel 2.14.
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Magelang	9.301	9.440	10.011	10.493	10.926
Provinsi Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276
Nasional	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dilihat dari tabel diatas Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan Kabupaten Magelang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan



Nasional, namun selama tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat 17,47% dengan rata rata 4,12%.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh Pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk melihat capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15.
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang
Tahun 2020-2024

Indikator Kemiskinan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	342.430	353.608	377.497	411.129	431,289
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	146,340	154,910	145,33	144,490	143,80
Persentase Penduduk Miskin	(%)	11,27	11,91	11,09	10,96	10,83
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,2	0,35	0,41	0,41	0,23
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	1,23	1,63	1,66	1,73	1,23

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

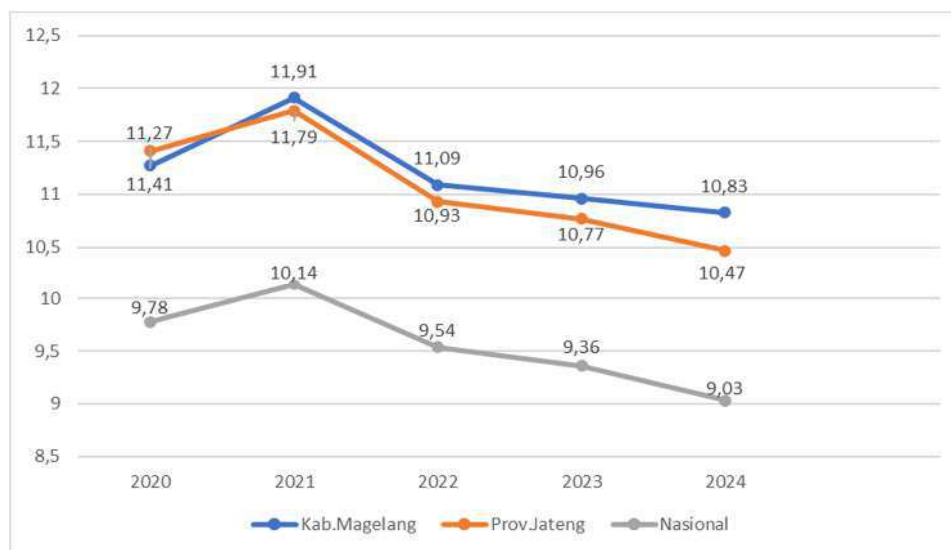
Dari tabel di atas menunjukkan presentase penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2024 ini sejalan dengan penurunan di level nasional dan provinsi. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Propinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang Periode Maret 2024 masih berada di atas Propinsi (10,77%) dan Nasional (9,36%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 sebanyak 143.800 orang, turun 690 orang terhadap tahun 2023 yang tercatat sebanyak 144.490 orang. Garis kemiskinan pada tahun 2024 sebesar Rp431.289,- per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp6.184,- dibanding tahun 2023 sebesar Rp425.105,-.



Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2024 sebesar 1,23, mengalami penurunan sebesar 0,50 poin dibanding tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,23, mengalami penurunan sebesar tahun 2023 sebesar 0,18.

Gambar 2.3.
Perbandingan Presentase Angka Penduduk Miskin Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

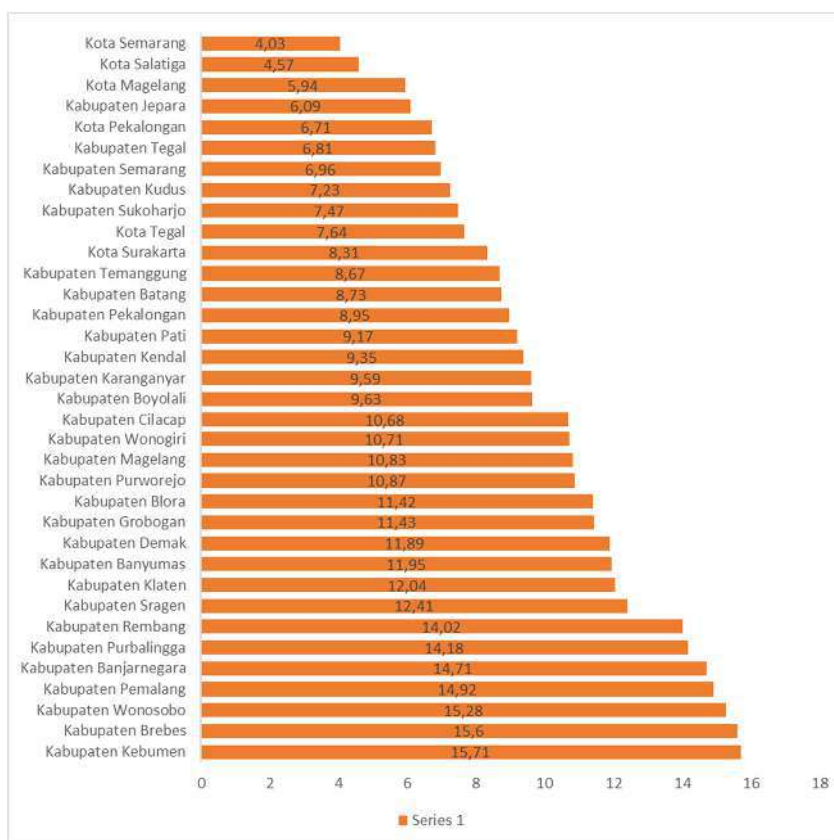


Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Dibandingkan dengan capaian 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang pada tahun 2024 berada pada posisi 21 (Dua puluh satu). Selengkapnya bisa dilihat pada grafik dibawah:



Gambar 2.4.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Tabel 2.16.
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Eks Karesidenan
Kedu Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	P0	P1	P2	GK
1	2	4	5	6	7
1	Kota Magelang	5,94	0,92	0,19	471.824
2	Kab Magelang	10,83	1,23	0,23	431.289
3	Kab Temanggung	8,67	0,97	0,18	416.086
4	Kab Kebumen	15,71	2,35	0,48	471.824
5	Kab Purworejo	10,87	1,08	0,18	459.253
6	Kab Wonosobo	15,28	2,41	0,60	456.351

Sumber: BPS Kab Magelang, Berita Resmi Statistik Kemiskinan Tahun 2025

Di wilayah Eks Keresidenan Kedu, Kota Magelang memiliki persentase penduduk miskin terendah sebesar 5,94 persen, dilanjutkan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang berturut-turut sebesar 8,67 persen dan 10,83 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin tertinggi berada di



Kabupaten Kebumen, yaitu sebesar 15,71 persen, lebih dari dua kali lipat persentase penduduk miskin di Kota Magelang. Jika dilihat dari dimensi lainnya, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan tertinggi adalah Kabupaten Kebumen, diikuti oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan terendah adalah Kota Magelang. Untuk garis kemiskinan Kabupaten Magelang menempati urutan dua terendah, yaitu sebesar 431.289,00. Garis kemiskinan tertinggi adalah Kota Magelang sedangkan garis kemiskinan terendah adalah Kabupaten Temanggung. Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat sebesar Rp17.064.181.457,00 dengan realisasi Rp16.079.764.705,00 (94,23). Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat, terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
6. Program Penanganan Kerawanan Pangan
7. Program Pengawasan Keamanan Pangan
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
9. Program Penempatan Tenaga Kerja
10. Program Hubungan Industrial
11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

iii) Tujuan Strategis: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Gender

Pada tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender diukur dengan indikator kinerja tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indikator tujuan ini didukung oleh Indikator Sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Kategori Kabupaten Layak Anak. Capaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender sebagai berikut:

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatkan
Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka (0-100)	91,78	91,81	91,89	92,91	92,21	92,99	92,21	99,36	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :									99,36	

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2024

Keterangan : *) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2023) karena data belum keluar



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender pada tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 dengan capaian sebesar 99,36% (Sangat Tinggi). Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara eksplisit telah mengamatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan ketiga pada misi pertama RPJMD Kabupaten Magelang adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Sasaran meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori Kabupaten layak anak. Adapun Arah Kebijakannya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga

Tabel 2.18.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kabupaten Magelang	92,91	91,81	91,89	92,21	92,91
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	93,31
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	92,29

Sumber : BPS Kab. Magelang, 2024

Keterangan:*) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2023) karena data belum keluar

Dari tabel diatas,diketahui bahwa IPG kabupaten Magelang tahun 2023 berada dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional.

Kabupaten Magelang kedepan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan,



khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (Gender Analysis Pathway)/ PROBA dan GBS (Gender Budget Statement) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA).



Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender sebesar Rp20.178.924.311,00 dengan realisasi Rp19.709.269.250,00 (97,67%). Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender, terdiri dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
7. Program Perlindungan Khusus Anak

iv) Tujuan Strategis: Meningkatkan Daya Saing Daerah

Pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan cakupan infrastruktur wilayah berkelanjutan. Capaian tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah sebagai berikut:

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis
Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,3	-1,67	3,48	5,46	5,04	3,6-4,6	5,06	140,56	
2 PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,18	25,01	26,18	28,53	30,57	29,52	32,6	110,43	
3 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,3	66,6	67,57	71,93	71,93	82,22	82,76	100,66	
Rata-rata Capaian Kinerja :									117,22	

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2025

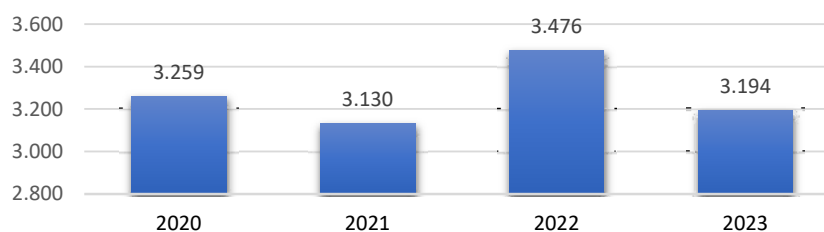
Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 117,22% (Sangat Tinggi). Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD)



merupakan hasil adopsi konsep pengukuran IDSD oleh Kemenristekdikti dan BRIN dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2020. Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah konsisten melakukan penghitungan IDSD/PDSD sejak tahun 2019. Pemanfaatan IDSD/PDSD sebagai masukan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

PDSD Tahun 2023 diukur melalui 97 Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah dan 1 Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah. Indikator Pemetaan Daya Saing Daerah tersebut terbagi dalam 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 dimensi, sedangkan Indikator Analisis Interaksi dan Kebijakan Wilayah meliputi 8 indikator yang terbagi menjadi 2 pilar dan 4 dimensi. Pada Gambar 2.5 terlihat bahwa nilai PDSD Kabupaten Magelang dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023, nilai PDSD sebesar 3,194. Meskipun turun sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2020, namun nilai ini masuk pada kategori tinggi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

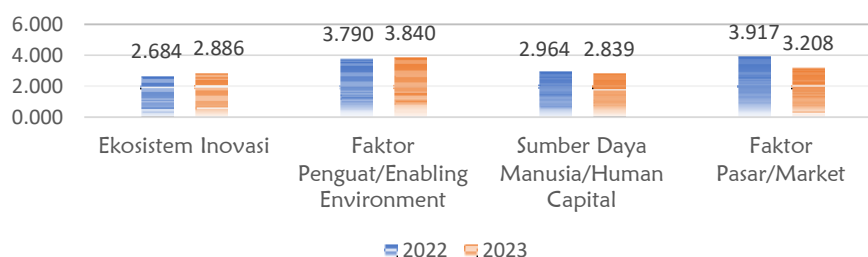
Gambar 2.5.
Nilai PDSD Kabupaten Magelang Tahun 2020-2023



Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Nilai PDSD ini merupakan urutan ke-30 se-Jawa Tengah atau ke-4 se-Purwomanggung. Dari tahun 2020 dan 2023, terjadi penurunan pada Aspek Sumber Daya Manusia dan Aspek Market, yang masing-masing nilai aspek dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 2.6.
Nilai Aspek PDSK Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2023



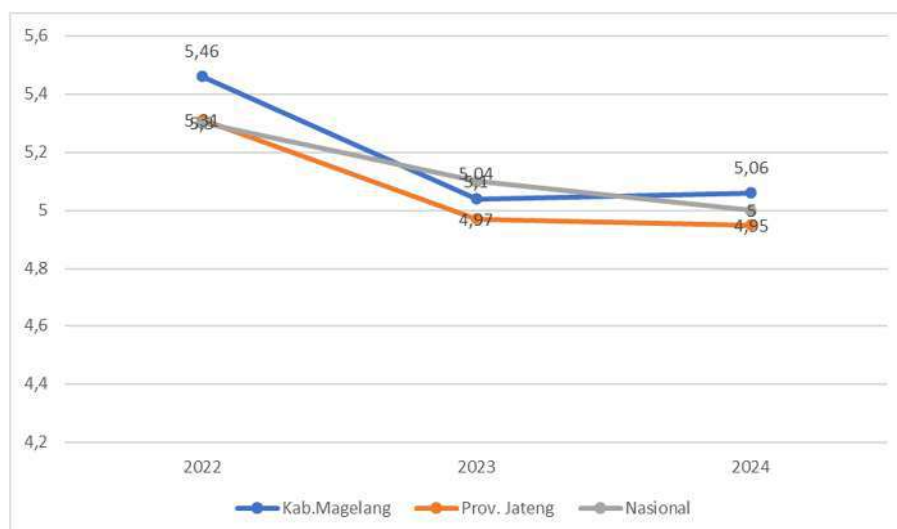
Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan pengukuran pemetaan daya saing daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023, nilai Aspek PDSK tertinggi adalah pada Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai sebesar 3,840 dan aspek ini menjadi faktor yang kuat di dalam internal Kabupaten Magelang. Faktor Penguat terdiri dari Kelembagaan, Infrastruktur, dan Perekonomian Daerah. Salah satu faktor yang mendukung adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Magelang menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Magelang yaitu sebesar 5,46 persen.

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu.



Gambar 2.7.
Nilai Aspek PDSK Kabupaten Magelang, Tahun 2022-2024
Perbandingan LPE Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2022-2024



Sumber : Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2024

Keterangan : Realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2005-2010 menggunakan perhitungan metode lama (tahun dasar 2000), sementara realisasi tahun 2010-2024 menggunakan perhitungan metode baru (tahun dasar 2010)

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah sebesar Rp398.930.435.178,00 dengan realisasi Rp368.059.496.784,00 (92,26%)

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah adalah:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)



7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
13. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
14. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
15. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
16. Program Pengembangan Permukiman
17. Program Penataan Bangunan Gedung
18. Program Penyelenggaraan Jalan
19. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
20. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
21. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
22. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
23. Program Pengembangan Perumahan
24. Program Kawasan Permukiman
25. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
26. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
27. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
28. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
30. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
31. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
32. Program Pengembangan Ekspor
33. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
34. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
35. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
36. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi



37. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
38. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
39. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
40. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
41. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
42. Program Perizinan Usaha Pertanian
43. Program Penyuluhan Pertanian
44. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
45. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
46. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
47. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
48. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
49. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
50. Program Pemasaran Pariwisata
51. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
52. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
53. Program Pengembangan Kebudayaan
54. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
55. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
62. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
63. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
64. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya



65. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 66. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 67. Program Penanggulangan Bencana
 68. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 69. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 70. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 71. Program Penataan Desa
 72. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
 73. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
 74. Program Perekonomian Dan Pembangunan
 75. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 76. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 77. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 78. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- v) Tujuan Strategis: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel

Pada tujuan strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.20.

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	62,76	61,07	61,48	62,29	67,42	72,39	78,94	111,69
Rata-rata Capaian Kinerja :									111,69	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2025

Pada tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Tujuan Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 111,69% (Sangat Tinggi), Indeks reformasi



birokrasi sejak tahun 2020 terus mengalami peningkatan, tetapi masih masuk kategori yang sama yaitu kategori B. Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi meningkat cukup signifikan sebesar 11,52 dan naik predikat BB.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebesar Rp2.115.807.313.965,00 dengan Realisasi Rp1.814.257.237.580,00 (85,75%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi
4. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
12. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
13. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
15. Program Pendaftaran Penduduk
16. Program Pencatatan Sipil
17. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
18. Program Pengelolaan Arsip



19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
21. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
22. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
23. Program Kepegawaian Daerah

2) Evaluasi Sasaran Strategis

i) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
2	3	4	5	6	7	9	11	9	10	13
1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,72	7,78	7,79	7,81	7,82	8,22	7,83	95,26
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,67	12,54	12,55	12,58	12,61	12,66	12,62	99,68
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,87	93,1	92,67	92,35	92,03	95,56	91,63	95,89
Rata-rata Capaian Kinerja :										95,89

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 95,89% (Sangat Tinggi).

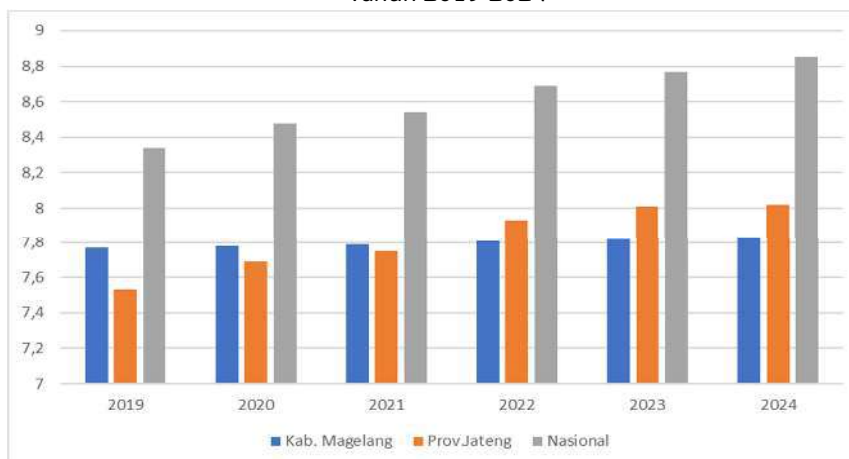
Dimensi pengetahuan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu yang sama. HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2024 sebesar 12,62. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2024 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,62 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2020 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,54 (2020) menjadi 12,62 (2024). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2020-2024 lebih rendah dari provinsi dan nasional.

Pada tahun 2024 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,83 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,83 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih



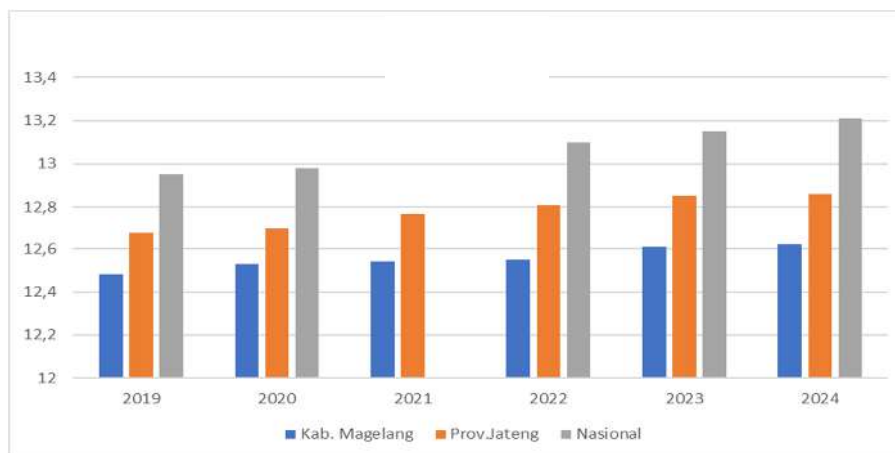
rendah daripada Jawa Tengah dan nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut:

Gambar 2.8.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Gambar 2.9.
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa RLS dan LHS Kabupaten Magelang dari tahun 2019-2024 masih lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.

Setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk



pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.22.
Persentase SD/MI dan SMP/MTS yang Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase SD berakreditasi minimal B	Persen	99,17	98,33	98,34	98,34	97,98
2.	Persentase SMP berakreditasi minimal B	Persen	87,02	87,02	86,36	85,71	85,29
3.	Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B	Persen	93,10	92,67	92,84	92,03	91,63

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2025

Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan mulai tahun 2021 ada perubahan dalam penilaian, dimana grade penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2021 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A dan adanya penambahan sekolah baru yang belum terakreditasi. Walaupun belum mencapai 100%, persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

Di luar sekolah formal terdapat PKBM. PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal (Sekolah Kesetaraan), dan merupakan sebuah lembaga pendidikan bentukan masyarakat yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat juga dilakukan akreditasi. Data PKBM Terakreditasi di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut

Tabel 2.23.
Persentase PKBM yang Berakreditasi Minimal B
Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah PKBM terakreditasi minimal B		-	14	17	20	NA



No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Jumlah PKBM		-	22	22	22	NA
	Persentase PKBM berakreditasi minimal B	Persen	-	63,63	77,27	90,90	NA

Sumber : Disdikbud Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan: *) data sementara

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan Pendidikan sebesar Rp228.732.540.929,00 dengan realisasi sebesar Rp221.820.210.320,00 (96,98%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 3. Program Pembinaan Perpustakaan
 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 6. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- ii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya
Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,56	73,72	73,88	74,03	74,44	74,22	74,68	100,62
Rata-rata Capaian Kinerja :									100,62	

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 100,62% (Sangat Tinggi).

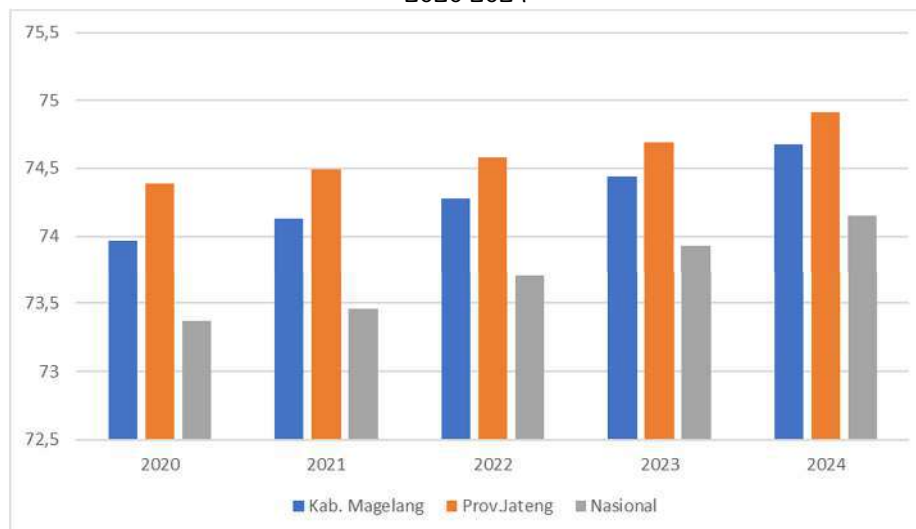
Pada rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, komponen dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak di Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Dalam rentang waktu tersebut, dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh



indikator angka harapan hidup menunjukkan besaran yang semakin meningkat, yang ditandai dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,19 persen per tahun., capaian indikator angka harapan hidup di Kabupaten Magelang ini tercatat berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2024 UHH Kabupaten Magelang mencapai 74,68. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Nasional namun masih di bawah pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.10.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan Rp213.270.173.051,00 dengan realisasi sebesar Rp199.478.182.691,00 (93,53%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan



iii) Sasaran Strategis: Menurunnya Jumlah PMKS

Capaian kinerja sasaran strategis Menurunnya Jumlah PMKS, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya
Jumlah PMKS Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,63	0,62	0,57	0,57	0,58	1,15	198,28
Rata-rata Capaian Kinerja :									198,28	

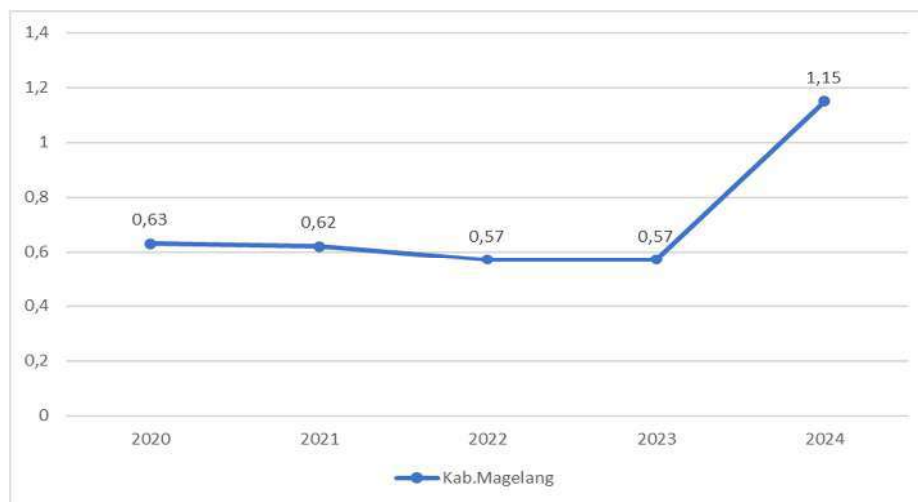
Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 198,28% (Sangat Tinggi).

Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan angka yang menggambarkan penurunan jumlah orang yang tergolong PMKS dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah PMKS pada periode sebelumnya. PMKS merupakan individu atau keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial, dan memerlukan bantuan dari pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Penurunan persentase PMKS membutuhkan upaya dari pemerintah untuk memberikan bantuan penanganan pada PMKS agar dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator persentase penurunan PMKS dapat diketahui melalui pengurangan antara jumlah PMKS pada periode awal dengan jumlah PMKS pada periode akhir, kemudian dibagi dengan jumlah PMKS pada periode awal dan dinyatakan dalam persen.



Gambar 2.11.
Grafik Persentase Penurunan PMKS Kabupaten Magelang Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase penurunan PMKS di Kabupaten Magelang mengalami penurunan, dan di tahun 2024 penurunannya sangat signifikan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS sebesar Rp11.900.372.547,00 dengan realisasi sebesar Rp11.615.209.638,00 (97,60). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

iv) Sasaran Strategis: Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024				Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	77,37	81,27	79,92	79,44	79,44	82,62	80,2	97,07
Rata-rata Capaian Kinerja :										97,07

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 97,07% (Sangat Tinggi). Pola Pangan Harapan (PPH) adalah konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas konsumsi pangan penduduk suatu daerah. PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Saat ini skor PPH telah digunakan sebagai indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dalam bidang ketahanan pangan di suatu wilayah dan diisyaratkan oleh Undang-Undang untuk dapat direalisasikan pencapaiannya.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, yang pencapaiannya diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang dengan indikator yang ada saat ini yaitu PPH. Terdapat dua jenis PPH, yaitu PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan.

Tabel 2.27.
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Ketersediaan
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi) Kabupaten Magelang	Persen	87,70	87,90	87,90	86,40	91,10	88,00
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan) Kabupaten Magelang		89,61	87,9	78,45	81,26	81,83	83,45
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi) Prov. Jawa Tengah	Persen	87,3	87,03	85,84	84,31	NA	NA
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Prov. Jawa Tengah		87,3	87,3	87,3	94,3	94,42	NA

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2025

Selama kurun waktu 2019-2023, skor PPH Harapan Konsumsi dan PPH Ketersediaan pernah mengalami penurunan meskipun di tahun 2023 mengalami peningkatan, namun capaian Kabupaten Magelang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah.



Secara umum, skor PPH di Kabupaten Magelang, baik PPH konsumsi maupun ketersediaan masih berada di bawah skor pangan ideal, yaitu 100 persen. Hasil skor PPH ini menginterpretasikan bahwa pola konsumsi pangan pada rumah tangga di Kabupaten Magelang ini belum beragam, serta mutu gizi dan nutrisi masih belum optimal.

Sementara itu, berkebalikan dengan pencapaian skor PPH konsumsi, besaran pencapaian skor PPH ketersediaan di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat,

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya ditulis UU 18/2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun berdasarkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Penguatan cadangan pangan bertujuan untuk memastikan apakah pada suatu wilayah tertentu tiap tahunnya memiliki inventarisasi cadangan pangan sebesar perkiraan jumlah kebutuhan bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat terselenggara dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk melakukan penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut:



1) Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2) Ketersediaan Pangan Utama Beras

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3) Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi.

4) Stabilitas Harga Pangan

Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah output yang lebih baik. Realisasi stabilitas harga dan pasokan pangan di Kabupaten Magelang masih dapat terjaga dengan capaian 93,98% dari angka yang ditargetkan sebesar 93,2% atau capaiannya 100,64% (sangat tinggi).

5) Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang.

Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL).



6) Ketersediaan komoditas selain beras

Pada tahun 2024 terdapat sepuluh (10) komoditas unggulan yaitu: padi, jagung, cabai, bawang putih, salak, jeruk, kelengkeng, kopi, cengkeh, dan kelapa dalam. Dari kesepuluh komoditas unggulan tersebut, terdapat lima (5) komoditas yang produksinya menurun yaitu: padi, cabai, salak, jeruk, dan kelengkeng. Lima (5) komoditas lainnya mengalami peningkatan.

7) Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah sebesar Rp1.200.329.065,00 dengan realisasi sebesar Rp1.017.985.683,00 (84,81%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terdiri dari:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

v) Sasaran strategis: Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024				Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ^{*)}	persen	3,0	4,27	5,03	4,97	4,42	2,25-2,65	3,55	66,04	
Rata-rata Capaian Kinerja :									66,04	

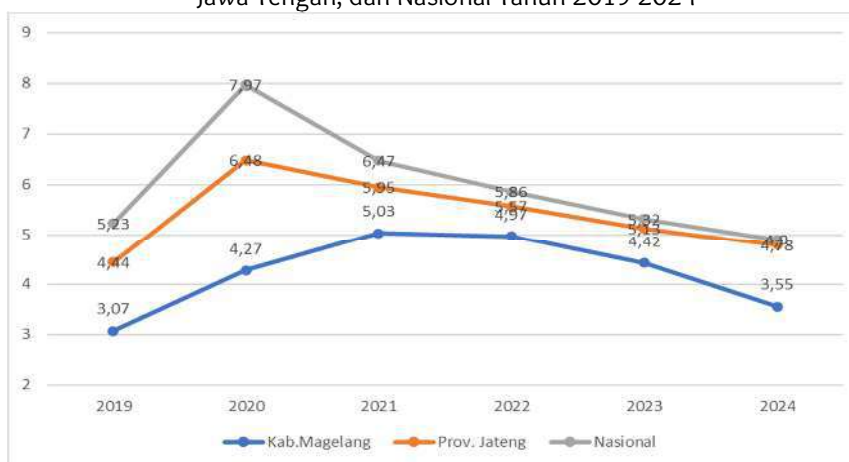
Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis terkendalnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 66,04 (sedang). Dari 2020 sampai dengan 2024 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Magelang relative cenderung turun, dimana pada tahun 2020 sebesar 4,27 menjadi 3,55 pada tahun 2024

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Banyaknya pengangguran di suatu wilayah merupakan masalah yang tidak hanya mencakup bidang perekonomian saja. Di sisi lain, masalah pengangguran juga mempunyai hubungan erat dengan bidang sosial dan pendidikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 2.12.

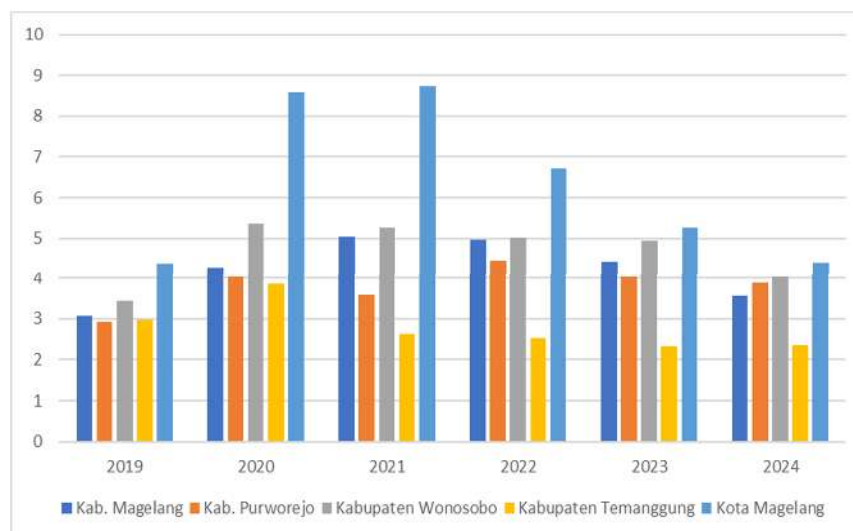
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2025



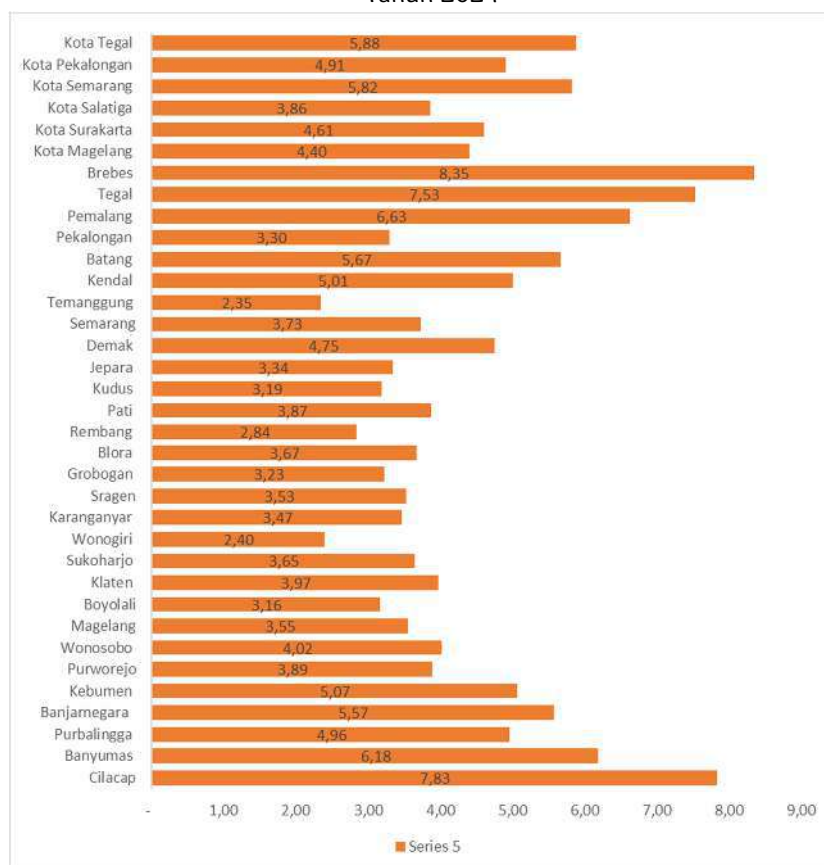
Gambar 2.13
Perbandingan TPT Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu
Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2025

Posisi TPT Kabupaten Magelang dari tahun 2024 dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu, menduduki posisi kesebelas.

Gambar 2.14.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang terhadap Kabupaten
Lainnya di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024



Sumber: Tabel Dinamis Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkendalinya tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp1.652.035.024,00 dengan realisasi sebesar Rp1.515.057.434,00 (91,71%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka terdiri dari:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

vi) Sasaran strategis: Meningkatnya Keberdayaan Gender

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Keberdayaan Gender, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.29.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Keberdayaan Gender Tahun 2024

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024			Ket	
				2020	2021	2022	2023	Target	Capaian		%
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka (0-100)	67,74	69,65	69,64	69,66	92,21	70,53	92,21	130,74	*)
2	Kategori Kabupaten Layak Anak	-	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja :										115,37	

Sumber : Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024
Keterangan : Capaian mengacu tahun sebelumnya (2023)

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 115.37% (Sangat Tinggi).

Tabel 2.30.

Indeks Pembangunan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kabupaten Magelang	91,78	91,81	91,89	92,21	92,91
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48	92,83	93,31
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	92,29

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024

Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.



Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap PD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (*Gender Analysis Pathway*)/ PROBA dan GBS (*Gender Budget Statement*) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA)

Kabupaten/Kota layak anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.31.
Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak
di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tingkat Pratama	Desa	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	94	0	0	0	0
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	98	100	110	120
4	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	17	17	17	17	0
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	21
4	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kabupaten	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kabupaten	1	1	0	0	0
3.	Tingkat Nindya	Kabupaten	0	0	1	1	1
4	Tingkat Utama	Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender Rp20.178.924.311,00 dengan realisasi sebesar Rp19.709.269.250,00 (97,67%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan keberdayaan gender terdiri dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Pengendalian Penduduk
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

vii) Sasaran strategis: Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik

Capaian kinerja sasaran strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2024

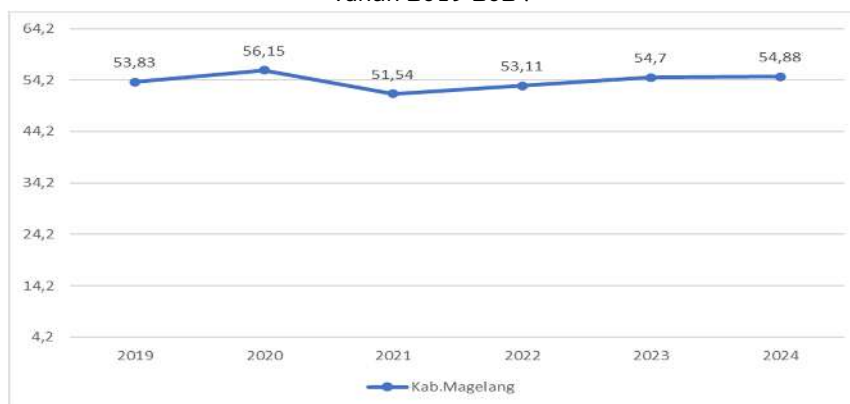
Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024				Ket
				2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka (1-100)	71,18	71,30	71,41	70,48	65,80	71,38	69,40	97,23	
Rata-rata Capaian Kinerja :										97,23	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 97,23% (Sangat Tinggi).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator nasional untuk menilai kondisi lingkungan hidup pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air menjadi salah satu komponen untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air menunjukkan kondisi mutu air di suatu wilayah selama periode waktu tertentu.

Gambar 2.15.
Grafik Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan data yang ada, hasil pengukuran indeks kualitas air menunjukkan hasil yang fluktuatif.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik Rp18.192.505.758,00 dengan realisasi sebesar Rp17.006.104.878,00 (93,48%). Program yang mendukung



pencapaian sasaran strategis Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik terdiri dari:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

viii) Sasaran strategis: Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2024

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024			Ket	
				2020	2021	2022	2023	Target	Capaian		%
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12	
1	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61.43	61.90	63,72	73,38	82,78	93,05	96,11	103,29	*)
Rata-rata Capaian Kinerja :									103,29		

Sumber: DPUPR, DPRKP dan Dishub Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 103,29% (sangat tinggi). Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Nilai cakupan pembangunan infrastruktur wilayah diperoleh melalui komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang,



cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, dan cakupan hunian layak dan berkualitas.

Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, maupun cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu:

- 1) Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang
Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 8 komponen pembentuk, yaitu cakupan penyelenggaraan jalan, cakupan pengelolaan sda, cakupan penataan bangunan gedung, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, cakupan layanan drainase lingkungan, cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan, dan cakupan layanan penyelenggaran penataan ruang.
- 2) Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan
Kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan komposit persentase layanan penyelenggaran angkutan dan persentase keamanan dan keselamatan lalu lintas.
- 3) Cakupan hunian layak dan berkelanjutan
Cakupan hunan layak dan berkualitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman. Indikator cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki 2 komponen/unsur pembentuk, yaitu: Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Persentase penanganan kawasan Permukiman Kumuh
Di bawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024.



Tabel 2.34.
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang
Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	62,8	69,9	73,42	63,94	80,6	88,67
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	60,05	53,89	54,02			
	Cakupan pembangunan layanan perhubungan	%				61,38	72,68	104,23
3.	Cakupan hunian layak dan berkelanjutan	%	-	-	-	94,82	95,09	95,43
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah		%	56,55	61,9	63,72	73,38	82,78	96,11

Sumber : Hasil Olahan, 2025

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur sebesar Rp195.406.822.092,00 dengan realisasi sebesar Rp181.160.390.478,00 (92,71%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi



9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
12. Program Pengembangan Perumahan
13. Program Kawasan Permukiman
14. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
15. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
16. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLA)
17. Program peningkatan Pelayanan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

ix) Sasaran Strategis: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024				Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.455,80	4.306,14	4.667,15	4.967,87	5.381,88	6.227,11	5.637,40	90,53	
2 Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.747,26	6.914,81	7.086,93	7.486,55	7.913,20	8.875,03	8.341,93	93,99	
3 Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.138,49	7.266,33	7.794,55	8.628,27	9.633,01	9.613,39	10.697,97	111,28	
4 Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.379,38	1.274,04	1.366,00	1.675,34	1.675,34	1.951,00	1.675,34	85,87	
5 Pertumbuhan Investasi	persen	7,53	13,49	12,56	32,21	31,95	10,00	10,88	108,80	
6 Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	persen	98,8	104,93	84,46	82,78	82,78	87,76	99,52	113,40	
7 Indeks Desa Membangun	Angka (0-1)	-	0,68	0,695	0,71	0,70	0,72	0,735	102,08	
Rata-rata Capaian Kinerja :									100,85	

Sumber :BPS Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya daya saing ekonomi daerah pada tahun 2024 akhir periode RPJMD sebesar 100,85% (Sangat Tinggi).

Sektor pariwisata tidak memiliki kategori khusus pada sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Magelang, akan tetapi sektor pariwisata dimasukkan ke dalam sektor lapangan usaha lain yang merepresentasikan kontribusi pariwisata,



yaitu sektor penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum. Subsektor penyedia akomodasi mencakup usaha penyediaan akomodasi jangka pendek seperti penginapan dan hotel, sedangkan subsektor penyedia makan minum meliputi pelayanan makan minum konsumsi seperti restoran.

Tabel 2.36.
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PDRB ADHK Kabupaten Magelang	Miliar Rupiah	23.253,15	22.865,15	23.661,71	24.953,20	26.211,56	26.211,56
2	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Miliar Rupiah	1.017,36	936,02	988,28	1.163,01	1.273,24	1.273,24
3	Kontribusi Terhadap PDRB	Persen	4,4%	4%	4,2%	4,7%	12,13	12,13
4	Pertumbuhan	Persen	8%	-8%	5,6%	17,7%	7,89	7,89

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Keterangan : *) Data sementara

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menggambarkan kontribusi sektor pertanian dalam struktur perekonomian wilayah. Sektor pertanian dalam PDRB memiliki subsektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah sebesar Rp8.154.697.533,00 dengan realisasi sebesar Rp7.709.147.214,00 (94,54%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah terdiri dari:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



7. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
8. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Perizinan Usaha Pertanian
15. Program Penyuluhan Pertanian
16. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
18. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
19. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
20. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
21. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
22. Program Pemasaran Pariwisata
23. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
24. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25. Program Pengembangan Kebudayaan
26. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
27. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
28. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
29. Program Promosi Penanaman Modal
30. Program Pelayanan Penanaman Modal
31. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
32. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
33. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
34. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
35. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



36. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
37. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
38. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
39. Program Penanggulangan Bencana
40. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
41. Program Administrasi Pemerintahan Desa
42. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
43. Program Penataan Desa
44. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
45. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
46. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
47. Program Perekonomian dan Pembangunan
48. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
49. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

x) Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Nilai AKIP	-	60,10	60,33	61,13	62,25	63,04	65,02	63,57	92,13	
Rata-rata Capaian Kinerja :									92,13	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 92,13% (sangat tinggi)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan



pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar Rp1.415.572.466.417,00 dengan realisasi Rp1.133.852.668.514,00 (80,10%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informasi
 4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 6. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 8. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 10. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 11. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 12. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- xi) Sasaran strategis: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya			Tahun 2024				Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka (0-5)	2,74	2,94	2,67	3,13	3,13	3,41-3,6	3,92	108,89	
Rata-rata Capaian Kinerja :									108,89	

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 122,12% (Sangat Tinggi)

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan berdasarkan pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, semula penghitungan SPBE berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan demikian terjadi perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan.

Di Kabupaten Magelang sebagai upaya pencapaian SPBE dalam mendukung *smart city* telah dilakukan beberapa upaya diantaranya:

- a) Pembentukan tim pengarah SPBE Kabupaten Magelang, melalui SK Bupati Magelang Nomor 180.182/381/KEP/15/2020 dengan tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Kabupaten Magelang dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.
- b) Harmonisasi kebijakan SPBE dengan provinsi dimana Kabupaten selalu mengikuti *issue* baik provinsi maupun nasional, untuk *issue* nasional hal paling awal yang dilakukan adalah membuat rancangan arsitektur SPBE dengan melibatkan OPD2 terkait, yang mengacu pada arsitektur SPBE nasional dan menggunakan *tool* yang sudah disediakan oleh nasional (*tool* tersebut release di akhir tahun 2022).
- c) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melalui sosialisasi KIM, pelatihan kepada KIM dan pemasaran hasil pelatihan KIM melalui pemasaran online dan OSS. Beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan diantaranya pelatihan *digital marketing*, budidaya anggrek, pembuatan pakan lele, dan pelatihan budi daya kambing.
- d) Pembentukan tim CISRT (*Computer Security Incident Response Team*) di Kabupaten Magelang melalui Peraturan Bupati Magelang yang melibatkan



Diskominfo dan agen siber di masing-masing PD. Upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah sudah mengirimkan surat dan berkoordinasi dgn BSSN terkait tim CSIRT utk didaftarkan di BSSN.

- e) Dalam rangka pembangunan basis data dan penguatan pengelolaan statistik, Kabupaten Magelang telah mengembangkan portal satu data Kabupaten Magelang untuk mendukung Satu Data Indonesia dengan alamat <http://pusaka.magelangkab.go.id> sebagai sarana untuk mempublikasikan Data sektoral dari OPD di lingkup Pemkab Magelang sebagai produsen data, dimana didalamnya ada portal <http://opendata.magelangkab.go.id> yang sudah terintegrasi dengan <http://data.go.id> yang bisa dibagipakai (prinsip interoperabilitas).

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp12.269.454.515,00 dengan realisasi Rp12.176.256.470,00 (99,24%).

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 3. Program Pendaftaran Penduduk
 4. Program Pencatatan Sipil
 5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 6. Program Pengelolaan Arsip
- xii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan,
Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja :									100,00	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 100% (Sangat Tinggi).

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kabupaten Magelang sejak tahun 2020 hingga 2024 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh hasil WTP.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sebesar Rp683.738.088.099,00 dengan realisasi Rp664.233.456.332,00 (97,15%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

xiii) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	82,74	83,69	84,22	84,36 (Baik)	84,78	86,00	86,99	102,04	
Rata-rata Capaian Kinerja :										102,04

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 102,04% (Sangat Tinggi)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp647.792.793,00 dengan realisasi Rp623.867.014,00 (96,31%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

xiv) Sasaran strategis: Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Kinerja Tahun Sebelumnya				Tahun 2024			Ket
			2020	2021	2022	2023	Target	Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	8	10	8	9	12
1	Indeks Sistem Merit	-	0,49	0,60	0,64	0,64	0,71	0,76	0,71	93,42
Rata-rata Capaian Kinerja :									93,42	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian pada tahun 2024 akhir RPJMD sebesar 93,42% (Sangat Tinggi). Capaian inididasarkan pada capaian kinerja tahun 2023 dikarenakan Tahun 2024 sudah tidak dilakukan penilaian kinerja sistem merit.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manejemen ASN, sistem merit merupakan sebuah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen kepegawaian, menghasilkan SDM ASN yang netral, sistemtematis, berintegritas, dan kompeten. Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan pada delapan aspek manajemen ASN yang meliputi 1) perencanaan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) pengembangan karir, 4) promosi dan sistem, 5) manajemen kinerja, 6) penggajian, penghargaan dan disiplin, 7) perlindungan dan pelayanan, serta 8) sistem informasi.

Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tahun 2021 hasil penilaiannya masuk dalam kategori III (tiga) atau mendapatkan nilai baik dengan jumlah nilai 262 (dua ratus enam puluh dua) dengan indeks 0,64 (nol koma enam empat). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat



Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 16/KEP.KASN/C/VIII/2021 tanggal 17 Agustus 2021. Ini merupakan hasil penilaian dan klarifikasi oleh Komisi ASN sejak tahun 2020.

Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 46/KEP.KASN/C/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 menetapkan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada kategori III dengan predikat Baik pada indeks 0,71. Rekomendasi KASN tahun 2023 atas penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan kategori penilaian tersebut dapat disetujui untuk dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki dan/atau telah melakukan penyempurnaan terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rekomendasi masih sama dengan rekomendasi tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Sementara nilai Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2020 mencapai 63, tahun 2021 mencapai 53, tahun 2022 mencapai 46,26 dan tahun 2023



mencapai nilai 76,23. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena:

1. Beberapa peserta diklat/bintek mendapat biaya sharing dari penyelenggara sehingga efisiensi atas biaya tersebut dapat digunakan untuk menambah peserta yang dikirim bintek/diklat. Hal ini mendorong capaian jumlah peserta yang dapat dikirim melebihi target yang direncanakan.
2. Data pengembangan kompetensi ASN dengan biaya non APBD (biaya mandiri) sudah terupdate dalam database kepegawaian, terutama data diklat dan bintek yang dilaksanakan ASN secara mandiri sudah ASN dilaporkan diklat/bintek diikutinya melalui Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan). Hal ini menyebabkan peningkatan nilai pada komponen kompetensi ASN yang mendorong peningkatan nilai IP ASN. Bobot komponen kompetensi dalam penghitungan IP ASN adalah 40%.
3. Pemerintah Kabupaten Magelang berhasil mengintegrasikan Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (Sipgan) dengan Sistem Informasi ASN BKN (SI ASN) sehingga data yang terupdate di Sipgan sudah otomatis update di SI ASN.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian sebesar Rp3.579.512.141,00 dengan realisasi Rp3.370.989.250,00 (94,17%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah

c. Analisis Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efisiensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut.

Penghitungan analisis efisiensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efisiensi.



Tingkat efesiensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 11,70%, efesiensi ini belum menunjukkan efesiensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran belum tentu adanya efesiensi dalam penggunaan anggaran tetapi dimungkinkan kegiatan yang direncana tidak terlaksana dan rendahnya serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Analisis efesiensi dapat dilihat pada tabel berikut ini



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

Tabel 2.42.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia							
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,95					
	1 Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1 Rata-rata Lama Sekolah	95,26	Program Pengelolaan Pendidikan	188.520.647.035	184.073.442.004	97,64	TE
		2 Harapan Lama Sekolah	99,68	Program Pembinaan Perpustakaan	600.546.706	593.504.580	98,83	TE
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	559.050.000	507.761.654	90,83	TE
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.870.985.164	14.418.757.867	96,96	TE
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	100,00	TE
		3 Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	95,89	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	23.881.312.024	21.926.744.215	91,82	TE
	2 Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4 Angka Harapan Hidup	100,62	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	208.971.068.968	199.478.182.691	95,46	4,54



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.726.135.229	1.662.013.010	96,29	3,71
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	375.494.000	346.728.036	92,34	7,66
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.197.474.854	2.133.463.651	97,09	2,91
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat		2	Inflasi	37,75					
			3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	110,55					
			4	Angka Kemiskinan	97,38					
	3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	198,28	Program Pemberdayaan Sosial	419.849.537	411.544.919	98,02	1,98
						Program Rehabilitasi Sosial	1.922.518.411	1.775.013.663	92,33	7,67
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.983.546.599	8.867.635.286	98,71	1,29
						Program Penanganan Bencana	574.458.000	561.015.770	97,66	2,34
	4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	97,07	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	1.036.394.065	1.017.985.683	98,22	TE
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	44.385.000	43.184.405	97,30	TE
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	119.550.000	117.276.190	98,10	TE



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi	
1	2		3		4	5	6	7	8	9	
	6	Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka		7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	52,67	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.652.035.024	1.515.057.434	91,71	TE
							Program Penempatan Tenaga Kerja	1.978.473.821	1.450.646.516	73,32	TE
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.521.000	34.061.895	98,67	TE
							Program Hubungan Industrial	298.450.000	286.342.944	95,94	TE
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender		5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		99,16					
	7	Meningkatnya keberdayaan gender		8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
						Program Perlindungan Perempuan	259.415.000	239.284.379	92,24	7,76	
						Program Pengendalian Penduduk	612.322.118	610.104.357	99,64	0,36	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.574.108.200	11.134.443.088	96,20	3,80	
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.906.876.981	6.904.889.211	99,97	0,03	
						9	Kategori Kabupaten Layak Anak	100,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	295.481.802	295.238.351
	Program Perlindungan Khusus Anak	261.815.000		260.269.982	99,41				0,59		
B	MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	144,57					
		7	PDRB Per Kapita	103,56					
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	100,66					
	8 Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	10	Indeks Kesehatan Lingkungan Hidup (IKLH)	97,23	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	46.948.717	41.369.104	88,12	TE
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	49.560.000	49.162.668	99,20	TE
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	551.389.920	549.132.313	99,59	TE
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.687.861.000	2.614.103.771	97,26	TE
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	274.545.000	254.923.588	92,85	TE



| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	68.970.000	68.682.864	99,58	TE
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	167.307.121	166.258.536	99,37	TE
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	70.528.500	69.175.510	98,08	TE
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	51.740.000	51.609.818	99,75	TE
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.125.000	24.961.245	99,35	TE
						Program Pengelolaan Persampahan	14.198.530.500	13.116.725.461	92,38	TE
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		11	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	103,29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	6.562.995.599	6.368.764.703	97,04	2,96



| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.285.747.503	17.256.938.498	99,83	0,17
						Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	2.154.097.897	1.626.703.760	75,52	24,48
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	18.585.428.148	10.300.699.677	55,42	44,58
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	30.000.000	30.000.000	100,00	0,00
						Program Penataan Bangunan Gedung	16.814.306.272	16.575.416.460	98,58	1,42
						Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	629.720.502	623.341.560	98,99	1,01
						Program Penyelenggaraan Jalan	98.888.430.970	94.858.518.677	95,92	4,08
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	385.356.500	378.818.693	98,30	1,70
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	227.735.909	187.629.229	82,39	17,61
						Program Pengembangan Perumahan	340.301.745	189.779.900	55,77	44,23
						Program Kawasan Permukiman	27.600.000	23.828.166	86,33	13,67
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.809.880.000	4.311.665.302	89,64	10,36



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	213.395.134	89.886.195	42,12	57,88
						Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	22.075.000	4.131.880	18,72	81,28
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28.429.750.913	28.334.267.778	99,66	0,34
	10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	12	Nilai PDRB sektor perdagangan	90,53	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.263.559.498	4.856.321.270	92,26	TE
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.098.250.903	1.086.529.960	98,93	TE
						Program Pengembangan Ekspor	437.845.000	432.835.968	98,86	TE
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	135.154.132	135.034.643	99,91	TE
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	56.255.000	55.391.777	98,47	TE
						Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	317.155.500	308.558.225	97,29	TE
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	846.477.500	834.475.371	98,58	TE



| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
			13	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	93,99	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.855.276.440	4.706.237.917	96,93	TE
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	11.192.798.808	10.465.063.849	93,50	TE
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.278.428.801	1.183.433.397	92,57	TE
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	427.517.748	420.830.360	98,44	TE
						Program Perizinan Usaha Pertanian	37.389.765	37.261.291	99,66	TE
						Program Penyuluhan Pertanian	1.421.960.688	1.238.818.419	87,12	TE
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	805.583.780	758.586.051	94,17	TE
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	34.737.740	34.589.787	99,57	TE
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	420.709.314	420.045.437	99,84	TE
			14	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	111	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	885.800.000	829.195.139	93,61	6,39



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
			15	Nilai PDRB sektor pariwisata	85,87	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.799.504.695	8.630.099.523	98,07	TE
						Program Pemasaran Pariwisata	430.833.227	430.565.174	99,94	TE
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.285.570.129	1.199.141.228	93,28	TE
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	8.000.000	7.896.790	98,71	TE
						Program Pengembangan Kebudayaan	344.775.000	344.774.884	100,00	TE
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.759.075.528	2.366.700.864	85,78	TE
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	479.050.000	438.452.815	91,53	TE
			16	Pertumbuhan Investasi	108,80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.125.000	37.631.500	98,71	1,29
						Program Promosi Penanaman Modal	23.409.510	18.860.160	80,57	19,43
						Program Pelayanan Penanaman Modal	361.265.623	358.342.922	99,19	0,81



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
			17	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	113,40	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	715.675.620	633.314.640	88,49	11,51
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.516.000	25.097.465	98,36	1,64
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	592.516.189	584.688.168	98,68	1,32
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.207.282.500	1.117.900.630	92,60	7,40
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.837.743.108	50.827.330.960	99,98	0,02
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	204.651.000	193.880.740	94,74	5,26
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	175.363.000	170.767.400	97,38	2,62
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	929.722.210	907.411.237	97,60	2,40



| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
						Program Penanggulangan Bencana	2.056.343.500	1.967.701.192	95,69	4,31
						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.558.891.880	5.402.683.089	97,19	2,81
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.083.940.200	7.926.174.374	98,05	1,95
			18	Indeks Desa Membangun	102,08	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.046.420.653	5.955.320.936	98,49	1,51
						Program Penataan Desa	322.438.800	307.423.429	95,34	4,66
						Program Peningkatan Kerja Sama Desa	40.320.714	37.689.534	93,47	6,53
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	4.927.550.902	4.810.706.335	97,63	2,37
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	19.435.143.095	18.523.615.350	95,31	4,69
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	32.252.498.692	21.221.366.146	65,80	34,20
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	676.183.498	655.729.291	96,98	3,02
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.496.891.178	6.341.279.734	97,60	2,40



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis			Indikator Kinerja			% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2			3			4	5	6	7	8	9
								Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	588.505.260	553.069.842	93,98	6,02
								Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	113.000.000	94.176.215	83,34	16,66
C	MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah											
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel			9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		109,05					
	11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan			19	Nilai AKIP	92,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.400.196.463.972	1.120.854.710.679	80,05	TE
								Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	881.854.275	875.145.081	99,24	TE
								Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	516.602.705	514.472.424	99,59	TE
								Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	807.384.082,00	799.952.986	99,08	TE
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.959.288.924	7.996.655.189	80,29	TE
								Program Penyelenggaraan Pengawasan	923.178.000	705.468.265	76,42	TE
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.287.694.459	2.106.263.890	92,07	TE



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3		4	5	6	7	8	9
	12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	20	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	122,12	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.881.168.482	1.836.603.894	97,63	2,37
						Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.264.737.414	7.237.388.674	99,62	0,38
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	77.153.460	76.698.685	99,41	0,59
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	911.921.466	898.089.763	98,48	1,52
						Program Pendaftaran Penduduk	756.600.000	753.407.694	99,58	0,42
						Program Pencatatan Sipil	587.153.713	584.387.604	99,53	0,47
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	617.879.912	617.628.591	99,96	0,04
						Program Pengelolaan Arsip	172.840.068	172.051.565	99,54	0,46
	13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	21	Opini BPK	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	679.310.099.466	660.233.087.522	97,19	2,81
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.427.988.633	4.000.368.810	90,34	9,66
	14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	102,04	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	647.792.793	623.867.014	96,31	3,69



| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis		Indikator Kinerja			% capaian kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat efisiensi
1	2		3			4	5	6	7	8	9
	15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian		23	Indeks Sistem Merit	93,42	Program Kepegawaian Daerah	3.579.512.141	3.370.989.250	94,17	TE
Jumlah :								2.993.983.568.891	2.643.546.366.027	88,30	11,70

Sumber : Sekretariat Daerah dan BPPKAD, Data diolah, 2024

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun 2024 didasarkan pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Pekerja Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.



Adapun rincian dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, terdapat kegiatan:

a. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND);

Kegiatan UPLAND dilaksanakan di 3 (tiga) Kawasan UPLAND, yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bandongan dan Kecamatan Grabag.

b. Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat;

Kegiatan irigasi perpompaan besar dilaksanakan untuk 88 kelompok tani yang terdiri dari 33 paket dalam anggaran penetapan dan 55 paket dalam anggaran perubahan. Kelompok tani tersebut tersebar di wilayah Kecamatan Muntilan, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Secang, Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salaman, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Windusari, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Dukun, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, dan Kecamatan Mertoyudan.

c. Irigasi Perpipaan;

Kegiatan perpipaan dilaksanakan untuk 30 kelompok tani yang terletak pada Kecamatan Bandongan, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Windusari.

d. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi bagi kelompok tani penerima bantuan.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan dan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dengan *output* dokumen laporan



3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menerima Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

3.2.1 Target Kinerja

Pada tahun 2024 Kabupaten Magelang hanya melaksanakan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah dengan total anggaran sebesar Rp17.668.860.000,00.

3.2.2 Realisasi

Dari total anggaran Tugas Pembantuan Rp17.668.860.000,00 Kabupaten Magelang dapat merealisasikan sebesar Rp17.320.657.100,00 atau sebesar 98,03% dan untuk realisasi fisiknya sebesar 100%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 3.1.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	Bidang Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 018.08.4.039158/2024 tanggal 24 November 2023	PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS		Distan pangan	17.621.580.000,00	17.283.802.100,00	98,08		
			Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian			17.606.580.000,00	17.270.302.100,00	98,09		
			Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			4.046.580.000,00	3.870.779.100,00	95,66		
			Fasilitasi Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Dataran Tinggi (UPLAND)	1. Sawangan 2. Bandongan 3. Grabag		4.046.580.000,00	3.870.779.100,00	95,66	98 kelompok tani dan 3 koperasi	100,00
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			13.560.000.000,00	13.399.523.000,00	98,82		
			Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	Muntilan		3.960.000.000,00	3.939.060.000,00	99,47	33 paket	100,00
				Borobudur						
				Secang						
				Grabag						
				Ngluwar						
				Salaman						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
				Bandongan						
				Tempuran						
				Tegalrejo						
				Windusari						
				Candimulyo						
				Sawangan						
				Kaliangkrik						
				Mungkid						
			Irigasi Perpipaan	Bandongan		3.000.000.000,00	2.991.509.000,00	99,72	30 unit	100,00
				Candimulyo						
				Dukun						
				Grabag						
				Kajoran						
				Ngluwar						
				Kaliangkrik						
				Salaman						
				Secang						
				Tegalrejo						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
				Tempuran						
				Windusari						
			Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat	Candimulyo		6.600.000.000,00	6.468.954.000,00	98,01	55 paket	100,00
				Dukun						
				Grabag						
				Ngluwar						
				Salam						
				Salaman						
				Secang						
				Srumbung						
				Tegalrejo						
				Windusari						
				Muntilan						
				Tempuran						
				Dukun						
				Salam						
				Srumbung						
				Mertoyudan						



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			15.000.000,00	13.500.000,00	90,00		
			Koordinasi			15.000.000,00	13.500.000,00	90,00		
			Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	21 Kecamatan		15.000.000,00	13.500.000,00	90,00	21 kecamatan	100,00
2	Bidang Pertanian	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 018.08.4.039158/2024 tanggal 24 November 2023	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		Distan pangan	47.280.000,00	36.855.000,00	77,95		
			Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			47.280.000,00	36.855.000,00	77,95		
			Layanan Manajemen Kerja Internal			47.280.000,00	36.855.000,00	77,95		
			Layanan Manajemen Keuangan	Kabupaten Magelang		47.280.000,00	36.855.000,00	77,95	1 laporan	100,00
			TOTAL			17.668.860.000,00	17.320.657.100,00	98,03		100

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025



**3.3. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada
Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya**

3.3.1. Target Kinerja

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada pemerintah desa di Kabupaten Magelang dengan total anggaran sebesar Rp95.985.345.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Sarana dan Prasarana kepada Desa dengan total anggaran sebesar Rp83.877.845.000,00;
2. Pengembangan Desa Wisata dengan anggaran sebesar Rp300.000.000,00;
3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa Pembangunan/Peningkatan Kualitas Jamban Keluarga dengan total anggaran sebesar Rp4.507.500.000,00;
4. Peningkatan Kualitas RTLH di Perdesaan dengan total anggaran sebesar Rp7.300.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2024 memberikan bantuan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa total sebesar Rp22.838.204.000,00 dengan realisasi keuangan dan realisasi fisik sebesar 100%. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa, jenis bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa;
- b. Pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- c. Pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa
- d. Pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;
- e. Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;
- f. Pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air;
- g. Pembangunan atau rehabilitasi hanggar pengelolaan sampah Desa;
- h. Pengadaan alat pengolah sampah Desa;
- i. Pengadaan mobil angkut sampah Desa;
- j. Pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting;
- k. Bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah;



- l. Bantuan pensertifikatan tanah kas Desa;
- m. Bantuan operasional PAUD milik Desa;
- n. Bantuan operasional posyandu balita dan posyandu lansia;
- o. Bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita; dan
- p. Penyertaan modal BUMDes untuk pengembangan Kawasan perdesaan.

3.3.2. Realisasi

Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2024 memberikan bantuan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp83.877.845.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jenis bantuan keuangan terdiri atas Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, Pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani, Pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa, Pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier, Pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan, Pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air, Pembangunan atau rehabilitasi hanggar pengelolaan sampah Desa, Pengadaan alat pengolah sampah Desa, Pengadaan mobil angkut sampah Desa, Pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting, Bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah, Bantuan pensertifikatan tanah kas Desa, Bantuan operasional PAUD milik Desa, Bantuan operasional posyandu balita dan posyandu lansia, Bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita, dan Penyertaan modal BUMDes untuk pengembangan Kawasan perdesaan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada pemerintah desa sebesar Rp83.877.845.000,00 dengan realisasi keuangan Rp83.877.845.000,00 atau sebesar 100%.



Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Bidang Urusan	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan	750 Lokasi	83.877.845.000	83.877.845.000	100	750	100
2	Pariwisata	Desa Wisata	3 Desa	300.000.000	300.000.000	100	3	100
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	365 Unit	7.300.000.000	7.300.000.000	100	365	100
4	Kesehatan	Jambanisasi	1202 Lokasi	4.507.500.000	4.293.750.000	95,2579	1145	95,2579
				95.985.345.000	95.771.595.000	99,77		98,81

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2025



3.4. Permasalahan dan Kendala

Hambatan/permasalahan dalam tugas pembantuan adalah keterlambatan/mundurnya jadwal penetapan DIPA POK menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi mundur tidak sesuai perencanaan awal. Terlebih apabila terdapat perubahan (penambahan) DIPA di paruh terakhir tahun anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang terburu-buru sehingga ada kemungkinan untuk didapati komponen kegiatan yang tidak maksimal realisasi/output-nya.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

1. Proaktif dengan melakukan konsultasi ke Kementerian/Lembaga pemberi Tugas Pembantuan terkait perubahan anggaran DIPA;
2. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dengan melakukan monitoring secara intens. Untuk mengupayakan sisa waktu tahun anggaran pasca perubahan, dilakukan percepatan kegiatan dengan mensinergikan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan petani untuk mencapai target bersama.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024





BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)
- Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IPSPM) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IPSPM = \frac{(\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times BP)}{100}$$

Keterangan:

IPSPM	=	Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	2	3	4
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran target yang telah ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yaitu:

- Pendidikan PAUD
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya



sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.206 Orang	Setiap tahun	Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	27.154.161.952
					Angka partisipasi murni	100%	Setiap tahun	
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	82,53%	Setiap tahun	
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	76,39%	Setiap tahun	
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,5%	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	8,99%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,76%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	59,04%	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Proporsi PTK penggerak	7,48%	Setiap tahun	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	181417 Orang	Setiap tahun	SD			153.761.518.514
					Angka partisipasi kasar	100%	Setiap tahun	
					Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	
					Kemampuan literasi	69,89%	Setiap tahun	
					Kemampuan numerasi	55,06	Setiap tahun	
					Perbedaan Skor Literasi	4,17	Setiap tahun	
					Perbedaan Skor numerasi	1,85	Setiap tahun	
					Indeks keamanan iklim	78,23%	Setiap tahun	
					Indeks kebinekaan iklim	76,6%	Setiap tahun	
					Indeks inklusivitas iklim	63,16	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	8,99%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,38%	Setiap tahun	
					Proporsi PTK bersertifikat	37,97%	Setiap tahun	
					SMP			
					Angka partisipasi kasar	100%	Setiap tahun	
					Angka partisipasi sekolah	100%	Setiap tahun	
					Kemampuan literasi	79,85	Setiap tahun	
					Kemampuan numerasi	75,49	Setiap tahun	
					Perbedaan skor literasi	3,29	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perbedaan skor numerasi	1,54	Setiap tahun	
					Indeks keamanan iklim	75,84	Setiap tahun	
					Indeks kebhinekaan iklim	77,12	Setiap tahun	
					Indeks inklusivitas iklim	63,05	Setiap tahun	
					Kecukupan formasi guru ASN	2,81%	Setiap tahun	
					Indeks distribusi guru	0,37%	Setiap tahun	
					Proporsi bersertifikat PIK	50,14%	Setiap tahun	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7395 orang	Setiap tahun	Angka Partisipasi Sekolah	100%	Setiap tahun	7.604.966.569
					Kemampuan literasi	70,78	Setiap tahun	
					Kemampuan numerasi	57,03	Setiap tahun	
					Perbedaan skor literasi	5,27	Setiap tahun	
					Perbedaan skor numerasi	4,52	Setiap tahun	
					Indeks keamanan iklim	67,96	Setiap tahun	
					Indeks kebhinekaan iklim	62,26	Setiap tahun	
					Indeks inklusivitas iklim	54,98	Setiap tahun	
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya								23.881.312.024
Jumlah								212.401.959.059

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia menjadi salah satu upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan menjadi empat negara besar ekonomi dunia



pada 2045. Namun, secara holistik, pemerintah daerah masih memiliki tantangan dalam mengidentifikasi dan merefleksikan capaian kualitas pendidikan di daerah dan belum ada solusi pembenahan yang nyata. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merilis Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 untuk membantu pemerintah daerah mengevaluasi kualitas pendidikan di daerahnya secara detail, sehingga dapat membantu melakukan perencanaan berbasis data dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Rapor Pendidikan Daerah versi 2.0 ini menunjukkan indikator utama yang digunakan untuk mengukur indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau skor capaian pendidikan.

SPM Pendidikan ini dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Rapor Pendidikan adalah platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan, terutama data Asesmen Nasional (AN), sehingga menjadi alat ukur komprehensif yang menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mendorong refleksi dan perbaikan mutu pendidikan. AN dapat memotret kualitas hasil belajar, proses, serta lingkungan belajar sebagai refleksi kondisi mutu layanan pendidikan. AN mengukur instrumen kunci seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), dan Survei Karakter untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga instrumen tersebut menjadi kompetensi dasar untuk mendorong pembelajar sepanjang hayat, berkontribusi pada masyarakat, serta mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Di samping itu, Sulingjar dapat menjadi dasar dalam mendiagnosis tantangan di satuan pendidikan dan merencanakan pembenahan.

4.1.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	38.206	33.643	88,06	27.154.161.952	25.970.460757	95,64
2.	Pendidikan Dasar	181.417	167.417	92,28	153.761.518.514	150.157.462.851	97,66
3.	Pendidikan Kesenjangan	7.395	7.395	100	7.604.966.569	7.038.147.396	92,55
					21.812.162.024	20.754.178.818	91,15
					2.069.150.000	1.172.565.397	56,67



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah				94,04	212.401.959.059	205.092.815.219	96.56

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pendidikan mencapai 96,56%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan penghitungan per jenis pelayanan dasar berikut ini.

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.4.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	38.206	33.643	88.06	70.45
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Angka partisipasi sekolah	100%	90,08%	90,08	18.02%
2.	Angka partisipasi murni	100%	88,63%	88,63	17.73%
3..	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	82,53%	82,5%	99,96	19.99%
4.	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	76,39%	75,39%	98,69	19.74%
5.	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	3,5%	3,5%	100	20.00%
6.	Indeks distribusi guru	8,99%	8,99%	100	20.00%
7.	Proporsi PTK bersertifikat	0,76%	0,76%	100	20.00%
8.	Proporsi PTK penggerak	59,04%	59,04%	100	20.00%
9.	Pengalaman pelatihan guru	7,48%	7,48%	100	20.00%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,50

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Penerima Layanan Dasar Anak Usia Dini dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk usia 5-6 berjumlah 38.206 jiwa sedangkan yang terlayani 33.643 jiwa (88,06%), dapat diartikan sejumlah 4.563 jiwa (11,94%) penduduk Kabupaten Magelang usia 5-6 belum terlayani dikarenakan minat masyarakat/kesadaran masyarakat



untuk memasukan putra putrinya ke Lembaga PAUD masih kurang, selain itu juga disebabkan karena faktor ekonomi, Terkait Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Anak Usia Dini proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B terealisasi 82.5% dari target 82.53% atau mencapai 99,96 dari target di Tahun 2024. Sedangkan untuk kualitas tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV terealisasi 75.39% dari target 76.39 atau mencapai 98,69% dari target di tahun 2024, hal itu dikarenakan masih banyak yang sedang menyelesaikan pendidikan S1 nya.

b. Pendidikan Dasar

Tabel 4.5.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Dasar Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Dasar	181.417	167.417	92.28	73.83
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	SD				
1.	Angka Partisipasi Kasar	100%	91,94%	91,94	18.39%
2.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	99,53%	99,53	19.91%
3.	Kemampuan literasi	69,89%	68,06%	97,38	19.48%
4.	Kemampuan numerasi	55,06%	53,18%	100	19.32%
5.	Perbedaan Skor Literasi	4,17%	4,17%	100	20.00%
6.	Perbedaan Skor numerasi	1,85%	1,85%	100	20.00%
7.	Indeks iklim keamanan	78,23%	75,01%	96,26	19.18%
8.	Indeks iklim kebhinekaan	76,6%	76,1%	99,35	19.87%
9.	Indeks iklim inklusivitas	63,16%	57,95%	100	18.35%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	8,99%	8,99%	100	20.00%
11.	Indeks distribusi guru	0,38%	0,38%	100	20.00%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	37,97%	37,97%	100	20.00%
	SMP				
1.	Angka Partisipasi Kasar	100%	106.03%	100	20.00%
2.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	95,43%	95,43	19.09%
3.	Kemampuan literasi	79,85%	78.64 %	98.4	19.70%
4.	Kemampuan numerasi	75,49%	68.79%	91.12	18.22%
5.	Perbedaan skor literasi	3,29%	3.29%	100	20.00%
6.	Perbedaan skor numerasi	1,54%	1.54%	100	20.00%
7.	Indeks iklim keamanan	75,84%	71.17%	93.84	18.77%
8.	Indeks iklim kebinekaan	77,12%	74.53%	96.64	19.33%
9.	Indeks iklim inklusivitas	63,05%	59.13%	93.78	18.76%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	2,81%	2.81%	100	20.00%
11.	Indeks distribusi guru	0,37%	0,37%	100	20.00%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	50,14%	50.14%	100	20.00%
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,49

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Pendidikan Dasar dapat kita lihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (SD) mencapai 99,53% dimana dapat diartikan anak usia 7-12 tahun yang tidak terlayani sebesar 0,47% dan Angka Partisipasi Sekolah (SMP) mencapai 95.43% dimana dapat diartikan bahwa anak usia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan/tidak terlayani sebesar 4.57%. Penduduk Kabupaten Magelang usia sekolah baik 7-12 maupun 13-15 tahun belum terlayani dikarenakan berbagai hal seperti sosial budaya, pekerja anak, faktor ekonomi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan atau masuk ke pondok pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan formal/nonformal.

Untuk Indeks Pencapaian Mutu kemampuan Literasi SD untuk tahun 2024 ini sudah mencapai kriteria baik, artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Dari target Nilai 69.89 telah mencapai nilai 68.06 atau capaian sudah 97.38%. Demikian juga untuk Kemampuan Numerasi SD walaupun capaiannya lebih rendah dari literasi membaca untuk itu perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum dari nilai target 55.06 telah tercapai nilai 53.18.

Untuk Indeks Pencapaian Mutu kemampuan Literasi SMP untuk tahun 2024 ini sudah mencapai kriteria baik, artinya sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Dari target Nilai 79.85 telah mencapai nilai 78.64 atau capaian sudah 98.48%. Sedangkan Kemampuan Numerasi SMP capaiannya masih rendah dibandingkan Literasi membaca yaitu 68.79 dari target nilai 75,49 atau capaian baru mencapai 91.12% dari target 2024.

c. Pendidikan Kesenjangan

Tabel 4.6.
Indeks Pencapaian Target SPM Pendidikan Kesenjangan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1.	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Kesenjangan	7.395	7.395	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1.	2	3	4	5	6
1.	Angka Partisipasi Sekolah	100%	22,24%	22.24	4.45%
2.	Kemampuan literasi	70,78%	70,78%	100	20.00%



3.	Kemampuan numerasi	57.03%	57,03%	100	20.00%
4.	Perbedaan skor literasi	5.27%	5,27%	100	20.00%
5.	Perbedaan skor numerasi	4.52%	4,52%	100	20.00%
6.	Indeks iklim keamanan	67.96%	67,96%	100	20.00%
7.	Indeks iklim kebinekaan	62.26%	62,26%	100	20.00%
8.	Indeks iklim inklusivitas	54.98%	54,98%	100	20.00%
Total Indeks Mutu Pelayanan Kesetaraan					18.06

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Pendidikan Kesetaraan tercapai 100%, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk usia 7 sampai 18 tahun yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan sudah terlayani semua yaitu sebesar 7.395 sehingga bisa dikatakan tercapai 100%. Terkait dengan Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar Pendidikan kesetaraan Kemampuan literasi mencapai nilai 70.78 dan Kemampuan Numerasi mencapai nilai 57.03.

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7.
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	70,45	19,50	89,95	Tuntas Madya
2.	Pendidikan Dasar	73,83	19,49	93,32	Tuntas Utama
3.	Pendidikan Kesetaraan	80,00	18,06	98,06	Tuntas Utama
BIDANG URUSAN PENDIDIKAN				93,78	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 93,78 dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 90.

Capaian kinerja bidang urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024 belum mencapai target SPM 100%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Masih terdapat anak tidak sekolah umur 5 sampai dengan 18 tahun baik yang masuk kategori belum pernah sekolah, *drop out* maupun lulus tidak melanjutkan.
- Masih terdapat Pendidik di jenjang PAUD yang belum berkualifikasi D4/S1.
- Masih minimnya guru penggerak di Kabupaten Magelang.
- Belum optimalnya pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data.



4.1.4. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM bidang urusan Pendidikan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 4.8.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	9.207.431.952	0	17.946.730.000	0
2.	Pendidikan Dasar	10.566.460.608	0	143.195.057.906	0
3.	Pendidikan Kesetaraan	636.164.569	0	6.968.802.000	0
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.812.162.024	0	0	0
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.069.150.000			
Jumlah		44.291.369.153	0	168.110.589.906	0

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp212.401.959.059,00. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pendidikan pada tahun 2024 berasal dari APBD dan DAK, baik DAK Fisik maupun Non Fisik.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan meliputi:



Tabel 4.9.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)	233
2.	Strata 1/D4 (S1)	8.488
3.	Diploma 3 (D3)	163
5.	Diploma 2 (D2)	137
6.	Diploma 1 (D1)	50
7.	SMA	1.800
8.	SMP	197
9.	SD	127
10.	Lainnya	250
Jumlah		11.447

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan sebanyak 11.447 orang terdiri dari personil pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dan satuan pendidikan serta dukungan Pemerintah dan juga tak bisa lepas dari dukungan masyarakat.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi dan numerasi belum tersedia di <i>platform</i> Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, misalnya Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi, Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional dsb	Pengisian Form. A.1.9 menunggu tersedia data di rapor pendidikan
		Nomenklatur sub kegiatan pada lampiran 1.B.2 belum sesuai dengan Nomenklatur SIPD	Mohon Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi Penyesuaian Nomenklatur sub kegiatan



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
			lampiran 1.B.2 agar sesuai dengan nomenklatur sub kegiatan pada SIPD RI
		SPM Bidang Pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kemenag, sementara data untuk rincian kegiatan dan anggaran SPM di input dan dilaporkan baru data dari Disdikbud. Rincian kegiatan dan anggaran di aplikasi SPM sdh sesuai SIPD, namun Nomenklatur sub kegiatan pada lampiran 1.C.2 belum sesuai dengan Nomenklatur SIPD	Apabila memungkinkan Tim SPM juga melibatkan dari Kantor Kemenag dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi dalam Aplikasi untuk anggaran SPM dari Kantor Kemenag dan juga memfasilitasi Penyesuaian Nomenklatur sub kegiatan lampiran 1.C.2 agar sesuai dengan nomenklatur sub kegiatan pada SIPD RI
		Data Pendataan Sheet 1.A.9 belum tersedia di rapor pendidikan	Mohon Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi menyediakan data tersebut melalui rapor pendidikan
2.	Eksternal	Pendidikan Jenjang PAUD, SD dan SMP yang sederajat di Kabupaten Magelang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan Kantor Kemenag (di bawah Kementerian Agama)	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama
		SPM Bidang Urusan Pendidikan melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Kemenag, sementara data untuk perencanaan dan penganggaran yang dilaporkan baru data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama
		Pemahaman/Persepsi tentang pengisian aplikasi SPM masih bervariasi antar Kab/Kota	Dinas Pendidikan Provinsi/BBPMP untuk memfasilitasi pelatihan pengisian aplikasi SPM agar tiap Kab/Kota mempunyai pemahaman/persepsi yang sama dalam pengisian Aplikasi SPM
		Masih banyak Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Magelang, sehingga capaian partisipasi sekolah belum maksimal	Penanganan Anak Tidak Sekolah yang didukung oleh semua pihak

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;



- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Bidang Kesehatan ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	14.391	Setiap tahun	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14.391	Setiap tahun	2.000.858.918
					Tablet tambah darah	2.590,380	Setiap tahun	
					Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	14.391	Setiap tahun	
					Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	14.391	Setiap tahun	
					Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Colongan Darah	14.391	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	14.391	Setiap tahun	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	14.391	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.391	Setiap tahun	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	617	Setiap tahun	
					Gel USG	1.481	Setiap Tahun	
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekolog	301	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	14.391	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	13.731	Setiap tahun	Formulir Partograf	13.731	Setiap tahun	672.491.129
					Kartu ibu/rekam medis ibu	13.731	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.731	Setiap tahun	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	301	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	13.193	sr	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	13.193	Setiap tahun	847.030.888
					Vitamin K1 injeksi	13.193	Setiap tahun	
					Salap/tetes mata antibiotik	13.193	Setiap tahun	
					Formulir bayi baru lahir	13.193	Setiap tahun	
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	39.576	Setiap tahun	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.193	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	301	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	14.081	Setiap tahun	
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	75.002	Setiap tahun	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	15.730	Setiap tahun	45.842.640
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	75.002	Setiap tahun	
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	75.002	Setiap tahun	
					Vitamin A Biru	11.623	Setiap tahun	
					Vitamin A Merah	63.957	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	16.462	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	70.458	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	34.876	Setiap	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	52.689	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	17.897	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	19.895	Setiap tahun	
					Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	19.895	Setiap tahun	
					Arum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	232.172	Setiap tahun	
					Peralatan Anafilaktik	29	Setiap tahun	
					Formula Terapi Gizi Buruk	12	Setiap tahun	
					Tenaga medis: Dokter	289	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Guru PAUD	2.258	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	14.081	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	169.354	Setiap tahun	Form pencatatan/buku rapor kesehatan	169.354	Setiap tahun	383.420.540
					Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	1.416	Setiap tahun	
					Kuesioner skrining kesehatan	169.354	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1.508	Setiap tahun	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	60	Setiap tahun	
					Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	154.685	Setiap tahun	
					Alat Pemeriksaan Hb	67	Setiap tahun	
					Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	8.786	Setiap tahun	
					Media promosi kesehatan	29	Setiap tahun	
					Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	18.203	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	390	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga Kesehatan : Masyarakat	76	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	7.493	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	314	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	639.284	Setiap tahun	Media promosi Komunikasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	107.767.385
					Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	323	Setiap tahun	
					Alat : Tensimeter	323	Setiap tahun	
					Alat : Glukometer	323	Setiap tahun	
					Alat: Alat Pemeriksa Hb	29	Setiap tahun	
					Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	639.284	Setiap tahun	
					Alat : KIT IVA Tes	29	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	29	Setiap tahun	
					Kit Ophthalmologi Komunitas	29	Setiap tahun	
					Kuesioner PUMA	580	Setiap tahun	
					Alat Pelayanan KB	60	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	29	Setiap tahun	
					Vaksin Tetanus Difteri (td)	225.134	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	289	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.166	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	4937	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	172.603	Setiap tahun	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	372	Setiap tahun	45.811.560
					Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	460	Setiap tahun	
					Alat pemeriksaan kolesterol	407	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Bahan medis Habis Pakal: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	172.603	Setiap tahun	
					Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	172.603	Setiap tahun	
					Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	172.603	Setiap tahun	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter	289	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	Setiap tahun	
					Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14.081	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	190.548	Setiap tahun	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	58	Setiap tahun	50.278.904
					Obat Hipertensi	2.286.576	Setiap tahun	
					Tensimeter	29	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	29	Setiap tahun	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	289	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	36	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	Setiap tahun	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	20.400	Setiap tahun	Obat Diabetes Melitus	244.800	Setiap tahun	2.077.999.738
					Fotometer atau Glukometer	29	Setiap tahun	
					BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	20.400	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia) Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	29	Setiap tahun	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	289	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	132	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.463	Setiap tahun	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDG) III atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	29	Setiap tahun	42.224.759
					Penyediaan Psikofarmaka	5	Setiap tahun	
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	29	Setiap tahun	
					Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	29	Setiap tahun	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter	289	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	3	Setiap tahun	
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	29	Setiap tahun	
					Tenaga profesional lainnya	5	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	11.024	Setiap tahun	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	1.006.776.143
					Reagen Zn TB	20	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Masker bedah dan Masker N95	518	Setiap tahun	
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol, Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	119	Setiap tahun	
					Katrid tes cepat molekuler	7200	Setiap tahun	
					Formulir pencatatan dan pelaporan	34	Setiap tahun	
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	34	Setiap tahun	
					Tuberkulin	143	Setiap tahun	
					Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	292	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Analis Teknik	132	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Laboratorium Medik (ATLM)			
					Tenaga kesehatan : Radiografer	35	Setiap tahun	
					Kader Kesehatan	58	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	18.397	Setiap tahun	Media promosi Komunikasi dan Edukasi (KIE)	29	Setiap tahun	345.062.941
					Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	18.397	Setiap tahun	
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18.397	Setiap tahun	
					Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	29	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	310	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Bidan	749	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	Setiap tahun	
					Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	132	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	76	Setiap tahun	
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	29	Setiap tahun	
Jumlah								7.625.565.545

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

4.2.3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.12.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Indeks Pencapaian SPM	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.391	13.443	93,67%	2.000.858.918	1.968.537.552	98,38%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.731	13.212	96,72%	672.491.129	649.745.868	96,62%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.193	13.193	99,98%	847.030.888	484.059.756	57,15%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	75.002	75.002	99,96%	45.842.640	41.521.187	90,57%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	169.354	169.354	98,87%	383.420.540	325.119.940	84,79%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	639.284	639.284	100%	107.767.385	100.712.662	93,45%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	172.603	172.603	98,19%	45.811.560	41.876.448	91,41%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Indeks Pencapaian SPM	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	190.548	190.548	100%	50.278.904	47.323.676	94,12%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.400	20.400	100%	2.077.999.738	2.076.553.500	99,93%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.463	2.463	100%	42.224.759	40.699.675	96,39%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.024	11.024	100%	1.006.776.143	970.751.731	96,42%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	18.397	18.088	98,66%	345.062.941	328.475.441	95,19%
	Jumlah			98,84%	7.625.565.545	7.075.377.436	92,78%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan pada SPM Bidang Urusan Kesehatan mencapai 98,84%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 4.13.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.391	13.443	93,41	74,73
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	14.391	14.114	98,08	19,61
2.	Tablet tambah darah	2.590.380	1.124.786	43,42	8,68
3.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	14.391	14.004	97,31	19,46
4.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	14.391	14.024	97,45	19,49



5.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	14.391	14.024	97,45	19,49
6.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	14.391	14.008	97,34	19,46
7.	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	14.391	14.114	98,08	19,61
8.	Kartu ibu/rekam medis ibu	14.391	14.024	97,45	19,49
9.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	14.391	14.024	97,45	19,49
10.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	617	617	100	20,00
11.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	1.481	1.481	100	20,00
12.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	301	301	100	20,00
13.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	1.116	1.116	100	20,00
14.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	749	749	100	20,00
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
16.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
17.	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	14.391	12.416	86,28	17,25
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,94

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebanyak 13.443 orang (93,41%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 14.391 orang. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil belum mencapai 100% karena beberapa ibu hamil yang pada bulan desember masih belum saatnya K4 dan ada ibu hamil yang abortus.


b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 4.14.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	13.731	13.212	96,22	76,98
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Formulir Partograf	13.731	13.212	96,22	19,24
2.	Kartu ibu (rekam medis)	13.731	13.212	96,22	19,24
3.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	13.731	13.212	96,22	19,24
4.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
5.	Tenaga Medis : Dokter/Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	301	301	100	20,00
6.	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	749	749	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	1.116	1.116	100	20,00
8.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Cizi	70	70	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebanyak 13.212 orang (96.22%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 13.731 orang. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin belum mencapai 100% disebabkan persalinan yang ke empat dan seterusnya bisa menyebabkan proses persalinan cepat sehingga bayi sudah lahir sebelum ibu hamil datang ke fasyankes. Persalinan yang maju dan mundur dari perkiraan persalinan juga dapat menyebabkan bayi lahir tidak di fasyankes.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 4.15.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.193	13.193	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	13.193	13.193	100	20,00
2.	Vitamin K1 injeksi	13.193	13.130	99,52	19,90
3.	Salep/tetes mata antibiotik	13.193	13.130	99,52	19,90
4.	Formulir bayi baru lahir	13.193	13.193	100	20,00
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	39.576	39.483	99,77	19,95
6.	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.193	13.193	100	20,00
7.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
8.	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	301	301	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Bidan	749	749	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	1.116	100	20,00
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	36	36	100	20,00
13.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
14.	Kader Kesehatan	14.081	14.081	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebanyak 13.193 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 13.193 orang.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 4.16.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Balita



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Balita	75.002	75.002	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	15.730	15.730	100	20,00
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	75.002	72.021	96,03	19,20
3.	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	75.002	75.002	100	20,00
4.	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	11.623	11.623	100	20,00
5.	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	63.957	63.957	100	20,00
6.	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	16.462	16.462	100	20,00
7.	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio Tetes	70.458	70.458	100	20,00
8.	Vaksin imunisasi dasar: IPV	34.876	34.876	100	20,00
9.	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	52.689	52.689	100	20,00
10.	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	17.897	17.897	100	20,00
11.	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	19.895	19.895	100	20,00
12.	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	19.895	19.895	100	20,00
13.	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	232.172	232.172	100	20,00
14.	Peralatan Anafilaktik	29	29	100	20,00
15.	Formula Terapi Gizi Buruk	12	12	10	20,00
16.	Tenaga kesehatan : Dokter	289	289	100	20,00
17.	Tenaga kesehatan : Bidan	749	749	100	20,00
18.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	1.116	100	20,00
19.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
20.	Guru PAUD	2.258	2.258	100	20,00
21.	Kader Kesehatan	14.081	14.081	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					19,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Balita sebanyak 75.002 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 75.002 orang.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 4.17.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	169.354	169.354	100%	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

1	2	3	4	5	6
1.	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	169.354	715	0,42	0,08
2.	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	1.416	1.416	100	20,00
3.	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	169.354	169.354	100	20,00
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	1.508	1.508	100	20,00
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	60	60	100	20,00
6.	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi Kabupaten/kota)	154.685	154.685	100	20,00
7.	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	67	67	100	20,00
8.	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	8.786	8.786	100	20,00
9.	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	29	29	100	20,00
10.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	18.203	17.838	97,99	19,59
11.	Tenaga Kesehatan ; Dokter/Dokter gigi	390	390	100	20,00
12.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	749	749	100	20,00
13.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	1.116	1.116	100	20,00
14.	Tenaga Kesehatan ; Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
15.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
16.	Tenaga Kesehatan ; Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00
17.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	7.493	7.493	100	20,00
18.	Tenaga Kesehatan ; Kader Kesehatan	314	314	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					18,87

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025



Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 169.354 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 169.354 orang.

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Tabel 4.18.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	639.284	639.284	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
2.	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	323	323	100	20,00
3.	Alat : Tensimeter	323	323	100	20,00
4.	Alat : Glukometer	323	323	100	20,00
5.	Alat: Alat Pemeriksa Hb	29	29	100	20,00
6.	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	639.284	639.284	100	20,00
7.	Alat : KIT IVA Tes	29	29	100	20,00
8.	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	29	29	100	20,00
9.	Kit Ophthalmologi Komunitas	29	29	100	20,00
10.	Kuesioner PLIMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	580	580	100	20,00
11.	Alat Pelayanan KB	60	60	100	20,00
12.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	29	29	100	20,00
13.	Vaksin Tetanus Difteri (td)	225.134	225.134	100	
14.	Tenaga kesehatan : Dokter	289	289	100	20,00
15.	Tenaga kesehatan : Bidan	749	749	100	20,00
16.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.166	1.166	100	20,00
17.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
18.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00



19.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	4.937	4.937	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sebanyak 639.284 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 639.284 orang.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Tabel 4.19.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	172.603	172.603	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	372	372	100	20,00
2.	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	460	460	100	20,00
3.	Alat pemeriksaan kolesterol	407	407	100	20,00
4.	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	172.603	160.461	92,97	18,59
5.	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	172.603	153.667	89,03	17,80
6.	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	172.603	1.000	0,58	0,11
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
8.	Tenaga Kesehatan ; Dokter	289	289	100	20,00
9.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	749	749	100	20,00
10.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	1.116	1.116	100	20,00



11.	Tenaga Kesehatan ; Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00
13.	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	14.081	14.081	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut sebanyak 172.603 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 172.603 orang.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 4.20.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	190.548	190.548	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	58	58	100	20,00
2.	Obat Hipertensi	2.286.576	2.286.576	100	20,00
3.	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	29	29	100	20,00
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	29	29	100	20,00
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	29	29	100	20,00
6.	Tenaga Kesehatan ; Dokter	289	289	100	20,00
7.	Tenaga Kesehatan ; Bidan	749	749	100	20,00
8.	Tenaga Kesehatan ; Perawat	1.116	1.116	100	20,00



9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	36	36	100	20,00
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebanyak 190.548 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 190.548 orang.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 4.21.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes Melitus

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	20.400	20.400	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Obat Diabetes Melitus	244.800	244.800	100	20,00
2.	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	29	29	100	20,00
3.	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	20.400	20.400	100	20,00
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK	29	29	100	20,00



	(Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)				
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	29	29	100	20,00
6.	Tenaga kesehatan : Dokter	289	289	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Bidan	749	749	100	20,00
8.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	1.116	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	70	70	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	132	132	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebanyak 20.400 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 20.400 orang.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 4.22.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2.463	2.463	100	80,00



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	29	29	100	20,00
2.	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	5	5	100	20,00
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	29	29	100	20,00
4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	29	29	100	20,00
5.	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
6.	Tenaga kesehatan : Dokter	289	289	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	3	3	100	20,00
8.	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	29	29	100	20,00
9.	Tenaga profesional lainnya	5	5	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebanyak 2.463 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 2.463 orang.



k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 4.23.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan
Orang Terduga Tuberkulosis

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.024	11.024	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
2.	Reagen Zn TB	20	20	100	20,00
3.	Masker bedah dan Masker N95	518	518	100	20,00
4.	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	119	119	100	20,00
5.	Katrid tes cepat molekuler	7.200	7.200	100	20,00
6.	Formulir pencatatan dan pelaporan	34	34	100	20,00
7.	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	34	34	100	20,00
8.	Tuberkulin	143	143	100	20,00
9.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	292	292	100	20,00
10.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	1.116	100	20,00
11.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	457	457	100	20,00
12.	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	76	76	100	20,00
13.	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	132	132	100	20,00
14.	Tenaga kesehatan : Radiografer	35	35	100	20,00
15.	Kader Kesehatan	58	58	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas capaian SPM Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebanyak 11.024 orang (100%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 11.024 orang. Hal ini dapat tercapai salah satunya karena adanya peran aktif kader TBC yang sangat membantu Puskesmas dalam penemuan orang terduga TBC secara aktif di masyarakat.



I. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Tabel 4.24.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	18.397	18.088	98,32	78,66
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	29	29	100	20,00
2.	Tes cepat HIV (RDT) pertama	18.397	18.397	100	20,00
3.	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18.397	18.397	100	20,00
4.	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	29	29	100	20,00
5.	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	310	310	100	20,00
6.	Tenaga kesehatan : Bidan	749	749	100	20,00
7.	Tenaga kesehatan : Perawat	1.116	1.116	100	20,00
8.	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	132	132	100	20,00
9.	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	76	76	100	20,00
10.	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	29	29	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah orang yang terlayani Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebanyak 18.088 orang (98,32%) dari total jumlah orang yang harus dilayani sebanyak 18.397 orang. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV belum mencapai 100% disebabkan sulitnya menjangkau populasi kunci (LSL, WPS, Waria).



Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.25.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	74,73	18,94	93,67	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	76,98	19,75	96,72	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80,00	19,98	99,98	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	80,00	19,96	99,96	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80,00	18,87	98,87	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80,00	18,19	98,19	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	78,66	20,00	98,66	Tuntas Utama
BIDANG URLISAN KESEHATAN				98,84	TUNTAS UTAMA

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 98,84% dengan kategori TUNTAS UTAMA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan dengan mutu minimal dan



penerima layanan dasar telah berada di atas nilai 90%. Capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 89,55%.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Kesehatan berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 4.26.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD DAI	APBD DAK	APBD DBHCHT	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	92.824.286	1.908.034.632	0	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	56.800.880	615.690.249	0	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	153.498.888	165.472.000	528.060.000	0
4	Pelayanan kesehatan balita	45.842.640	0	0	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	41.670.100	341.750.440	0	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	107.767.385	0	0	0
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	45.811.560	0	0	0
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	50.278.904	0	0	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	55.404.600	2.022.595.138	0	0
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	42.224.759	0	0	0
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	118.248.049	888.528.094	0	0
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	137.432.941	207.630.000	0	0
Jumlah		947.804.992	6.149.700.553	528.060.000	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp7.625.565.545,00. Sumber anggaran untuk penerapan



dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Kesehatan pada tahun 2024 berasal dari APBD DAU, APBD DAK, dan APBD DBHCHT.

4.2.5. Dukungan Personil

Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Adapun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

Tabel 4.27.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Dokter	289
2.	Dokter Gigi	101
3	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	12
3.	Dokter Spesialis Anak	12
4.	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	5
5.	Dokter Spesialis Paru	3
6.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	18
7.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	3
8.	Bidan	749
9.	Perawat	1.116
10.	Tenaga Kefarmasian	457
11.	Tenaga Gizi	70
12.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	36
13.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	76
14.	Tenaga Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	132
15.	Radiografer	35
Jumlah		3.114

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan sebanyak 3.114.



4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	1. Pengadaan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan (buku rapor kesehatanku dan buku kesehatan lansia)	1. Pengadaan pada tahun selanjutnya
2.	Eksternal	1. Ibu Hamil pada bulan desember masih Belum saatnya K4 dan ada ibu hamil yang abortus	1. Peningkatan kualitas ANC dan pelaksanaan deteksi dini resiko ibu hamil
		2. Persalinan yang ke 4 dan seterusnya bisa menyebabkan proses persalinan cepat sehingga belum sampai fasyankes, persalinan mundur dari perkiraan persalinan, ibu hamil yang belum masanya bersalin	2. Meningkatkan Pemantauan Wilayah setempat (PWS) ibu hamil
		3. Adanya kelompok penolakan imunisasi	3. Melakukan pendekatan kelompok penolak imunisasi melalui tokoh agama
		4. Sulitnya menjangkau populasi kunci (LSL, WPS, Waria)	4. Bekerjasama dengan LSM Kalandara untuk dapat lebih mudah menjangkau populasi kunci

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Bidang Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.



4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Target pencapaian indikator SPM Bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang pada tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.29.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	12.452	Setiap tahun	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	3.133	Setiap tahun	17,285,747,503
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau)	3.133	Setiap tahun	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1	Setiap tahun	
					Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau)	1	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.940	Setiap tahun	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	985	Setiap tahun	10,301,809,582
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	323	Setiap tahun	
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	662	Setiap tahun	
Jumlah								33,487,557,085

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

4.3.3. Realisasi

Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 4.30.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	12.452	12.452	100	17.285.747.503	17.261.683.124	99,86
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	3.940	3.940	100	10,301,809,582	10,285,097,896	99,84
	JUMLAH			100	33.487.557.085	33.446.781.020	99,88

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum mencapai 99,88%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan penghitungan per jenis pelayanan dasar berikut ini.

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 4.31.
Indeks Pencapaian Target SPM
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	12.452	12.452	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	3.133	3.133	100	20,00
2.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	3.133	3.133	100	20,00



3.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1	0	100	20,00
4.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	1	0	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari tercapai 100% dan selanjutnya dapat dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM).

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 4.32.
Indeks Pencapaian Target SPM
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	3.940	3.940	100	80
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	985	985	100	20,00
2.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	323	323	100	20,00
3.	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan	662	662	100	20,00



bawah menggunakan dapat tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar				20,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Indeks Pencapaian Target SPM Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari tercapai 100% dan selanjutnya dapat dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM).

Berdasarkan tabel-tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.33.
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 100 dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM 100. Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dengan capaian sebesar 93,61%. Hal tersebut dikarenakan adanya evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait perhitungan capaian SPM sehingga pada tahun 2024 ini didapatkan capaian SPM sebesar 100.



4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.34.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1,822,778,503	2.400.000.000	15,462,969,000	0
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	144,705,582	3.500.000.000	10,157,104,000	0
Jumlah		1,967,484,085	5.900.000.000	25,620,073,000	0

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp33,487,557,085,00. Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2024 berasal dari anggaran APBD, APBN, dan DAK .

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka didukung oleh personil-personil yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun personil yang terlibat yakni:

Tabel 4.35.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	
	PNS	7
	P3K	2
	Tenaga Kontrak	24
Jumlah		33
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
	PNS	7
	P3K	2
	Tenaga Kontrak	14
Jumlah		22

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum layanan air minum sebanyak 33 orang dan layanan air limbah domestik sebanyak 22 orang.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.36.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Pengadaan Tanah IPLT dihentikan pada Tahun 2024 sehingga menyebabkan Pekerjaan Pembangunan IPLT belum bisa dilaksanakan di Tahun 2026. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah anggaran DAK SANITASI yang didapatkan Tahun 2026. Pembangunan IPLT sangat berpengaruh pada capaian sanitasi aman dan anggaran DAK SANITASI berpengaruh pada kinerja layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Mengusulkan kembali pengadaan tanah dan pembangunan IPLT.
2.	Eksternal	Adanya pertentangan dalam pengadaan tanah dan pembangunan IPLT dari pihak luar pada tahun 2024 sehingga pengadaan tanah terhambat dan bisa menyebabkan tidak turunnya DAK Sanitasi TA.2026 pada Kab.Magelang dan berpengaruh pada kinerja layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Mencari dan Mensosialisasikan pengadaan tanah dan pembangunan IPLT kembali pada masyarakat sekitar calon lokasi IPLT.

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025



Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis layanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, salah satu indikator pencapaiannya adalah Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT). Pada saat ini Kabupaten Magelang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Dalam pelayanan sanitasi, keberadaan IPLT sebenarnya adalah wajib untuk mewujudkan sanitasi yang layak dan aman. Sesuai dengan standar teknis sanitasi layak dan aman adalah bahwa sarana sanitasi harus dilengkapi dengan *septic tank* yang kedap, dan harus dilakukan penyedotan secara terjadwal yang kemudian dibuang ke IPLT untuk diolah. Sehingga IPLT menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi Kabupaten Magelang.

Upaya untuk mewujudkan IPLT di Kabupaten Magelang sudah cukup lama namun banyak kendala yang menyebabkan belum terealisasi sampai saat ini. *Readiness Criteria* sudah disusun baik berupa *masterplan* air limbah maupun FS untuk lokasi IPLT. Bahkan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah IPLT. Namun dinamika proses perencanaan yang panjang kemudian menyebabkan pengadaan tanah IPLT tersebut belum berhasil dilaksanakan. Diharapkan para pemangku kepentingan dari semua Perangkat Daerah terkait mengerti kendala-kendala yang dihadapi dan selanjutnya dapat ikut mengawal agar pembangunan air minum dan sanitasi Kabupaten Magelang akan terwujud sesuai kondisi ideal yang diharapkan.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.37.

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	18	Setiap tahun	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	17	Setiap tahun	49,777,270
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	2	Setiap tahun	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	2	Setiap tahun	221,966,628
Jumlah								271,743,898

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2024

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 271,743,898,00.

4.4.3. Realisasi

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.38.

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2	2	100	221.966.628	123.670.625	55,72



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18	18	100	49.777.270	30,197,584	60,67
				100	271.743.898	153.868.209	56,62

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Perumahan rakyat mencapai 56,62%. Untuk mengukur tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan penghitungan berikut ini.

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.39.

Indeks Pencapaian Target SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	18	18		80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	17	17	100	20,00
2.	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Rehabilitasi rumah bagi korban bencana dilakukan menggunakan dana Bantuan Tidak Terencana yang dianggarkan pada BPPKAD, sedangkan untuk Pembangunan Kembali seharusnya dianggarkan secara tersendiri menggunakan anggaran pada DPRKP, namun karena mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak dan kesediaan dari korban bencana untuk menerima bantuan senilai maksimal untuk kerusakan berat, maka diberikan bantuan dari anggaran yang sama yaitu BTT dan dianggap sebagai rehab berat dengan mendapatkan bantuan maksimal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021



tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.40.
Indeks Pencapaian Target SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	2	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	2	2	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni diberikan kepada 2 Kepala Keluarga yang mengalami musibah Banjir Bandang di Dusun Nalan 3, Desa Kenalan, Kecamatan Borobudur pada Tahun 2022, dikarenakan rumah yang terkena bencana tersebut berada di daerah aliran banjir bandang maka kemudian direlokasi di daerah yang aman

1. Rumah Sri Isah di relokasi di Dusun Sembir Desa Bigaran Kecamatan Borobudur
2. Rumah Kabito di relokasi di Dusun Nalan 2 Desa Kenalan Kecamatan Borobudur.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung capaian Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IPSPM), sebagaimana pada tabel berikut ini:



Tabel 4.41.
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80	20	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, sama dengan 100.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 4.42.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	49.777.270	0	0	0
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	221.966.628	0	0	0



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
Jumlah		271.743.898	0	0	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024 sejumlah total Rp 271.743.898,00 dengan rincian:

1. Anggaran Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sejumlah Rp 49.777.270,00;
2. Anggaran Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sejumlah Rp 221.966.628,00.

Selain berkoordinasi dengan BPBD terkait penanganan pasca bencana tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga melakukan koordinasi dan ikut membantu penanganan bencana lainnya. Adapun pendanaan jenis layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Magelang Tahun 2024 melalui dana BTT BPPKAD.

4.4.5. Dukungan Personil

Proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Seksi Pengembangan Perumahan pada Bidang Perumahan dan didukung oleh personil-personil Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

Tabel 4.43.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Strata 2 (S2)	3
2.	Strata 1 (S1)	3
3.	SM Non. AK	0
4.	SM AK	0
5.	Diploma 4 (D4)	0
6.	Diploma 3 (D3)	0
7.	Diploma 2 (D2)	0



No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil
1	2	3
8.	Diploma 1 (D1)	0
9.	SMA	2
10.	SMP	0
11.	SD	0
Jumlah		8

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 8 orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan luasnya wilayah. Data awal dari BPBD yang merupakan data daerah rawan bencana secara umum harus disesuaikan dengan wilayah permukiman saat ini	Pengumpulan data perumahan di lokasi rawan bencana dilakukan secara bertahap, dan dilakukan <i>update</i> data secara berkala terhadap data yang sudah didapatkan
		Penanganan rehab rumah (ringan sedang) tidak bisa menunggu tahun anggaran berikutnya, sehingga harus dianggarkan saat itu juga.	Ada mekanisme BTT yang diatur dalam Perbup No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
		Pada beberapa daerah rawan bencana terdapat warga yang menginginkan untuk direlokasi ke tempat lain namun ada beberapa hal yang perlu pemenuhan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Belum tersedia studi atau Analisis tentang kondisi di lokasi apakah membutuhkan relokasi atau bisa dilakukan mitigasi struktural untuk mengurangi dampak bencana b. Warga belum memiliki tanah yang akan digunakan untuk lokasi relokasi 	Berkoordinasi dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. BPBD berkaitan dengan langkah penanganan yang akan dilakukan apakah relokasi atau mitigasi struktural b. desa untuk penyediaan tanah
		Tidak ada pernyataan bencana dari Kepala Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi	Berkoordinasi dengan BPBD



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
2.	Eksternal	Tidak mudahnya mencari lahan calon relokasi yang memenuhi unsur keselamatan baik administrasi maupun teknis	Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk memastikan status dan keamanan lahan

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 dilakukan dengan mekanisme Bantuan Sosial Tidak Terencana menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga, mekanisme ini hanya terbatas pada rehab rumah saja, untuk pembangunan kembali dan relokasi harus menggunakan anggaran yang terencana atau APBD regular. Namun apabila masyarakat yang menjadi korban bencana dan harus membangun rumah di lokasi baru dapat ikut menggunakan Bansos Tidak Terencana namun dengan batasan maksimal pemberian bantuan yang diterima sejumlah Rp25.000.000,00.

Bantuan Sosial Tidak Terencana diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk permohonan pembangunan kembali dan relokasi dilaksanakan pada tahun berikutnya dengan anggaran terencana.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar



Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.45.

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	14	Setiap tahun	Standar sarana prasarana Satpol PP dan PK (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a.gedung kantor, b.kendaraan operasional, c.perengkapan operasional)	25	Setiap tahun	5,558,891,880
					Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan PK (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	Setiap tahun	
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan PK dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	3	Setiap tahun	
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	294.352	Setiap tahun	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Setiap 5 tahun	294,512,500
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.324.756	Setiap 5 tahun	
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	298.724	Setiap tahun	
					Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	3	Setiap tahun	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	298.724	Setiap tahun	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	612	Setiap tahun	257,148,000
					Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di	2453	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kawasan rawan bencana)			
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	462	Setiap tahun	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	Setiap tahun	1,406,255,000
					Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	33	Setiap tahun	
					Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	457	Setiap tahun	
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	429	Setiap tahun	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	4.117	Setiap tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	170	Setiap tahun	8,083,940,200
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	3	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	825	Setiap tahun	
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sum ber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	253	Setiap tahun	
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	4.117	Setiap tahun	
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4.117	Setiap tahun	
Jumlah								15,699,175,580

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Untuk pencapaian indikator SPM Bidang urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp15.699.175.580.



4.5.3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.46.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14	14	100	5.558.891.8800	5.402.683.089	97.19%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	294.352	294.352	100	294.512.500	284.342.792	96.55%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	298.724	298.724	100	257.148.000	255.983.110	99.55%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	462	462	100	1.406.255.000	1.330.495.295	94.61%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	4.117	4.117	100	8,083,940,200	7,926,174,374	98.05%
				100	15,699,175,580	15,296,558,655	97.44%

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas telah mencapai 97,44%. Untuk mengukur tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan penghitungan berikut ini.

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

Tabel 4.47.
Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
(TRANTIBUM)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	14	14	100	80,00



No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Standar sarana prasarana Satpol PP dan PK (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	25	25	100	20,00
2.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan PK (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	6	6	100	20,00
3.	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan PK dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	3	3	100	20,00
4.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	100	20,00
5.	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	100	20,00
6.	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) tercapai 100%, dikarenakan tidak adanya korban terdampak akibat Penegakan Peraturan Daerah. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) merupakan indikator negatif dimana semakin kecil korban terdampak semakin baik), sehingga ke depan akan dipertahankan untuk seminimal mungkin tidak timbul kerugian baik materiil maupun korban luka.



b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.48.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	294.352	294.352	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100	20,00
2.	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.324.756	1.324.756	100	20,00
3.	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	298.724	298.724	100	20,00
4.	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	3	3	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana tercapai 100 % berdasarkan jumlah warga Negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan berupa sosialisasi, komunikasi edukasi daerah rawan bencana secara tatap muka maupun melalui media sosial. Sosialisasi, komunikasi edukasi daerah rawan bencana dilakukan tidak hanya oleh BPBD namun juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan adalah 294.352 orang dan semua terlayani sehingga tercapai 100 %.

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.49.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		



1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	298.724	298.724	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	612	612	100	20,00
2.	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	2.453	2.453	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana sebagai salah satu indikator capaian SPM sub Urusan Bencana tercapai 100 % berdasarkan jumlah warga Negara di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan berupa Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas dilakukan tidak hanya oleh BPBD namun juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Jumlah warga yang mendapatkan pelayanan adalah 298.724 orang dan semua terlayani sehingga tercapai 100 %.

d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

Tabel 4.50.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	462	462	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6



1.	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	100	20,00
2.	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	33	33	100	20,00
3.	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	457	457	100	20,00
4.	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	429	429	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana telah mencapai 100% berdasarkan jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan berupa Pelayanan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana. Pelayanan ini berdasarkan jumlah kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2024 sejumlah 462 kejadian dimana terdapat 33 korban bencana. Dan semua warga Negara terlayani sehingga tercapai 100 %.

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Tabel 4.51.

Indeks Pencapaian Target SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	4.117	4.117	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1.	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	170	170	100	20,00
2.	Prosedur operasional penanganan kebakaran,	3	3	100	20,00



	penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)				
3.	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	825	825	100	20,00
4.	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	253	253	100	20,00
5.	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	4.117	4.117	100	20,00
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4.117	4.117	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Satpol PP dan PK dan PK Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan Tabel di atas IPSPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) tercapai 100%, hal ini karena Damkar berusaha untuk selalu meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Tingkat waktu Tanggap (*respon time*) di bawah 15 menit, dengan adanya 7 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) maka kejadian penyelamatan akan segera direpon oleh Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdekat. Untuk Tahun 2024 terdapat 170 kejadian kebakaran dengan waktu tanggap 11,19 menit.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.52.
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
KATEGORI PENCAPAIAN TRANTIBUM				100	Tuntas Paripurna
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
KATEGORI PENCAPAIAN KEBENCANAAN				100	Tuntas Paripurna
1	Pelayanan informasi rawan bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR				100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori TUNTAS PARIPURNA. Capaian tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 97.44%.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Trantibumlinmas berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 4.53.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
	2	3	4		5
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.558.891.880	0	0	0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	294.512.500	0	0	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	257.148.000	0	0	0
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.406.255.000	0	0	0
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	8.083.940.200	0	0	0
	Dana Desa				
Jumlah		15.699.175.580	0	0	

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang, 2025



4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan Trantibumlinmas terdiri dari:

Tabel 4.54.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan/Golongan	Jumlah Personil (Satpol PP dan PK dan PK)	Jumlah Personil (BPBD)
1	2	3	3
1.	Strata 2 (S2)	4	6
2.	Strata 1 (S1)	12	23
3.	SM Non. AK	0	0
4.	SM AK	0	0
5.	Diploma 4 (D4)	0	0
6.	Diploma 3 (D3)	3	6
7.	Diploma 2 (D2)	0	0
8.	Diploma 1 (D1)	0	0
9.	SMA	343	23
10.	SMP	0	0
11.	SD	2	1
Jumlah		364	61

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang dan BPBD Kabupaten Magelang 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas sebanyak 425 orang terdiri dari BPBD 61 orang dan Satpol PP dan PK sebanyak 364 terdiri dari 91 ASN dan 273 Non ASN .

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:



Tabel 4.55.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum dan Damkar
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Tidak ada korban terdampak	Usahakan sesuai SOP agar tidak ada korban terdampak
		Tidak ada standar pasti kebutuhan ganti rugi per korban	Usulkan SHS
		Tidak ada rekening di SIPD untuk input ganti rugi materil/ pengobatan	Usul penambahan rekening ganti rugi

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 4.56.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Kesulitan dalam mengakses data penduduk <i>by name by address</i> , by NIK by KK pada tahapan SPM dikarenakan data tersebut tidak tersedia di Disdukcapil.	Koordinasi dengan Disdukcapil dan menunggu integrasi data kependudukan di dalam e SPM Bangda
		Pada capaian SPM sub urusan bencana, target setiap triwulan dapat berubah dikarenakan disesuaikan dengan kondisi kejadian bencana yang ada dan disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan KIE dan pelatihan yang tidak hanya dibiayai dari APBD murni saja namun juga dibiayai dari dana desa	Penulisan Target disesuaikan dengan realisasi setiap triwulan dikarenakan sulit untuk menentukan target tahunan karena bencana sewaktu-waktu dapat terjadi.
		Perencanaan kegiatan pendukung SPM tidak semua mendapatkan anggaran atau anggarannya sangat terbatas sehingga capain hanya sebatas yang mendapatkan penganggaran	Koordinasi dengan Bappeda dan Litbangda serta BPPKAD
		Pelaksanaan penerapan SPM sub urusan bencana tidak semua dapat terpenuhi seperti yang tertuang dalam Permendagri 101 tahun 2018 dikarenakan keterbatasan anggaran	Diperlukan koordinasi untuk penambahan anggaran terkait dengan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM
		Pada Tahapan Penerapan SPM Sub urusan bencana dari form 5 a sampai 5 e kesulitan pengisian data penduduk nya	Mengintegrasikan data penduduk kedalam aplikasi e-SPM Bangda

Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 telah memberikan arahan dan dukungan konkrit kepada pemerintah daerah untuk melindungi warga negara yang berada di kawasan rawan bencana maupun warga negara yang menjadi korban bencana melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana berorientasi pelayanan dasar dengan tiga layanan, yaitu:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KIE sebagai salah satu sub-layanan);
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Gladi Kesiapsiagaan sebagai salah satu sub-layanan);

serta



- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (pencarian, pertolongan dan evakuasi sebagai salah satu sub-layanan).

Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana juga telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang secara khusus menyebutkan bahwa penerapan SPM wajib memenuhi 4 (empat) tahapan inti, yaitu

- a. Pendataan kebutuhan;
- b. Perhitungan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. Rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- d. Pelaksanaan pelayanan dasar.

Tahapan tersebut dilaksanakan agar penerapan SPM dapat dilakukan lebih terarah dan fokus pada target layanan yaitu pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dengan berbagai tantangan seperti jangkauan wilayah yang luas, banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani, belum optimalnya pemahaman terhadap regulasi maupun substansi SPM, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta tingkat kerentanan maupun intensitas bencana yang semakin meningkat, pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan kolaborasi sesuai dengan karakteristik dan kapasitas wilayah dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana di tengah tantangan dan keterbatasan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana di daerah dapat membuat setiap pemerintah daerah lebih siap dan sigap dalam menghadapi bencana sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah korban jiwa ketika terjadi bencana.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA. Pelayanan Dasar di bidang sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.



4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.57.
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	414	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	48	Setiap tahun	1,238,085,002
					Penyediaan layanan darurat / reaksi cepat	24	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	227	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	24	Setiap tahun	
					Penyediaan alat bantu	144	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	24	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	414	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	251	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	8	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	6	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	24	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	74	Setiap	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							tahun	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	209	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	33	Setiap tahun	92,059,928
					Penyediaan layanan darurat/ layanan reaksi cepat	33	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	33	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	33	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	8	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	209	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	64	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	25	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	3	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	47	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1.954	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	1.954	Setiap tahun	509,861,591
					Penyediaan layanan darurat / layanan reaksi cepat	18	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanan	171	Setiap tahun	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Penyediaan sandang	17	Setiap tahun	
					Penyediaan alat bantu	25	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	17	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	237	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	45	Setiap tahun	
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	5	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	17	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	6	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Khusunya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis Tuna Sosial Khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	56	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	33	Setiap tahun	82,511,890
					Penyediaan layanan darurat / layanan reaksi cepat	33	Setiap tahun	
					Penyediaan permakanaan	33	Setiap tahun	
					Penyediaan sandang	33	Setiap tahun	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	33	Setiap tahun	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(Penyediaan P3K)			
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	33	Setiap tahun	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	51	Setiap tahun	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	Setiap tahun	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	47	Setiap tahun	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	56	Setiap tahun	
					Layanan rujukan	8	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	462	Setiap tahun	Penyediaan permakanaan	462	Setiap tahun	492,458,000
					Penyediaan sandang	150	Setiap tahun	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	12	Setiap tahun	
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	150	Setiap tahun	
					Pelayanan dukungan Psikososial	395	Setiap tahun	
Jumlah								2,414,976,411

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025



Untuk pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp2.414.976.411,00.

4.6.3 Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.58.
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	414	414	100	1.238.085.002	1.179.309.713	95,25
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	209	209	100	92.059.928	81.510.762	88,54
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1954	1954	100	509.861.591	495.555.698	97,19
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	56	56	100	82.511.890	78.637.470	95,3
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	462	462	100	492.458.000	482.560.080	97,99
Jumlah				100	2.414.976.411	2.317.573.723	95,97

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas realisasi keuangan SPM Bidang Urusan Sosial telah mencapai 95,97%. Untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}). Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024 berdasarkan penghitungan berikut ini.

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.59.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		



1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	414	414	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	48	48	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	24	24	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	227	227	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	24	24	100	20,00
5.	Penyediaan alat bantu	144	144	100	20,00
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	24	24	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	414	414	100	20,00
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	251	251	100	20,00
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	8	8	100	20,00
10.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	6	6	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	24	24	100	20,00
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16	16	100	20,00
13.	Layanan rujukan	74	74	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Layanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2024 mencapai target SPM 100%. Hal ini dapat tercapai karena peran aktif para petugas dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantr.

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti

Tabel 4.60.

Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	209	209	100	80,00
No	Penerima Pelayanan Dasar				



	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	33	33	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	33	33	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	33	33	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	33	33	100	20,00
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	8	8	100	20,00
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	209	209	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	64	64	100	20,00
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	25	25	100	20,00
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	3	3	100	20,00
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	47	47	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16	16	100	20,00
12.	Layanan rujukan	18	18	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2024 mencapai target SPM 100%.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Tabel 4.61.
Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	237Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1.954	1.954	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6



1.	Layanan data dan pengaduan	1.954	1.954	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	18	18	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	171	171	100	20,00
4.	Penyediaan sandang	17	17	100	20,00
5.	Penyediaan alat bantu	25	25	100	20,00
6.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	17	17	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	237	237	100	20,00
8.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	45	45	100	20,00
9.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	3	3	100	20,00
10.	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	5	5	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	17	17	100	20,00
12.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	16	16	100	20,00
13.	Layanan rujukan	6	6	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2024 mencapai SPM 100%. Capaian tersebut tidak lepas dari peran serta TKSK dan Pemerintah Desa dalam membantu memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Magelang.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Tabel 4.62.

Indeks Pencapaian Target SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	56	56	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Layanan data dan pengaduan	33	33	100	20,00
2.	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	33	33	100	20,00
3.	Penyediaan permakanan	33	33	100	20,00



4.	Penyediaan sandang	33	33	100	20,00
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	33	33	100	20,00
6.	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	33	33	100	20,00
7.	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	51	51	100	20,00
8.	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	3	100	20,00
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	5	5	100	20,00
10.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	47	47	100	20,00
11.	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	56	56	100	20,00
12.	Layanan rujukan	8	8	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Capaian kinerja Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Kabupaten Magelang Tahun 2024 mencapai target SPM 100%.

- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 4.63.

Indeks Pencapaian Target SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	462	462	100	80,00
No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Presentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan permakanan	462	462	100	20,00
2.	Penyediaan sandang	150	150	100	20,00



3.	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	12	12	100	20,00
4.	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	150	150	100	20,00
5.	Pelayanan dukungan Psikososial	395	395	100	20,00
Total Indeks Mutu Pelayanan Dasar					20,00

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota tercapai karena dukungan dari berbagai pihak, pilar-pilar sosial selalu siaga dan sigap 24 jam melakukan pelayanan kepada korban bencana, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

Berdasarkan tabel tersebut, selanjutnya dilakukan kompilasi untuk menghitung capaian Indeks capaian SPM. Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}), sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.64.
Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian Layanan (80%)	Indeks Pencapaian Mutu (20%)	Indeks Pencapaian SPM	Kategori Indeks SPM
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80,00	20,00	100	Tuntas Paripurna
BIDANG URUSAN SOSIAL				100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) Bidang Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebesar 100 % dengan kategori TUNTAS PARIPURNA, hal ini menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, sama dengan 100%. Capaian tersebut merupakan hasil dari peran serta dan peran aktif setiap petugas serta koordinasi dengan Pemerintah Desa. Meskipun Indeks Pencapaian SPM (IP_{SPM}) telah mencapai 100%, namun ada terdapat hal yang masih menjadi perhatian, salah satunya beberapa Sub Kegiatan tidak memiliki pagu anggaran tersendiri.



4.6.4 Alokasi Anggaran

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Sosial berasal dari alokasi belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD kabupaten Magelang Tahun 2024, terdiri dari:

Tabel 4.65.
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran			
		APBD	APBN	DAK	Sumber Dana Lain yang Sah
1	2	3	4		5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1.238.085.002	0	0	0
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	92.059.928	0	0	0
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	509.861.591	0	0	0
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan, Pengemis dan Luar Panti	82.511.890	0	0	0
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	492.458.000	0	0	0
Jumlah		2.414.976.411	0	0	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Sumber anggaran untuk penerapan dan pencapaian indikator SPM Bidang urusan Sosial pada tahun 2024 berasal dari APBD, sedangkan sumber anggaran dari APBN, DAK dan sumber dana lain yang sah tidak tersedia anggaran.

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial terdiri dari:



Tabel 4.66.
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	2	3
1.	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pant d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant	
	PNS	7
	Tenaga Kontrak	5
	Pendamping Rehabilitasi Sosial	3
	Relawan/ TSKS	21
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	PNS	4
	Tenaga Kontrak	2
	Relawan/ tagana	70
Jumlah		112

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial sebanyak 112 orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.67.
Permasalahan dan Solusi
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
1.	Internal	Pengumpulan data melalui DTKS cukup sulit dilakukan karena DTKS tidak dapat diakses secara BNBA. Pengumpulan data membutuhkan waktu yang lama, gelandangan dan pengemis yang mobilitasnya sangat tinggi antar wilayah, bahkan antar kabupaten, banyak yang belum memiliki identitas diri,	Koordinasi dengan TSKS untuk membantu dalam pengumpulan data. Bekerja sama dengan pihak desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, relawan (TKSK) dan tenaga sosial yang ada di desa untuk mendapatkan data identitas sasaran.



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		terutama lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis.	
		Beberapa sub kegiatan pelaksanaan SPM tidak memiliki anggaran.	Melakukan kegiatan dengan menggunakan anggaran lain yang berhimpitan.
		Pemahaman persepsi yang berbeda dari petugas terkait penjelasan layanan mutu dalam SPM.	Mempelajari kembali penjelasan terkait layanan mutu dan menyamakan persepsi antar petugas.
2.	Eksternal	Pemenuhan kebutuhan dasar dihitung berdasarkan jumlah sasaran, tetapi terkendala dengan anggaran yang tersedia	Bekerjasama dengan lintas sektor dan pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar sasaran, terutama untuk pemenuhan alat bantu kepada disabilitas

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

4.7. Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD. Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan didasarkan pada rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Kabupaten Magelang Tahun 2024 pada 6 (enam) bidang urusan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4.7.1 Urusan Pendidikan

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.68.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
				212.401.959.059	205.092.815.219	96,56



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			188.520.647.035	183.166.071.004	97,16
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		82.863.306.371	82.160.793.512	99,15
		1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	407.858.300	380.512.306	93,30
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	334.423.600	309.156.522	92,44
		3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.944.372.705	1.894.943.136	97,46
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	197.000.000	193.154.989	98,05
		5	Pengadaan Mebel Sekolah	830.064.754	828.965.500	99,87
		6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	145.187.368	53.616.855	36,93
		7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	530.000.041	526.721.262	99,38
		8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.553.383.791	1.436.357.685	92,47
		9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	115.200.000	52.882.158	45,90
		10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	71.816.790.906	71.687.229.416	99,82
		11	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	153.780.000	150.741.870	98,02
		12	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.915.600.000	1.851.428.654	96,65
		13	Pembangunan Ruang Kelas Baru	640.000.000	640.000.000	100,00
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	802.000.000	771.098.879	96,15
		15	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	443.050.000	437.226.357	98,69
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.034.594.906	946.757.923	91,51
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		70.898.212.143	67.996.669.339	95,91
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	283.782.765	255.357.734	89,98
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	836.339.840	628.315.120	75,13
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	917.985.826	861.895.899	93,89
		4	Pembangunan Laboratorium	969.209.008	953.406.517	98,37
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.143.389.694	1.119.927.858	97,95
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.157.850.728	7.878.420.514	96,57
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	560.137.399	526.731.302	94,04
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	915.949.096	883.013.175	96,40
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.563.134.833	1.463.533.548	93,63



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.353.336.716	1.306.135.063	96,51
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	2.798.969.797	2.760.148.500	98,61
		12	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	794.175.000	413.400.000	52,05
		13	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.330.365.786	365.980.511	27,51
		14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	814.650.000	629.539.908	77,28
		15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	94.675.000	52.869.211	55,84
		16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	44.118.300.000	43.972.273.322	99,67
		17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	516.619.003	460.739.635	89,18
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	881.260.750	821.376.094	93,20
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	240.855.000	228.331.210	94,80
		20	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	315.375.000	295.864.435	93,81
		21	Pembangunan Ruang Kelas Baru	623.450.902	596.773.120	95,72
		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.668.400.000	1.522.636.663	91,26
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		27.154.161.952	25.970.460.757	95,64
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	425.860.430	411.883.067	96,72
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	463.929.445	412.101.378	88,83
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	124.405.774	115.453.456	92,80
		4	Pengadaan Mebel PAUD	119.297.689	113.698.200	95,31
		5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.435.805.000	1.323.822.916	92,20
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	474.310.700	415.996.001	87,71
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	7.067.552.914	6.819.921.929	96,50
		8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.928.400.000	16.253.564.580	96,01
		9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	114.600.000	104.019.230	90,77
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		7.604.966.569	7.038.147.396	92,55
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	806.107.344	695.940.000	86,33
		2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	380.486.900	370.565.500	97,39
		3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.169.000.000	5.818.125.000	94,31
		4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	74.147.000	4.104.666	5,54



No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
		5	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	175.225.325	149.412.230	85,27
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
		1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	21.812.162.024	20.754.178.818	95,15
		2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.069.150.000	1.172.565.397	56,67

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2025

4.7.2 Urusan Kesehatan

Pelaksanaan SPM bidang urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.69.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
			7.625.565.545	7.075.377.436	92,78
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		7.625.565.545	7.075.377.436	92,78
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.625.565.545	7.075.377.436	92,78
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	2.000.858.918	1.968.537.552	98,38
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	672.491.129	649.745.868	96,62
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	847.030.888	484.059.756	57,15
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	45.842.640	41.521.187	90,57
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	383.420.540	325.119.940	84,79
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	107.767.385	100.712.662	93,45



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	45.811.560	41.876.448	91,41
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	50.278.904	47.323.676	94,12
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	2.077.999.738	2.076.553.500	99,93
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	42.224.759	40.699.675	96,39
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.006.776.143	970.751.731	96,42
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	345.062.941	328.475.441	95,19

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2025

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.70.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
			33.487.55.085	33.446.781.020	99,88
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		17.285.747.503	17.261.683.124	99,86
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	17.285.747.503	17.261.683.124	99,86
	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3.886.602.890	3.881.333.480	99,86
	2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	10.991.136.785	10.986.393.269	99,96
	3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	2.408.007.828	2.393.956.375	99,42
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		10.301.809.582	10.285.097.896	99,84
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.301.809.582	10.285.097.896	99,84



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	2			3	4	5
		1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	7.005.666.032	6.992.471.740	99,81
		2	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	3.296.143.550	3.292.626.156	99,89
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA					
			IBM Pamsimas	2.400.000.000	2.400.000.000	100,00
			IBM Sanimas SPALD-S	3.500.000.000	3.500.000.000	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2025

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.71.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	2			3	4	5
				271.743.898	153.868.209	56,62
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			271.743.898	153.868.209	56,62
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		49.777.270	30.197.584	60,67
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		16.277.270	11.866.240	72,90
	2	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana		33.500.000	18.331.344	54,72
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		221.966.628	123.670.625	55,72
	1	Pembangunan rumah bagi korban bencana		184.859.022	97.560.891	52,78
	2	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota		37.107.606	26.109.734	70,36

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2025

4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan SPM bidang urusan Trantibumlinmas diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.



Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.72.

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2024**

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS		15.699.175.580	15.296.558.655	97,44
	TRANTIBUMLINMAS		5.558.891.880	5.402.683.089	97,19
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		5.558.891.880	5.402.683.089	97,19
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.732.465.100	4.646.494.828	98,18
		1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patroli. pengamanan. dan pengawalan	3.435.116.000	3.373.518.517	98,21
		2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	158.844.054	157.234.233	98,99
		3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	575.400.000	566.792.001	98,50
		4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	74.185.000	71.150.204	95,91
		5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	148.042.400	146.154.361	98,72
		6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	294.362.500	293.154.380	99,59
		7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	35.013.146	32.190.000	91,94
		8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	6.500.000	6.301.131	96,94
		9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	5.000.000	0	0
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	814.853.780	745.363.461	91,47
		1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0	0	0
		2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	271.251.880	265.810.508	97,99
		3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	543.601.900	479.552.953	88,22



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
1	2		3	4	5
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.575.000	10.824.800	93,52
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	11.575.000	10.824.800	93,52
KEBENCANAAN					
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		2.056.343.500	1.967.701.192	95,78
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	294.512.500	284.342.792	96,55
	1	Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	294.512.500	284.342.792	96,55
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	257.148.000	255.983.110	99,55
	1	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	249168000	248036850	99,55
	2	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	3.680.000	3.679.260	99,98
	3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	4.300.000	4.267.000	99,23
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.406.255.000	1.330.495.295	94,61
	1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	235.393.000	231.850.620	98,50
	2	Pencarian. pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	482.833.000	481.341.280	99,69
	3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	688.029.000	617.303.395	89,72
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	98.428.000	96.879.995	98,43
	1	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	9.382.000	8.984.180	95,76
	2	Penguatan Kelembagaan Bencana kabupaten/Kota	2.873.000	2.856.700	99,43
	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	14.817.000	14.735.972	99,45
	4	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kab/Kota	71.356.000	70.303.143	98,52
KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR					
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)		8.083.940.200	7.926.174.374	98,05
	1	Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman. Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.083.940.200	7.926.174.374	98,50
	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	343.000.000	319.825.359	93,24
	2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	7.282.940.200	7.171.241.251	98,47
	3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	208.000.000	187.681.273	90,23



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	2			3	4	5
	4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan. penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		250.000.000	247.426.491	98,97
	5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran		0	0	0

Sumber: Satpol PP & PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2025

4.7.6 Urusan Sosial

Pelaksanaan SPM bidang urusan Sosial diampu oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.73.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2024

No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	2			3	4	5
BIDANG URUSAN SOSIAL				2.414.976.4110	32.317.573.723	95,97
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.922.518.411	1.835.013.643	95,45
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		1.922.518.411	1.835.013.643	95,45
		1	Penyediaan Permakanan	88.461.880	82.616.880	93,39
		2	Penyediaan Sandang	20.440.000	20.408.050	99,84
		3	Penyediaan alat bantu	210.191.656	188.560.986	89,71
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15.000.000	11.594.700	77,30
		5	Pemberian bimbingan fisik. mental. spiritual. dan sosial	1.274.914.300	1.232.825.800	96,70
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lanjut usia terlantar. serta gelandangan pengemis dan masyarakat	90.984.660	90.303.962	99,25
		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1.222.124	1.222.000	99,99
		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.222.124	1.222.000	99,99
		9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.727.971	4.678.690	98,96
		10	Pemberian layanan kedaruratan	182.797.944	169.199.990	92,56
		11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.222.123	1.222.000	99,99
		12	Pemberian layanan rujukan	31.333.630	31.158.585	99,44
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		492.458.000	482.560.080	97,99
		1	Penyediaan makanan	168.032.000	167.789.900	99,86



No.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	2			3	4	5
	2	Penyediaan sandang		73.950.000	71.904.660	97,23
	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi		88.600.000	87.742.365	99,03
	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan		72.900.000	67.214.970	92,20
	5	Pelayanan dukungan Psikososial		88.976.000	87.908.185	98,80

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2025

Hal yang menjadi isu dalam implementasi SPM saat ini salah satunya adalah kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pemenuhan SPM, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan SPM. Berkaitan dengan itu pemerintah daerah perlu perlu memilah program dan kegiatan (sesuai Kepmendagri nomor 900-1317 Tahun 2023) yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh dinas terkait. Selain itu faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pemenuhan SPM di Kabupaten Magelang juga menjadi salah satu permasalahan dalam mengoptimalkan Penerapan SPM di Kabupaten Magelang.

Terkait isu dan permasalahan tersebut diatas, diperlukan strategi pengimplementasian SPM oleh Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan, program kegiatan serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung terselenggaranya SPM sub urusan Bencana dan memastikan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah.
3. Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM.
5. Penerapan SPM perlu didukung oleh data yang valid dan terukur dengan pemenuhan yang dilakukan secara bertahap.
6. Pelibatan dan kolaborasi multi pihak (*pentahelix*) dalam implementasi SPM sub urusan Bencana.
7. Penguatan sosialisasi dan pelatihan terkait penerapan SPM sub urusan Bencana baik secara teknis, substansi maupun administrasi.

BAB V PENUTUP

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024





BAB V PENUTUP

LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019–2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah. Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Keberhasilan serta prestasi yang telah diraih selama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun dari pihak lain yang turut mengapresiasi patut disyukuri mengingat keberhasilan dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Magelang telah berupaya untuk dapat berkarya, bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin serta dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Namun demikian, masih perlu upaya-upaya yang lebih maksimal untuk dapat menjawab berbagai tantangan yang dihadapi ke depan seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-haknya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.

Melalui kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jalinan komunikasi yang telah berlangsung. Semoga hasil pembangunan yang telah diraih



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 dapat dirasakan ke seluruh pelosok wilayah serta menyentuh semua lapisan masyarakat.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2024 ini disusun untuk digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian. Evaluasi LPPD dilaksanakan agar terwujud sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi, sehingga terjadi perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024



LAMPIRAN 2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD%	107,215.00	90.35%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		118,665.00		DISDUKCAPIL
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar%	49,710.00	78.62%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		63,225.00		DISDUKCAPIL
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama%	7,395.00	100.00%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		7,395.00		DISDUKCAPIL
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan%	4,970.00	100.00%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		4,970.00		DISDIKBUD
		5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten		778.00	0.06%	DINKES
				Jumlah Penduduk kabupaten		1,345,662.00		DISDUKCAPIL
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama%	5.00	71.43%	DINKES
				Jumlah RS di kabupaten		7.00		DINKES
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan%	13,443.00	93.41%	DINKES
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		14,391.00		DINKES
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan%	13,212.00	96.22%	DINKES
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		13,731.00		DINKES
2	Kesehatan	9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	13,193.00	96.08%	DINKES
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		13,731.00		DINKES
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	75,002.00	100.00%	DINKES
				Jumlah balita di kabupaten		75,002.00		DINKES
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar%	169,354.00	93.11%	DINKES
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		181,890.00		DISDUKCAPIL

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	639,284.00	74.77%	DINKES
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		854,997.00		DISDUKCAPIL
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	172,603.00	83.31%	DINKES
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		207,179.00		DISDUKCAPIL
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	190,548.00	974.77%	DINKES
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		19,548.00		DINKES
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	20,400.00	100.00%	DINKES
				Jumlah penderita DM di kabupaten		20,400.00		DINKES
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	2,463.00	100.00%	DINKES
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		2,463.00		DINKES
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	11,024.00	100.00%	DINKES
				Jumlah penderita TBC di kabupaten		11,024.00		DINKES
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	,,,,,,,,,%	18,088.00	98.32%	DINKES
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		18,397.00		DINKES
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DPRKP
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)		1.00		DPRKP
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DPRKP
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)		1.00		DPRKP
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	,,,,,,,,,%	2,448.60	6.87%	DPUIPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		35,662.45		DPUIPR
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	,,,,,,,,,%	427,927.00	94.33%	DPUIPR

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
			rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		453,626.00		DPUIPR
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah rumah di Kabupaten, % Unit	418,618.00 453,626.00	92.28%	DPUIPR BAPPEDA dan LITBANGDA
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya Jumlah IMB yang berlaku, % 	256.00 256.00	100.00%	DPMPTSP DPMPTSP
		25	Tingkat kemantapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten, % 	887.04 1,020.66	86.91%	DPUIPR DPUIPR
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis Jumlah kebutuhan teknis/analisis di wilayah kabupaten, % 	249.00 837.00	29.75%	DPUIPR DPUIPR
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya, % 	155.00 155.00	100.00%	DPUIPR DPUIPR
	4	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n, % 	25.00 25.00	100.00%	BPBD BPBD
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan, % 	2.00 2.00	100.00%	DPRKP DPRKP
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha, % 	3.39 135.19	2.51%	DPRKP DPRKP
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni Jumlah total unit rumah Kabupaten, % Unit	15,841.00 378,533.00	4.18%	DPRKP BAPPEDA dan LITBANGDA
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah unit rumah kab/kota, % Unit	16,068.00 16,068.00	10000.00%	DPRKP BAPPEDA dan LITBANGDA
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk, % 	26.00 26.00	100.00%	SATPOL PP SATPOL PP
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan, %	68.00	80.95%	SATPOL PP

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		84.00		SATPOL PP
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	297,794.00	297,794.00	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	2,618.00	2,618.00	BPBD
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	945.00	945.00	BPBD
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah, %	157.00	92.35%	BPBD
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten		170.00		BPBD
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		Menit	11.19	11.19	BPBD
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, %	2,633.00	100.00%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		2,633.00		DINSOS PPKB PPPA
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran, %	462.00	100.00%	DINSOS PPKB PPPA
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		462.00		DINSOS PPKB PPPA
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD, %	18.00	100.00%	DISPERINNAKER
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten		18.00		DISPERINNAKER
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, %	60.00	0.27%	DISPERINNAKER
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		22,063.00		DISPERINNAKER
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)		6,193.52	28.07%	DISPERINNAKER
				Jumlah tenaga kerja		22,063.00		DISPERINNAKER

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	,,,,,,,,,%	28.00	1.10%	DISPERINNAKER
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	Jumlah Perusahaan		2,554.00	41.33%	DISPERINNAKER
				Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	,,,,,,,,,%	872.00		DISPERINNAKER
				Jumlah pencaker yang terdaftar		2,110.00		DISPERINNAKER
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	,,,,,,,,,%	590,996,387,788.00	25.46%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		2,320,987,401,118.00		BPPKAD
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	,,,,,,,,,%	237.00	100.00%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		237.00		DISDUKCAPIL
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	59.00	0.88%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah penduduk perempuan		667,928.00		DISDUKCAPIL
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung	Jumlah cadangan pangan kabupaten	,,,,,,,,,%	17.76	25.83%	DISTAN PANGAN
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		68.76		DISTAN PANGAN
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi	,,,,,,,,,%	1,560,566.30	80.69%	DPMPTSP
				Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	m2	1,934,144.90		DPMPTSP
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DPUPR
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		10,000.00		DPUPR
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	,,,,,,,,,%	1,307,493.34	100.00%	DPMPTSP
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		1,307,493.30		DPMPTSP
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DPUPR
				Jumlah penerima tanah obyek landreform		1.00		DPUPR
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DPUPR
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan		1.00		DPUPR
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	,,,,,,,,,%	0.00	100.00%	BAGIAN PEMERINTAHAN
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		1.00		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		69.40		DLH
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		54,88		DLH
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)		92,06		DLH
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)		52,41		DLH
				Total Vol sampah yang dapat ditangani	,,,,,,,,,%	155,316.91	63.63%	DLH
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		244,077.51		DLH

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	,,,,,,,,,%	43.00	61.43%	DLH
				Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		70.00		DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	,,,,,,,,,%	1,020,736.00	99.78%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		1,022,957.00		DISDUKCAPIL
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	,,,,,,,,,%	247,948.00	76.84%	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		322,699.00		DISDUKCAPIL
		62	Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akte kelahiran	,,,,,,,,,%	333,805.00	98.34%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun		339,445.00		DISDUKCAPIL
		63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	,,,,,,,,,%	13.00	81.25%	DISDUKCAPIL
				Jumlah OPD		16.00		BAGIAN ORGANISASI
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	,,,,,,,,,%	1.00	100.00%	DISPERMADES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		1.00		DISPERMADES
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,%	25.00	15.24%	DISPERMADES
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		164.00		DISPERMADES
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	5ΣASFR		2.03	2.11%	DINSOS PPKB PPPA
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence	Jumlah peserta KB Aktif Modern	,,,,,,,,,%	148,211.00	74.48%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah Pasangan Usia Subur		198,994.00		DINSOS PPKB PPPA
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	,,,,,,,,,%	458.00	0.23%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah Pasangan Usia Subur		198,994.00		DINSOS PPKB PPPA
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)		0.64	63.00%	DISHUB
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		0.15	0.24%	DISHUB
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	,,,,,,,,,%	47.00	100.00%	DISKOMINFO
				Jumlah OPD		47.00		DISKOMINFO
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	,,,,,,,,,%	33.00	100.00%	DISKOMINFO
				Jumlah Layanan Publik		33.00		DISKOMINFO
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	,,,,,,,,,%	917,714.00	100.00%	DISKOMINFO

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
			prioritas pemerintah dan pemerintah	Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)		917,714.00		DISDUKCAPIL
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	,,,,,,,,,%	225.00	96.98%	DISDAGKOP UKM
				Jumlah seluruh koperasi		232.00		DISDAGKOP UKM
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	,,,,,,,,,%	63,361.00	96.38%	DISDAGKOP UKM
				Jumlah usaha mikro keseluruhan		65,739.00		DISDAGKOP UKM
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	,,,,,,,,,%	532,208,812,727.00	10.88%	DPMPTSP
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten		4,891,094,889,693.00		DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	,,,,,,,,,%	30.00	0.01%	DISPARPORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		301,018.00		DISDUKCAPIL
				Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	,,,,,,,,,%	51,330.00		DISPARPORA
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		301,018.00	9.00	DISDUKCAPIL
				Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	9.00		DISPARPORA
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	26.00	55.32%	DISKOMINFO
				Jumlah OPD		47.00		BAGIAN ORGANISASI
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	26.00	55.32%	DISKOMINFO
				Jumlah OPD		47.00		BAGIAN ORGANISASI
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		540.00	83.72%	DISKOMINFO
				Jumlah area penilaian		645.00		DISKOMINFO
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	,,,,,,,,,%	581.00	48.50%	DISDIKBUD
				Jumlah cagar budaya yang terdata		1,198.00		DISDIKBUD
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		78.10	78.10	DISPLUSPA
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$		88.19	88.19	DISPLUSPA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	77.57	77.57	DISPUSPA
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	%	66.67	66.67	DISPUSPA
Urusan Pilihan								
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	,,,,,,%	20,707.20	100.01%	DISPETERIKAN
				Target produksi perikanan		20,705.78		
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1		43,955.00	17.38%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan tahun n-1		252,961.00		DISPARPORA
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1		141,466.00	4.42%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan tahun n-1		3,201,817.00		DISPARPORA
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	,,,,,,%,	90,750.00	49.87%	DISPARPORA
				Jumlah kamar yang tersedia		181,963.00		DISPARPORA
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	Rupiah	1,985.79	4.54%	BAPPEDA dan LITBANGDA
				Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)	Rupiah	43,736.00		BAPPEDA dan LITBANGDA
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun n	,,,,,,%,	53,660,179,539.00	10.30%	BPPKAD		
		Realisasi PAD Tahun n		520,854,499,261.00		BPPKAD		
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	Ton/Ha	456,278.93	791.69%	DISTAN PANGAN
				Luas Panen (ha)		57,633.45		DISTAN PANGAN
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	%	-904.00	-23.95%	DISPETERIKAN

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t-1		3,775.00		DISPETERIKAN
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DPUPR
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi		1.00		DPUPR
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan		15,819.00	100.00%	DPMP TSP
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		15,819.00		DPMP TSP
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	,,,,,,,,,%	23,687.00	48.51%	DISTAN PANGAN
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		48,831.00		DISTAN PANGAN
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	,,,,,,,,,%	6,909.00	36.01%	DISDAGKOP UKM
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		19,184.00		DISDAGKOP UKM
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun n-1) / Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n-1)	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DISPERINNAKER
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1		24,045.00		DISPERINNAKER
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Pertumbuhan sektor non migas	,,,,,,,,,%	23,2	175,1%	DISPERINNAKER
				Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	,,,,,,,,,%	19,3		
				Nilai ekspor produk industri non migas	USD Miliar	0,1		
				Jumlah tenaga kerja di sector industri	Juta	2,1		
				Nilai investasi sektor industri	Rp Triliun	130,4		
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DISPERINNAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan		0.00		DISPERINNAKER
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DISPERINNAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan		1.00		DISPERINNAKER
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	0.00	0.00%	DISPERINNAKER
				Jumlah izin yang dikeluarkan		1.00		DISPERINNAKER

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		100.00	100.00	DISPERINNAKER
	Transmigrasi	106		1.Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya 2.Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3.Jumlah satuan pemukiman yang dibina		0.00	0.00	DISPERINNAKER

LAMPIRAN 2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)%	282,388,235,041.00	9.84%	BPPKAD
				Jumlah APBD (realisasi)		2,870,556,698,886.00		BPPKAD
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD%	520,854,499,261.00	18.73%	BPPKAD
				Jumlah PDRB non migas		2,780,409,776,301.00		BPPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3.00	3.00	INSPEKTORAT
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3.00	3.00	INSPEKTORAT
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)%	1,727,833,277,027.00	60.19%	BPPKAD
				Jumlah belanja APBD (realisasi)		2,870,556,698,886.00		BPPKAD
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	8.00	8.00	INSPEKTORAT
					WDP	2.00	2.00	INSPEKTORAT
					TW	0.00	0.00	INSPEKTORAT
					TMP	0.00	0.00	INSPEKTORAT
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n%	0.00	0.00%	BAGIAN PENGADAAN
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		0.00		BAGIAN PENGADAAN
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif%	17,097.00	84.21%	BAGIAN PENGADAAN
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		20,303.00		BAGIAN PENGADAAN
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan%	734,668,155,515.00	33.21%	BAGIAN PENGADAAN
				Total belanja langsung		2,212,214,762,515.00		BPPKAD
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)%	229,757,170,924.00	54.03%	BAGIAN PBJ
				Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)		425,246,146,058.00		BAGIAN PBJ
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)%	1,403.00	64.71%	BKPPD

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	Perangkat Daerah
						Elemen data		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2,168.00		BKPPD
		12	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	735.00	33.93%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2,166.00		BKPPD
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,%	126.00	17.14%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		735.00		BKPPD
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	,,,,,,,,,%	2,870,556,698,886.00	97.41%	BPPKAD
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2,946,828,829,481.00		BPPKAD
		15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	,,,,,,,,,%	520,854,499,261.00	113.46%	BPPKAD
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		459,053,234,338.00		BPPKAD
		16	Assets management	Jumlah Asset Manajemen	Jumlah	4.00	4.00	BPPKAD
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	1	BPPKAD
		17	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun	Nilai Realisasi SILPA	,,,,,,,,,%	100,661,386,720.00	3.42%	BPPKAD
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2,946,828,829,481.00		BPPKAD
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	,,,,,,,,,%	315,823,600.00	99.47%	BPPKAD
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda		317,500,000.00		BPPKAD
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	,,,,,,,,,%	12.00	100.00%	BPPKAD
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		12.00		BPPKAD

0A A A AA A
AN A A A A

PENGHARGAAN
SERTIFIKAT
KABUPATEN/KOTA BEBAS
FRAMBUSIA DARI
KEMENKES RI

6 MARET 2024



PENGHARGAAN
SEKOLAH ADIWYATA
PROVINSI DARI DLHK
PROV JATENG

25 JUNI 2024



PENGHARGAAN
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
TERBAIK KE-4 TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
DARI BIRO HUKUM PROV
JATENG

17 JULI 2024



0A A A AA A
AN A A A A

PENGHARGAAN
KEMATANGAN UKPBJ
LEVEL 3 (PROAKTIF) DARI
LKPP

6 AGUSTUS 2024



PENGHARGAAN
PEMBINA PROKLIM
DARI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

9 AGUSTUS 2024



PENGHARGAAN
PENDUKUNG PROKLIM
DARI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

9 AGUSTUS 2024



0A A A AA A
AN A A A

PENGHARGAAN PROKLIM
LESTARI DARI
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

9 AGUSTUS 2024



PENGHARGAAN
PROKLIM UTAMA
DARI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

9 AGUSTUS 2024



PENGHARGAAN
PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
TERBAIK KE-7 KATEGORI
KABUPATEN TINGKAT
NASIONAL DARI BPHN
KEMENKUMHAM RI

9 AGUSTUS 2024



0A A A AA A
AN A A A A

PENGHARGAAN SEKOLAH
ADIWIYATA MANDIRI
DARI KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

2 OKTOBER 2024



PENGHARGAAN
SEKOLAH ADIWIYATA
NASIONAL DARI
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

2 OKTOBER 2024



SUBROTO AWARD
KATEGORI PEMERINTAH
DAERAH YANG
KOLABORATIF DALAM
MANAJEMEN MITIGASI
BENCANA GEOLOGI DARI
KEMENTERIAN ESDM

10 OKTOBER 2024



0A A A AA A
AN A A A

PENGHARGAAN GADJAH
MADA DIGITAL
TRANSFORMATION
GOVERNANCE INDEX
(GM-DTGI 2024) DARI
UNIVERSITAS GADJAH
MADA

11 OKTOBER 2024



PENGHARGAAN
BHUMANDALA NAMA
RUPABUMI TAHUN
2024 (PREDIKAT
RAJATA) DARI BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL

4 NOVEMBER 2024



PENGHARGAAN DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA TERBAIK
DALAM PENGELOLAAN VAKSIN
MELALUI PENERAPAN
APLIKASI SISTEM
MONITORING LOGISTIK
IMUNISASI SECARA
ELEKTRONIK (SMILE)
REGIONAL BARAT TAHUN 2024
DARI KEMENKES RI

7 NOVEMBER 2024



0A A

AN A

A AA

A A A

A

PENGANUGERAHAN
PREDIKAT PENILAIAN
KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024 DARI
OMBUDSMAN RI

14 NOVEMBER 2024



JUARA I KATEGORI
AMENITAS ANUGERAH
DESA WISATA
INDONESIA 2024 DARI
KEMENTERIAN
PARIWISATA RI

17 NOVEMBER 2024



PENGHARGAAN DAERAH
TERTIB UKUR 2023, PASAR
TERTIB UKUR 2023 UNTUK
PASAR SALAMAN, PASAR
TERTIB UKUR UNTUK PASAR
TALUN, PASAR TERTIB UKUR
2023 UNTUK PASAR BLABAK,
PASAR TERTIB UKUR 2023
UNTUK PASAR SALAK
GREMENG, PASAR TERTIB
UKUR 2023 UNTUK PASAR
SIDOWANGI KAJORAN DARI
MENTERI PERDAGANGAN RI

18 NOVEMBER 2024



0A A A AA A
AN A A A

PENGHARGAAN
PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK)
NF BOK POM TAHUN 2024
DARI BBPOM

25 NOVEMBER 2024



PENGHARGAAN
PUSKESMAS TERBAIK
DALAM
IMPLEMENTASI DAN
CAPAIAN INDIKATOR
PROGRAM
TUBERKULOSIS
TAHUN 2024 DARI
KEMENKES RI

2 DESEMBER 2024



PENGHARGAAN
PEMERINTAH
KABUPATEN SANGAT
INOVATIF DARI
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

5 DESEMBER 2024



0A A

AN A

A AA

A A A

A

PENGHARGAAN
KONTRIBUTOR DATA
TERBAIK BPS AWARD
2024 DARI BPS
KABUPATEN
MAGELANG

7 DESEMBER 2024



PENGHARGAAN
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
(KIP AWARDS) DARI
KOMISI INFORMASI
PROV JATENG

9 DESEMBER 2024



PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA
YANG KONSISTEN
DALAM MELAKUKAN
INPUT DAN
VERIFIKASI DI
APLIKASI SP2KP
KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

10 DESEMBER 2024



0A A A AA A
AN A A A A

PENGHARGAAN KKP
HAM
(KABUPATEN/KOTA
PEDULI HAK ASASI
MANUSIA) TAHUN 2024
DARI DISPERINDAG
PROV JATENG

10 DESEMBER 2024



PENGHARGAAN
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
(KIP AWARDS) DARI
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROV JATENG

19 DESEMBER 2024



